

# Credit Crunch di Indonesia Setelah Krisis

Fakta, Penyebab dan Implikasi Kebijakan

Juda Agung • Bambang Kusmiarso • Bambang Pramono •  
Erwin G. Hutapea • Andry Prasmuko • Nugroho Joko Prastowo



Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter  
Bank Indonesia

Studi ini mengkaji apakah penurunan kredit yang tajam dari sektor perbankan di Indonesia adalah akibat credit crunch atau disebabkan oleh lemahnya permintaan kredit sebagai konsekuensi resesi. Dengan melakukan analisis empiris baik secara makro dengan menggunakan data agregat maupun secara mikro dengan menggunakan data individual perbankan (panel data) serta survey yang dilakukan kepada bank dan perusahaan, studi ini menyimpulkan terjadinya credit crunch di Indonesia. Sementara itu studi ini juga menunjukkan bahwa pendanaan investasi usaha yang berasal dari perbankan telah menurun dengan drastis yaitu dari 40% menjadi 25%. Selanjutnya, studi ini memberikan implikasi kebijakan khususnya untuk kebijakan moneter dan perbankan di Indonesia dan secara umum untuk negara-negara di Asia pasca krisis.

Alamat Korespondensi :

Bagian Studi dan Struktur Perkembangan Pasar Keuangan  
Direktorat Riset Ekonomi & Kebijakan Moneter

Bank Indonesia

Jl. Budi Kemuliaan, Gedung B, Lt. 19, Jakarta 10010 Indonesia

Phone : 62 21 381 7733

62 21 381 8624

Fax. : 62 21 231 0553

E-mail : juda@bi.go.id

ISBN 979-96680-0-X



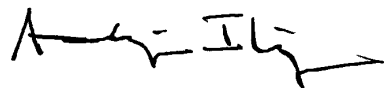
# Kata Sambutan

Membaiknya kondisi makroekonomi khususnya moneter dibandingkan pada masa krisis masih belum dapat mengembalikan tingkat pertumbuhan ekonomi secara normal. Salah satu faktor penyebabnya adalah masih lambatnya penyaluran kredit oleh perbankan. Mengingat besarnya peran perbankan dalam pembiayaan dunia usaha, lambatnya pertumbuhan kredit dapat menghambat proses pemulihan ekonomi.

Pertumbuhan kredit yang lambat tersebut ditengarai lebih disebabkan faktor penawaran yaitu keengganan bank untuk menyalurkan kredit, yang sering disebut sebagai fenomena credit crunch. Credit crunch dapat memberikan dampak yang kurang menguntungkan (second round effect) dunia usaha yang pada akhirnya dapat memperburuk kualitas pinjaman bank serta meningkatkan risiko terjadinya kembali krisis keuangan. Dari sisi pengendalian moneter, credit crunch sangat mengganggu mekanisme transmisi kebijakan moneter sehingga akan mengurangi efektivitas dan efisiensi pengendalian moneter.

Saya menyambut baik studi mengenai penomena credit crunch ini, baik yang dilakukan secara empiris/kuantitatif maupun analisis kualitatif. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan penghargaan saya kepada tim peneliti yang telah menyelesaikan riset ini, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada pihak perbankan dan perusahaan yang berpartisipasi dalam survey yang dilakukan. Semoga studi bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, Maret 2001



Achjar Iljas  
Deputi Gubernur

# Kata Pengantar

Studi ini merupakan salah satu Program Kerja Strategis, Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter - Bank Indonesia tahun 2001. Penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena tidak berjalannya fungsi intermediasi perbankan yang terjadi setelah krisis moneter dan perbankan yang terjadi sejak akhir tahun 1997. Dari sisi moneter, pengetahuan yang mendalam mengenai masalah ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memahami transmisi kebijakan moneter yang terjadi setelah krisis dan sebagai masukan dalam upaya peningkatan efektivitas kebijakan moneter. Dari sisi mikro, hasil kajian ini diharapkan dapat memahami perilaku perbankan dan perusahaan dalam pasar kredit, khususnya pasca krisis.

Dalam kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran pelaksanaan penelitian ini, khususnya kepada bank-bank dan perusahaan-perusahaan yang menjadi responden dalam survey perilaku penawaran dan permintaan kredit. Ucapan terima kasih kepada Bapak Hartadi A. Sarwono, Bapak Perry Warjiyo, Bapak Didy Laksmono, Bapak Wibisono dan Ibu Sri Liani yang telah banyak memberikan dorongan dan saran dalam penyelesaian kajian ini. Saran dan komentar dari rekan-rekan terutama dari peserta workshop di DKM, Dr. Peter Rosner serta peserta Seminar Credit Crunch di Jakarta dan peserta Konferensi APFA di Bangkok sangat kami hargai dalam memperbaiki versi akhir studi ini. Kepada Sdr. Rita Morena kami sampaikan terima kasih atas kerja kerasnya dalam merealisasikan manuskrip paper menjadi sebuah buku dalam dua bahasa.

Kami menyadari masih banyaknya keterbatasan dalam kajian ini. Oleh sebab itu segala kritik dan saran guna menyempurnakan kajian ini akan sangat kami hargai. Akhirnya kami berharap hasil kajian ini bermanfaat dan dapat menambah khazanah pengetahuan kita.

Jakarta, Maret 2001

Tim Penyusun

Bagian Studi Struktur dan Perkembangan Pasar Keuangan

# Ringkasan Eksekutif

1. Masih lambatnya pertumbuhan kredit perbankan setelah mengalami penurunan yang sangat tajam pada awal krisis merupakan salah satu faktor yang menyebabkan mengapa proses pemulihan ekonomi Indonesia berjalan lebih lambat dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya yang terkena krisis seperti Korea Selatan dan Thailand. Meskipun kondisi makroekonomi khususnya moneter telah relatif membaik dibandingkan pada saat krisis, sebagaimana tercermin antara lain dari relatif rendahnya tingkat suku bunga, jumlah kredit yang disalurkan perbankan belum cukup menjadi pelumas dalam mendorong pertumbuhan ekonomi untuk kembali pada tingkat sebelum krisis.
2. Studi ini mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan masih lambatnya penyaluran kredit, terutama untuk melihat apakah menurunnya kredit berasal dari faktor penawaran akibat keengganan bank untuk menyalurkan kredit dan bank yang menjadi lebih risk averse (hipotesa credit crunch) atau memang karena rendahnya permintaan kredit akibat perekonomian yang kurang prospektif dan konsolidasi internal perusahaan (balance sheet adjustment). Secara makro, credit crunch jelas akan menghambat proses pemulihan ekonomi mengingat sumber pembiayaan dunia usaha sangat tergantung pada kredit perbankan. Jika credit crunch ini terus berlangsung dapat memberikan second round effect pada kegagalan bisnis dunia usaha, yang pada akhirnya kembali memperburuk kualitas pinjaman perbankan dan risiko terjadinya kembali krisis keuangan. Bagi kepentingan pengendalian moneter, credit crunch memiliki implikasi terhadap efektivitas pengendalian moneter dan bagaimana kebijakan moneter diarahkan agar masalah ini tidak semakin diperparah.

3. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, studi ini mengkaji sebab-sebab turunnya kredit perbankan dengan melakukan analisis empiris baik secara makro dengan menggunakan data agregat maupun secara mikro dengan menggunakan data individual perbankan (panel data). Disamping itu, studi ini juga diperkuat dengan analisis data kualitatif hasil survei yang dilakukan terhadap sejumlah bank untuk mengkaji dari sisi penawaran kredit dan terhadap sejumlah perusahaan untuk mengkaji dari sisi permintaan kredit.
4. Secara umum dari kajian empiris serta survei ke bank dan perusahaan dapat disimpulkan bahwa masih melambatnya kredit yang disalurkan oleh perbankan lebih disebabkan oleh faktor-faktor penawaran seperti yang menjadi hipotesa dari credit crunch. Hal ini terutama akibat persoalan permodalan yang dialami oleh bank setelah terjadinya krisis (*capital crunch*), menurunnya non-performing loans (NPLs), tingginya risiko kredit di dunia usaha sebagaimana yang tercermin dari masih tingginya tingkat leverage, dan kurangnya informasi mengenai debitur yang potensial.
5. Dari hasil survei perbankan diperoleh indikasi bahwa kriteria persetujuan kredit oleh perbankan lebih tergantung pada informasi mengenai calon debitur daripada jenis proyek yang diajukan untuk diberi kredit. Suku bunga tidak dijadikan faktor utama oleh bank dalam melakukan persetujuan kredit. Dalam kondisi yang demikian, meskipun debitur bersedia membayar suku bunga dan agunan yang lebih tinggi, bank tidak bersedia memberikan persetujuan kredit. Hal ini mencerminkan adanya non-price credit rationing dalam dunia perbankan. Oleh sebab itu, kurangnya informasi baik mengenai debitur maupun sektor yang feasible menjadi salah satu faktor yang menjelaskan mengapa penyaluran kredit bank masih relatif lambat.
6. Dari perkembangan portofolio aset perbankan dan dikonfirmasi dengan survei pada perbankan juga ditemukan bahwa dewasa ini terjadi perubahan preferensi bank dalam portofolio penanaman dananya. Bank cenderung untuk memegang aset yang likuid dan relatif kurang berisiko, seperti SBI, obligasi pemerintah dan pasar uang antar bank (hipotesa liquidity preference).

7. Sektor usaha yang menurut perbankan memiliki risiko yang relatif rendah adalah sektor-sektor usaha yang berorientasi ekspor serta sektor usaha kecil dan menengah. Sebelum masa krisis, sektor industri merupakan sektor berpeluang besar bagi perbankan untuk menghasilkan keuntungan dalam penyaluran kredit. Sementara sejak krisis hingga sekarang, sektor yang memiliki peluang memberi keuntungan bagi perbankan adalah sektor-sektor usaha yang berorientasi ekspor. Responden perbankan juga melihat kredit kepada usaha kecil dan menengah memiliki kondisi usaha yang lebih baik dibandingkan dengan usaha besar. Meskipun kualitas kredit usaha kecil relatif baik, namun bank enggan untuk menyalurkan dananya kepada sektor ini dengan alasan administrasi bank terhadap usaha kecil yang sangat rumit dan memerlukan biaya yang tinggi.
8. Dari survei perusahaan secara umum dapat disimpulkan bahwa permintaan kredit mengalami peningkatan. Hal ini tercermin dari sebagian besar perusahaan responden yang mengatakan bahwa tingkat produksi dan penjualan mereka mengalami peningkatan akibat meningkatnya permintaan. Untuk mengantisipasi kenaikan permintaan ini, separuh dari responden akan melakukan ekspansi usaha dengan melakukan investasi baru.
9. Perusahaan yang melakukan investasi baru sebagian besar menggunakan dana sendiri sebagai sumber pembiayaan (56%). Faktor-faktor penyebab meningkatnya penggunaan dana sendiri sebagai sumber pembiayaan utama adalah relatif tingginya suku bunga kredit, belum optimalnya penggunaan modal sendiri, prosedur kredit yang sulit dan bank membatasi penyaluran kredit. Hal ini mencerminkan masih adanya pengaruh faktor penawaran yang menyebabkan turunnya penggunaan kredit perbankan sebagai sumber pembiayaan.
10. Walaupun mengalami penurunan, pembiayaan eksternal perusahaan masih bersumber pada kredit perbankan yaitu sekitar 24% yang terdiri dari 14% kredit modal kerja dan 10% kredit investasi. Sementara itu, pasar modal menjadi sumber pembiayaan berikutnya, yakni sekitar

6%. Sedangkan sumber pembiayaan eksternal lainnya adalah pinjaman luar negeri (5%), obligasi (3%) dan pinjaman dari kelompok usaha sendiri (1%).

11. Hasil survei pada perusahaan juga mengkonfirmasi bahwa faktor-faktor suplai sangat mempengaruhi lambatnya pertumbuhan kredit. Sebagian besar perusahaan responden mengatakan bahwa persyaratan kredit perbankan semakin ketat yang tercermin dari rendahnya fleksibilitas perbankan dalam negosiasi agunan dan suku bunga. Disamping itu, perusahaan responden yang mengalami kesulitan memperoleh kredit mengatakan bahwa faktor-faktor penawaran seperti pembatasan kredit dari bank, agunan yang tidak mencukupi serta cash flow perusahaan yang memburuk menjadi faktor yang menghambat akses kredit tersebut.
12. Baik perbankan maupun perusahaan berpandangan bahwa dalam rangka memperbaiki perkreditan di Indonesia perlu diprioritaskan upaya stabilitas nilai tukar sehingga dapat mendorong iklim usaha yang kondusif. Selain itu pertumbuhan ekonomi yang tinggi, restrukturisasi hutang debitur, dan penyediaan informasi yang lengkap mengenai usaha dan sektor yang potensial untuk dibiayai juga perlu diupayakan oleh pemerintah. Bank juga menyatakan diperlukan suatu stimulus dalam penyaluran kredit seperti adanya skim penjaminan oleh pemerintah dalam hal kredit dan skim pembiayaan baik oleh domestik maupun asing sebagai instrumen kredit.
13. Credit crunch mempunyai implikasi yang sangat penting bagi kebijakan moneter, pertama implikasinya pada efektivitas kebijakan moneter terutama karena terjadinya pemblokiran jalur transmisi dari variabel moneter ke aktivitas perekonomian. Rendahnya keinginan perbankan dalam menyalurkan kredit terutama yang dipicu oleh faktor-faktor seperti adverse selection, risiko dunia usaha, rendahnya modal perbankan menyebabkan suku bunga bukan menjadi tolok ukur yang digunakan oleh perbankan dalam memberikan kredit kepada seorang debitur. Kondisi

ini secara keseluruhan akan memblokir bekerjanya jalur transmisi kebijakan moneter baik yang melalui jalur suku bunga, jalur kredit dan jalur neraca.

14. Kedua, dalam kondisi lemahnya keuangan perusahaan, ekspansi moneter berupa turunnya suku bunga tidak serta merta akan meningkatkan investasi mereka. Perusahaan cenderung menggunakan kesempatan ini untuk melakukan berbagai langkah untuk merestrukturisasi kondisi keuangan mereka misalnya mengurangi tingkat leverage yang tinggi (*deleveraging*). Namun transmisi kebijakan moneter melalui neraca ini dapat bersifat asimetri, dalam arti bahwa transmisi melalui jalur neraca justru akan menguat ketika kebijakan moneter bersifat kontraktif. Kebijakan yang kontraktif yang tercermin dari tingginya suku bunga bukan hanya meningkatkan biaya modal untuk investasi tetapi juga akan semakin memperburuk kualitas aset perusahaan, sehingga semakin memperbesar dampak kebijakan moneter pada sektor riil, suatu fenomena yang sering disebut sebagai *financial accelerator*. Implikasinya adalah dalam situasi dimana *credit crunch* terjadi, kebijakan moneter yang bersifat kontraktif harus dilakukan lebih berhati-hati.
  
15. Melemahnya dan ketidakpastian hubungan antara kebijakan moneter dan sektor riil berimplikasi bahwa penggunaan berbagai indikator moneter baik sebagai sasaran maupun sebagai variabel informasi menjadi sulit. Tidak berfungsinya suplai kredit perbankan mempengaruhi hubungan antara kredit dan perekonomian agregat. Penggunaan suku bunga sebagai target operasional juga perlu dikaji lebih mendalam terutama pada saat *credit crunch* berlangsung mengingat bahwa dalam kondisi *credit crunch* kriteria bank dalam memberikan kredit lebih pada faktor-faktor non harga (*non price rationing*) seperti kecukupan agunan, jalinan hubungan yang telah lama antara bank dan debitur, dsb. Oleh sebab itu perubahan suku bunga memberikan dampak yang kurang signifikan terhadap kredit dan aktivitas perekonomian dibandingkan ketika *credit crunch* tidak terjadi. Dengan melemahnya kandungan informasi berbagai variabel moneter, penggunaan sejumlah indikator moneter (*broad based indicators*) tampaknya lebih tepat dilakukan daripada sekedar mentargetkan satu variabel saja.

16. Karena faktor kestabilan nilai tukar Rupiah merupakan faktor utama dalam keputusan kredit, maka kepastian nilai tukar menjadi sangat penting. Implikasi penting dari hal ini adalah perlunya pembentukan mekanisme baru yang memberikan kepastian kurs terhadap pengusaha-pengusaha yang memang memerlukan dan memiliki underlying transaction.
17. Persoalan utama dari credit crunch yang terjadi pasca krisis berakar pada persoalan informasi tentang debitur. Implikasi penting dari persoalan informasi ini adalah bahwa pemerintah perlu memberikan guidance mana debitur yang feasible mana yang tidak, selain memberikan gambaran sektoral yang prospektif. Selain sistem informasi debitur yang telah ada di BI, BPPN sebagai lembaga yang memegang informasi penting nasabah-nasabah besar dapat melakukan seleksi mana perusahaan yang masih layak diberi kredit mana yang tidak. Di Korea sebagai contoh, identifikasi bad risks (perusahaan yang tidak layak kredit) dan good risks (perusahaan yang layak kredit) dilakukan bersamaan dengan proses restrukturisasi kredit. Solusi dengan memberikan 'credit voucher' kepada nasabah yang prospektif sebagai bentuk 'jaminan' kualitas nasabah kredit yang dapat memberikan petunjuk kepada bank dalam keputusan memberikan kredit perlu dipertimbangkan, yang dapat dianggap sebagai peringkat kredit (credit rating) bagi perusahaan yang feasible.
18. Kemungkinan untuk melakukan relaksasi ketentuan perlu juga dipertimbangkan costs and benefit-nya, terutama untuk relaksasi terhadap ketentuan rasio NPL. Pertama, dalam praktek regulasi perbankan internasional, rasio NPL bukan merupakan bagian dari peraturan prudensial. Kedua, penerapan CAR dan rasio NPL pada saat yang bersamaan dimana kondisi keuangan perbankan baru pulih merupakan suatu yang memberatkan. Jika relaksasi terhadap CAR juga dilakukan, seharusnya tidak dilakukan dengan dasar kasus per kasus tetapi perlu melalui suatu 'objective rules', misalnya untuk mendorong penyaluran kredit kepada eksportir dan usaha kecil/menengah perhitungan bobot risiko untuk pinjaman ke sektor ekspor serta sektor usaha kecil dan menengah mendapatkan bobot relatif kecil. Hal ini juga didukung dari hasil survei ke

perbankan yang menyatakan bahwa sektor ekspor dan usaha kecil-menengah memiliki risiko yang relatif rendah.

19. Kemungkinan memberikan jaminan kepada kredit usaha kecil dan menengah serta sektor usaha yang berorientasi ekspor yang menurut survei adalah sektor-sektor dengan risiko rendah, perlu dipertimbangkan. Skema penjaminan ini memang dapat membawa dampak negatif berupa timbulnya moral hazard dan membawa konsekuensi kepada timbulnya biaya tambahan yang harus dipikul yang tentunya menjadi tidak populer di tengah sulitnya pemerintah menambal sulam defisit keuangannya. Namun, skema ini merupakan alternatif yang dapat digunakan untuk stimulus bagi perekonomian. Skema usulan penjaminan kredit oleh pemerintah ini telah digunakan oleh beberapa negara dalam mengatasi keengganan bank memberikan kredit. Di Korea, misalnya, guna mengurangi dampak krisis keuangan sekaligus untuk memberikan stimulus pada perekonomian, pada tahun 1998 pemerintah mengeluarkan program penjaminan khusus (*special guarantee program*) bagi usaha kecil dan menengah serta ekspor.
  
20. Dalam jangka panjang, pengembangan pasar keuangan terutama securities, seperti corporate bonds perlu diupayakan. Instrumen ini dapat digunakan oleh bank-bank dalam penempatan dana yang bersifat ekspansif sehingga dapat berfungsi sebagai instrumen moneter. Disamping itu, karena instrumen hutang (*debt instrument*) ini bersifat market based (bukan intermediate based seperti kredit bank), pasar ini lebih transparan. Diversifikasi sumber pembiayaan menjadi isu penting mengingat ketergantungan sumber dana pada perbankan, menyebabkan perekonomian lebih rawan terhadap krisis.

# Daftar Isi

KATA SAMBUTAN .....	i
KATA PENGATAR .....	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	iii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR GRAFIK .....	xii
DAFTAR TABEL .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
BAB II TINJAUAN LITERATUR .....	4
Definisi Credit Crunch .....	4
Turunnya Kredit : Permintaan Vs Penawaran Kredit .....	5
Credit Crunch : Tinjauan Di Beberapa Negara .....	12
BAB III FENOMENA MENURUNNYA KREDIT PERBANKAN .....	19
Perkembangan Kredit Perbankan .....	19
Sebab-Sebab Melambatnya Pertumbuhan Kredit Perbankan .....	21
Perubahan Portofolio Perbankan .....	26
BAB IV KAJIAN EMPIRIS : Apakah Ada Credit Crunch? .....	31
Kajian Empiris Secara Makro .....	31

Kajian Empiris Secara Mikro .....	36
<b>BAB V KAJIAN PENAWARAN KREDIT : Hasil Survei Perbankan .....</b>	<b>41</b>
Permasalahan Bank Sejak Masa Krisis .....	42
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Kredit .....	43
Kebijakan Pemberian Kredit Bank Sejak Masa Krisis .....	45
Preferensi Terhadap Likuiditas .....	48
<b>BAB VI PERMINTAAN KREDIT DUNIA USAHA: Hasil Survei Pada Perusahaan</b>	<b>51</b>
Karakteristik Responden Perusahaan .....	51
Sumber Pembiayaan Usaha Responden .....	52
Akses Perusahaan Kepada Kredit Perbankan .....	54
Investasi Usaha dan Pembiayaannya .....	58
Preferensi Perusahaan Terhadap Sumber Pembiayaan Dari Bank .....	59
<b>BAB VII IMPLIKASI PADA KEBIJAKAN MONETER &amp; PERBANKAN .....</b>	<b>63</b>
Implikasi Pada Kebijakan Moneter .....	63
Implikasi Pada Kebijakan Perbankan .....	69
<b>DAFTAR RUJUKAN .....</b>	<b>74</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>75</b>

# Daftar Grafik

Grafik 1.1. Credit Crunch dan Krisis Keuangan .....	2
Grafik 2.1. Penurunan Kredit Akibat Menurunnya Permintaan .....	6
Grafik 2.2. Penurunan Kredit Akibat Menurunnya Penawaran .....	8
Grafik 2.3. Pertumbuhan Kredit di Beberapa Negara Asia .....	13
Grafik 3.1. Lending Capacity dan Total Kredit Bank Umum .....	19
Grafik 3.2. Perkembangan Lending Capacity, NPLs dan Volume Kredit Perbankan .....	20
Grafik 3.3. Perkembangan LDR Perbankan .....	21
Grafik 3.4. Debt to Equity Ratio Dari Perusahaan Yang Listed di JSX .....	22
Grafik 3.5. CAR (Bar chart) dan Kredit Yang Diberikan (Line chart) .....	24
Grafik 3.6. NPLs (Bar chart) dan Kredit Yang Diberikan (Line chart) .....	24
Grafik 3.7. Perkembangan Suku Bunga SBI, Deposito, KMK, dan KI .....	25
Grafik 3.8. Portofolio Aktiva dan Pasiva Bank Umum .....	26
Grafik 4.1. Hasil Estimasi Penawaran dan Permintaan Kredit .....	35
Grafik 5.1. Permasalahan Bank .....	42
Grafik 5.2. Faktor Persetujuan Kredit .....	43
Grafik 5.3. Faktor Penolakan Kredit .....	44
Grafik.5.4 Apakah Menurut Anda Calon Nasabah yang Ditolak Kreditnya akan Diterima Bank Lain? .....	45
Grafik 5.5. Kebijakan Bank Dalam Masa Krisis .....	45
Grafik 5.6. Sektor Yang Menguntungkan Bagi Perbankan .....	46
Grafik 5.7. Penilaian Risiko Kredit Kepada Eksportir .....	47
Grafik 5.8. Faktor-Faktor Risiko .....	47
Grafik 5.9. Kondisi dan Kualitas Kredit .....	48

Grafik 5.10. Keluhan Debitur .....	48
Grafik 5.11. Preferensi Bank Dalam Penempatan Dana .....	49
Grafik 5.12. Risiko Aktivitas Penempatan Dana .....	49
Grafik 5.13. Permohonan Kredit yang Disetujui .....	50
Grafik 6.1. Sektor dan Skala Usaha Responden .....	51
Grafik 6.2. Porsi Responden Yang Tercatat Di Bursa Dan Orientasi Usaha .....	52
Grafik 6.3. Sumber Pembiayaan Responden .....	52
Grafik 6.4. Alasan Penggunaan Dana Sendiri .....	53
Grafik 6.5. Porsi Dana Sendiri dari Total Pembiayaan .....	53
Grafik 6.6. Penyebab Kesulitan Memperoleh Kredit .....	54
Grafik 6.7. Tujuan Pengajuan Kredit .....	57
Grafik 6.8. Kredit Yang Disetujui .....	58
Grafik 6.9. Penyebab Kenaikan Produksi dan Penjualan .....	58
Grafik 6.10. Alternatif Sumber Pembiayaan non-Kredit .....	59
Grafik 6.11. Preferensi Responden Terhadap Bank .....	59
Grafik 6.12. Faktor Penyebab Menurunnya Preferensi Bank .....	60
Grafik 6.13. Kategori Bank yang Dipilih Dalam Pengajuan Kredit .....	61

# Daftar Tabel

Tabel 4.1. Hasil Estimasi Maximum Likelihood Persamaan Penawaran dan Permintaan Kredit .....	34
Tabel 4.2. Hasil Regresi Panel Seluruh Bank .....	37
Tabel 4.3. Hasil Regresi Panel, Jan 94 - Des 99, Bank Dalam Rekap vs non-Rekap .....	39
Tabel 6.1. Akses Kredit Menurut Skala Usaha .....	55
Tabel 6.2. Akses Kredit Menurut Sektoral .....	55
Tabel 6.3. Hubungan Responden dan Persyaratan Kredit.....	56
Tabel 6.4. Fleksibilitas Bank Dalam Penentuan Agunan .....	56
Tabel 6.5. Fleksibilitas Bank Dalam Penentuan Bunga Pinjaman .....	57
Tabel 6.6. Preferensi Menurut Sektor dan Skala Usaha .....	60
Tabel 6.7. Rencana Pengajuan Kredit 2 Tahun ke Depan .....	61

---

# Bab 1

## Pendahuluan

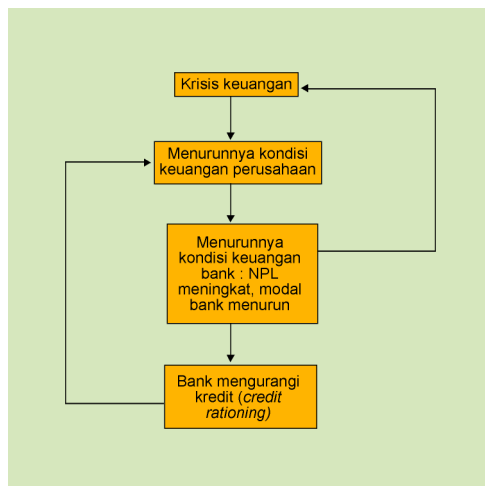
Masih lambatnya pertumbuhan kredit perbankan setelah mengalami penurunan yang sangat tajam pada awal krisis merupakan salah satu faktor yang menyebabkan mengapa proses pemulihan ekonomi Indonesia berjalan lebih lambat dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya yang terkena krisis seperti Korea Selatan dan Thailand. Meskipun kondisi makroekonomi khususnya moneter telah relatif membaik dibandingkan pada saat krisis, sebagaimana tercermin antara lain dari relatif rendahnya tingkat suku bunga, jumlah kredit yang disalurkan perbankan belum cukup menjadi pelumas dalam mendorong pertumbuhan ekonomi untuk kembali pada tingkat sebelum krisis.

Menurunnya kredit perbankan ini dapat terjadi akibat faktor-faktor penawaran ataupun permintaan kredit. Dari sisi penawaran, fenomena ini bermula dari permasalahan likuiditas perbankan yang antara lain disebabkan oleh terjadinya bank run dan meningkatnya kewajiban luar negeri. Pada saat yang sama ketika suku bunga dan nilai tukar melonjak tajam, perusahaan-perusahaan di Indonesia yang sebelum krisis pun telah memiliki tingkat leverage yang sangat tinggi menambah persoalan bagi perbankan berupa meningkatnya non-performing loans (NPLs). Sementara itu, tingginya suku bunga juga telah menyebabkan terjadinya negative interest margin pada perbankan. Hal ini pada gilirannya telah menurunkan modal perbankan secara drastis. Financial distress yang dialami baik oleh perbankan dan perusahaan ini menyebabkan hubungan antara bank dan perusahaan menjadi terputus yang menyebabkan kebutuhan pendanaan dunia usaha semakin terbatas.

Walaupun permasalahan di sisi perbankan berangsur-angsur telah mengalami perbaikan, seperti sudah mulai positifnya net interest margin dan permodalan bank secara agregat, namun penyaluran kredit perbankan sampai dengan akhir tahun 2000 masih berjalan lambat. Perilaku perbankan yang menjadi lebih risk averse dan persepsi perbankan terhadap tingginya risiko kredit

(credit risk) di sektor dunia usaha merupakan penyebab enggannya bank-bank dalam menyalurkan kredit. Disamping itu, upaya penyesuaian internal perbankan terhadap ketentuan prinsip kehati-hatian prudensial, seperti pencapaian rasio kecukupan modal sebesar 8% dan NPLs sebesar 5% pada akhir tahun 2001 serta ketentuan batas maksimum pemberian kredit ditengarai juga menjadi penyebab enggannya bank-bank menyalurkan kredit. Penurunan kredit akibat enggannya perbankan dalam menyalurkan kredit sering disebut sebagai *credit crunch*.

Di sisi lain, dalam kondisi resesi ekonomi, penurunan kredit perbankan dapat terjadi juga karena melemahnya permintaan akibat rendahnya prospek investasi (*investment opportunities*) dan belum pulihnya kondisi keuangan perusahaan non-keuangan, yang tercermin antara lain dari masih tingginya rasio hutang terhadap modal yang dimiliki. Secara makro, *credit crunch* jelas akan menghambat proses pemulihan ekonomi mengingat sumber pembiayaan dunia usaha sangat tergantung pada kredit perbankan. Jika *credit crunch* ini terus berlangsung dapat memberikan *second round effect* pada kegagalan bisnis dunia usaha, yang pada akhirnya kembali memperburuk kualitas pinjaman perbankan dan risiko terjadinya kembali krisis perbankan (Grafik 1.1).



Grafik 1.1.  
Credit Crunch dan Krisis Keuangan

Bagi kepentingan pengendalian moneter, *credit crunch* telah menutup jalur transmisi kebijakan moneter ke sektor riil, baik melalui jalur suku bunga, jalur kredit dan jalur neraca. Dengan menurunnya keinginan perbankan untuk memberikan kredit, kebijakan moneter yang relatif melonggar tidak dapat ditransmisikan ke sektor riil melalui pemberian pinjaman. Selain itu, *credit crunch* mengurangi ruang gerak bagi kebijakan moneter, terutama karena dalam kondisi yang demikian kebijakan moneter yang menaikkan suku bunga semakin memperparah kondisi dunia usaha yang semakin memperburuk *credit crunch* yang terjadi, yaitu terjadinya apa yang disebut *financial accelerator*.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, studi ini mengkaji sebab-sebab turunnya kredit perbankan dengan melakukan analisis empiris baik secara agregat maupun individual perbankan (panel data). Disamping itu, studi ini juga diperkuat dengan analisis data kualitatif hasil survei yang dilakukan terhadap sejumlah bank dan perusahaan. Secara spesifik, studi ini mencoba menjawab apakah penurunan kredit yang terjadi lebih banyak disebabkan oleh faktor-faktor penawaran sebagaimana dihipotesakan oleh credit crunch atau oleh faktor-faktor permintaan. Memahami penyebab-penyebab penurunan kredit perbankan memiliki berbagai implikasi yang berbeda bagi kebijakan moneter dan perbankan.

Studi ini dibagi dalam beberapa bab sebagai berikut. Bab 2 merupakan studi literatur yang melihat secara teoritis mengenai fenomena credit crunch yang dilanjutkan dengan fenomena yang sama di negara-negara lain. Bab 3 menjelaskan fenomena credit crunch di Indonesia dan mendiskusikan sebab-sebab terjadinya fenomena tersebut dan dampaknya terhadap perubahan portofolio perbankan. Bab 4 memaparkan hasil kajian empiris terjadinya credit crunch. Bab 5 mendiskusikan hasil survei di sektor perbankan untuk melihat apakah hipotesa penurunan kredit yang terjadi dari sisi penawaran memang terjadi. Bab 6 mendiskusikan hasil survei di sektor perusahaan untuk mengkonfirmasi hipotesa financial constraint yang dihadapi oleh perusahaan dalam mendapatkan dana dari luar dalam pembiayaan investasi dan modal kerja. Bab 7 mendiskusikan implikasi kebijakan dari adanya credit crunch terhadap kebijakan moneter dan perbankan, serta pilihan kebijakan yang mungkin dapat ditempuh dalam rangka mengatasi persoalan credit crunch ini.

---

## Bab 2

# Tinjauan Literatur

### DEFINISI CREDIT CRUNCH

Istilah credit crunch muncul pada tahun 1966 sebagai suatu bentuk fenomena dis-intermediasi yang terjadi di Amerika ketika kebijakan moneter yang dilakukan oleh Federal Reserve menjadi sangat ketat untuk mengatasi inflasi. Kebijakan yang sangat ketat itu telah meningkatkan suku bunga jangka pendek meningkat jauh di atas batas atas suku bunga deposito yang diatur oleh Regulation Q. Akibatnya deposan menarik dananya dari perbankan untuk mendapatkan suku bunga yang lebih tinggi pada aset finansial lainnya sehingga deposito perbankan mengalami penurunan yang besar yang berakibat terhambatnya suplai kredit. Sejak deregulasi sektor keuangan di tahun 1980an yang menghapuskan batas suku bunga deposito (Regulation Q), fenomena dis-intermediasi perbankan akibat peraturan seperti ini tidak terjadi lagi (Kliesen dan Tatom, 1992).

Definisi yang lebih luas adalah bahwa pembatasan suplai kredit yang bersifat non-harga (non-price credit constraint) sebagai akibat peraturan perbankan yang terlalu mengikat seperti peraturan masalah modal dan legal lending limit; atau akibat penurunan kualitas aset dan profitabilitas perbankan. Dalam istilah yang lebih teknis, Bernanke dan Lown (1991) mendefinisikan credit crunch sebagai pergeseran kurva suplai kredit perbankan dengan kondisi suku bunga dan kualitas nasabah potensial tidak berubah. Definisi ini sejalan yang dikemukakan oleh Pasarbasioglu (1996), yang mendefinisikan credit crunch sebagai penurunan suplai kredit akibat menurunnya kemauan bank-bank untuk memberikan pinjaman, tanpa diikuti oleh kenaikan suku bunga pinjaman. Definisi yang paling strong diberikan oleh Gosh dan Gosh (1999) yang mengartikan credit crunch sebagai quantity rationing, dimana suku bunga pinjaman tidak lagi berfungsi dalam menyeimbangkan permintaan dan penawaran kredit. Konsep ini terkait dengan konsep credit rationing yang dikemukakan oleh Stiglitz

dan Weiss (1981) dan Jafee dan Stiglitz (1990) yang mendefinisikan *credit rationing* sebagai suatu kondisi dimana nasabah tertentu tidak mendapatkan kredit walaupun mereka mau membayar suku bunga pinjaman yang lebih tinggi.

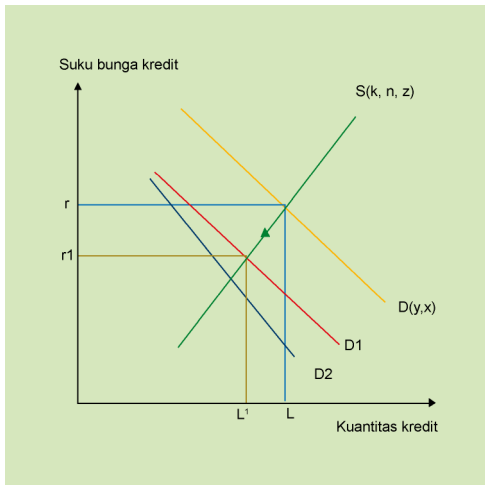
Dari berbagai definisi di atas, secara umum *credit crunch* dapat diartikan sebagai suatu situasi dimana terjadi penurunan suplai kredit perbankan secara tajam sebagai akibat dari menurunnya kemauan bank dalam menyalurkan kredit pada dunia usaha. Keengganan bank dalam menyalurkan kredit tersebut tercermin dari meningkatnya *spread* yaitu selisih antara suku bunga pinjaman dan suku bunga dana dan semakin ketatnya kriteria untuk memperoleh kredit. Dalam kondisi yang ekstrim, *credit crunch* terjadi dalam bentuk *credit rationing*, yaitu bank menolak memberikan kredit terhadap nasabah tertentu atau sebagian besar nasabah pada tingkat suku bunga berapapun.

## TURUNNYA KREDIT : PERMINTAAN VS PENAWARAN KREDIT

Penurunan kredit dapat terjadi karena penurunan permintaan atau penawaran terhadap kredit perbankan. Untuk membedakan fenomena penurunan kredit perbankan yang diakibatkan permintaan vs penawaran sub-bagian berikut ini menjelaskannya dalam kerangka pasar kredit.

### Permintaan

Penurunan kredit yang disebabkan oleh faktor-faktor permintaan adalah sesuatu yang sangat wajar terjadi pada saat resesi seperti yang sedang berlangsung, terutama karena masih lemahnya aktifitas investasi. Di sisi mikro, masalah struktural seperti penyesuaian yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi *debt-equity ratio* yang meningkat akibat krisis juga mungkin dapat menjadi sebagai salah satu faktor yang dapat menjelaskan mengapa permintaan kredit juga mengalami penurunan. Walaupun turunnya permintaan terhadap kredit lebih sering terjadi akibat faktor melemahnya investasi pada saat resesi, faktor struktural mikroekonomi seperti di atas tidak jarang terjadi dalam suatu perekonomian pasca krisis.



Grafik 2.1.

Penurunan Kredit Akibat Menurunnya Permintaan

Seperti yang digambarkan dalam Grafik 2.1., pergeseran permintaan kredit akibat melemahnya aktivitas perekonomian, jika tidak terjadi perubahan di sisi suplai, mendorong penurunan 'harga' dari kredit yaitu menurunnya suku bunga maupun menurunnya persyaratan kredit seperti jumlah agunan dan jangka waktu. Jika penurunan kredit didorong oleh faktor-faktor struktural mikroekonomi, pergeseran kurva permintaan kredit juga diikuti oleh menajamnya kurva permintaan; yaitu permintaan kredit menjadi kurang sensitif terhadap perubahan harga kredit (Grafik 2.1, kurva D2).

### Penawaran

Di sisi penawaran, penurunan kredit disebabkan oleh turunnya kemauan bank untuk memberikan pinjaman pada tingkat suku bunga yang berlaku. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan menurunnya keinginan untuk memberikan kredit dapat bersumber dari faktor internal bank maupun faktor eksternal. Faktor internal seperti rendahnya kualitas aset perbankan, tingginya non-performing loans dan anjloknya modal perbankan akibat depresiasi dan negative interest margin menurunkan kemampuan bank untuk memberikan pinjaman.

Secara institusional, penutupan hampir separuh jumlah bank di Indonesia sangat berpengaruh pada perilaku perbankan. Pertama, ambruknya sejumlah bank dapat mengurangi nilai likuidasi dari semua institusi perbankan sehingga meningkatkan biaya kebangkrutan (bankruptcy costs) yang harus ditanggung oleh pemilik bank jika bank dilikuidasi (Shleifer and Vishny, 1992). Hal ini menyebabkan bank-bank yang tetap bertahan akan lebih bersikap konservatif (risk averse) dalam menjalankan usahanya. Kedua, ditutupnya sejumlah bank oleh pemerintah, yang pada tingkat tertentu berarti pemerintah

telah siap untuk menutup bank yang kinerjanya buruk, telah mengurangi insentif bagi perbankan untuk bertindak moral hazard melalui signal bahwa pemerintah telah mengubah strategi dalam menangani bank-bank bermasalah. Hal ini menyebabkan bank-bank untuk secara cepat mengembalikan tingkat kesehatannya untuk tidak terkena likuidasi. Karena tingkat kesehatan, salah satunya diukur dengan pencapaian Capital Adequacy Ratio (CAR), maka bank mulai melakukan penyesuaian portofolio asetnya termasuk mengurangi kreditnya, untuk mempertahankan atau meningkatkan CAR-nya.

Dari sudut eksternal, terutama menurunnya tingkat kelayakan kredit (*creditworthiness*) dari debitur akibat melemahnya kondisi keuangan perusahaan. Dalam situasi tertentu ketika bank sulit membedakan *creditworthiness* dari debitur, bank akan mengurangi volume kredit. *Non-price credit rationing* seperti ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk: beberapa debitur tetap mendapatkan kredit sedangkan debitur lainnya dengan tingkat kelayakan kredit yang sama mungkin terkena *credit rationing*; *rationing* terhadap kredit untuk sektor tertentu (misal kredit konsumsi) atau kelompok debitur tertentu (usaha kecil); atau sejumlah debitur yang kelihatannya layak memperoleh kredit juga ditolak karena bank tidak memiliki informasi yang lengkap tentang data keuangan calon debitur.

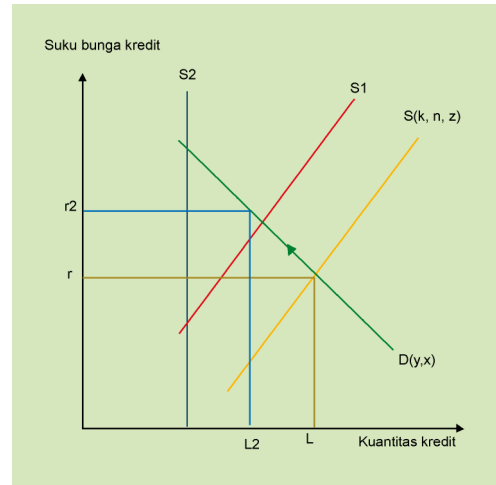
Apapun penyebabnya, menurunnya kredit akibat faktor-faktor suplai dapat digambarkan dengan bergesernya kurva suplai (Grafik 2.2.). Penurunan kredit akibat menurunnya penawaran mendorong kenaikan suku bunga pinjaman dan mengetatnya persyaratan kredit. Namun demikian, keengganan bank untuk menyalurkan kredit seringkali tidak diikuti dengan kenaikan suku bunga, melainkan dalam bentuk pengurangan kredit secara kuantitas (*non-price credit rationing*). Hal ini dapat dipahami sebagai akibat memburuknya risiko kredit dunia usaha dan karena persoalan informasi yang membuat bank tidak dapat membedakan kualitas debitur. Dalam penetapan kualitas debitur ini, bank perlu mengetahui mana debitur baik yang memiliki posisi keuangan baik dengan risiko yang rendah, dan mana debitur jelek yang memiliki posisi keuangan buruk dengan potensi risiko yang tinggi. Persoalan ini diperburuk ketika bank-bank mengalami pergantian manajemen dengan orang-orang yang baru. Karena hubungan antara bank dan nasabah kredit bersifat jangka panjang<sup>1</sup>,

---

<sup>1</sup> Hubungan jangka panjang ini mengurangi persoalan moral hazard (karena jika nasabah wanprestasi mereka sulit mendapatkan kredit di masa mendatang) dan persoalan informasi karena bank dapat mempelajari perilaku nasabahnya dari waktu ke waktu. Dalam pasar modal, hubungan antara pemegang saham (*shareholders*) dan manajemen perusahaan bersifat jangka pendek.

pergantian manajemen bank menyebabkan mereka kurang memahami kondisi debitur kredatnya. Akibatnya, bank cenderung lebih berhati-hati dalam menyalurkan kredit dan tingkat suku bunga bukanlah pertimbangan utama dalam memberikan kredit, karena bank berpersepsi bahwa hanya nasabah yang kualitas rendah yang bersedia membayar tingkat suku bunga pinjaman yang tinggi (adverse selection problem).

Non price credit rationing ini menggeser kurva suplai ke kiri dan menjadi vertikal; yang berarti bahwa kurva suplai kredit sama sekali menjadi tidak sensitif terhadap perubahan suku bunga (Grafik 2.2, kurva S2). Dalam praktek, terjadinya non-price credit rationing seringkali terjadi bersamaan dengan price rationing. Beberapa nasabah bank, seperti pengusaha kecil atau peminjam baru, terkena quantity rationing, sedangkan yang lain dikenai price rationing atau keduanya.



Grafik 2.2.  
Penurunan Kredit Akibat Menurunnya Penawaran

---

## Boks 1

# Credit Crunch dan Informasi Yang Asimetri Di Pasar Kredit

Hipotesa credit crunch pada dasarnya beranjak dari asumsi new-Keynesian dalam menganalisa bekerjanya pasar kredit. Berbeda dengan asumsi neoklasik yang mengasumsikan pasar sempurna, pendekatan new-Keynesian mengemukakan bahwa pada dasarnya pasar keuangan, seperti pasar kredit, seringkali tidak berfungsi secara sempurna (*imperfect market*), terutama dengan adanya informasi yang asimetri (*informational asymmetry*) antar para pelaku pasar. Kondisi informasi yang asimetri ini mendorong pihak yang mempunyai informasi yang lebih (mis. debitur) memiliki insentif untuk melakukan tindakan yang dapat merugikan pihak lain (mis. bank). Debitur, sebagai contoh, seringkali melakukan tindakan moral hazard dengan menggunakan kredit yang dipinjam untuk proyek lain yang berisiko tinggi. Insentif untuk melakukan moral hazard ini muncul karena ketika proyek tersebut berhasil debitur akan memperoleh keuntungan yang tinggi, sedang jika proyek tersebut gagal, kerugian akan ditanggung oleh bank, terutama jika biaya kebangkrutan (*bankruptcy costs*) relatif rendah.

Selain persoalan moral hazard, informasi yang asimetri antar para pelaku di pasar kredit juga dapat menimbulkan persoalan *adverse selection*, yaitu turunnya kualitas rata-rata debitur yang mengajukan aplikasi kredit, khususnya ketika suku bunga kredit tinggi. Logikanya adalah pada saat bunga pinjaman meningkat, hanya debitur yang kualitasnya rendah (yaitu debitur yang risikonya tinggi) yang bersedia membayar bunga tinggi, sedangkan debitur yang kualitasnya tinggi (yaitu debitur dengan risiko rendah) enggan untuk mengajukan kredit. Dengan demikian, secara rata-rata kualitas debitur menjadi turun.

Persoalan informasi yang asimetri di pasar keuangan, seperti moral hazard dan *adverse selection*, menyebabkan mengapa bank mengenakan premium terhadap debitur di atas suku bunga yang seharusnya terjadi pada pasar yang sempurna. Premi ini berbanding terbalik dengan dana

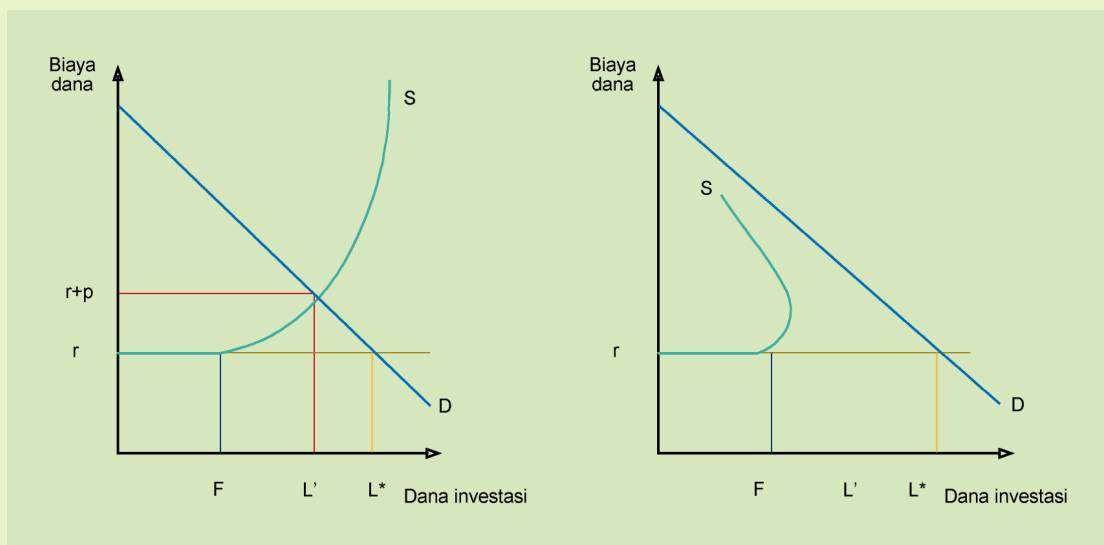
sendiri (networth) yang dimiliki oleh debitur. Semakin kecil dana sendiri semakin besar peluang debitur melakukan moral hazard dan adverse selection, sehingga semakin tinggi premi yang dikenakan oleh bank. Akibatnya, dalam pasar yang diwarnai oleh informasi yang asimetri, tingkat suplai kredit perbankan lebih kecil dari yang seharusnya, sebagaimana diilustrasikan pada Grafik 1.

Grafik B.1. mengilustrasikan hubungan antara permintaan dan penawaran dana untuk investasi. Dalam pasar kredit yang sempurna, debitur dapat memperoleh modal sebarang yang mereka perlukan pada tingkat suku bunga riil  $r$ , sehingga kurva penawaran merupakan garis horizontal  $r$ . Kurva permintaan kredit ( $D$ ) ditentukan oleh peluang investasi, yaitu ekspektasi keuntungan mendatang. Pada kondisi ini, keseimbangan kredit berada pada perpotongan antara kurva permintaan dan penawaran dana, yaitu  $L^*$ . Kebijakan moneter yang kontraktif yang menyebabkan suku bunga riil meningkat, kurva penawaran bergeser ke atas sehingga menurunkan tingkat investasi modal.

Dalam kondisi pasar keuangan yang tidak sempurna, kurva penawaran tidak lagi mendatar. Sampai pada tingkat tertentu dimana kebutuhan investasi dapat dipenuhi dari modal sendiri,  $F$ , kurva  $S$  mendatar, tetapi ketika tingkat investasi sudah melebihi modal sendiri, kurva  $S$  menjadi miring kekanan (upward sloping). Ini menggambarkan bahwa semakin besar modal eksternal yang diperlukan, semakin besar peluang terjadi moral hazard sehingga premi ( $r$ ) yang dikenakan semakin besar. Dalam kondisi tersebut, keseimbangan investasi menjadi  $L'$  yang lebih rendah dari kondisi pasar yang sempurna,  $L^*$ . Dari Grafik itu juga tercermin bahwa semakin besar modal sendiri, semakin besar keseimbangan investasi. Disamping itu, dapat juga diamati bahwa kurva  $S$  bagi perusahaan yang menghadapi premium yang lebih tinggi, (perusahaan kecil, perusahaan dengan leverage yang lebih tinggi) lebih curam dibanding perusahaan dengan premium yang lebih rendah sehingga dampak perubahan cash flow dari perusahaan ini lebih besar. Kenaikan suku bunga karena kebijakan moneter bukan saja menaikkan kurva  $S$  tetapi menurunkan  $F$ , sehingga dampaknya pada investasi lebih besar dari sekedar dampak kenaikan biaya modal.

Jika persoalan adverse selection yang terjadi begitu parah, yakni bank tidak lagi dapat membedakan lagi kualitas debitur, kurva suplai menjadi condong kebelakang (backward bending)

sebelum kurva suplai memotong kurva permintaan dana, debitur terkena credit rationing, dimana tidak terjadi keseimbangan permintaan dan penawaran pada tingkat suku bunga yang berlaku (Grafik B.2). Inti dari kerangka di atas adalah bahwa modal sendiri dari perusahaan sangat menentukan dalam kemampuannya mengakses dana dari luar, sehingga adalah mudah memprediksi dampak penurunan modal perusahaan akibat krisis terhadap kemampuan akses kredit dari debitur. Ketika modal perusahaan menjadi negatif, investasi tidak lagi menjadi layak. Dalam hal ini, kurva suplai bergeser ke kiri dan tidak lagi memotong kurva permintaan pada nilai investasi yang positif. Fenomena semacam inilah yang terjadi ketika krisis: penurunan modal perusahaan dalam skala yang besar telah menurunkan minat perbankan untuk memberikan suplai kredit.



Grafik B.1.

Pasar Kredit dalam

Kondisi Informasi yang Asimetri

Grafik B.2.

Credit rationing

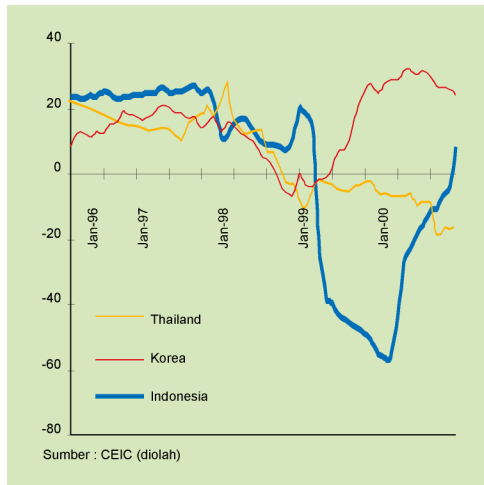
## CREDIT CRUNCH : TINJAUAN DI BEBERAPA NEGARA

Credit crunch juga merupakan fenomena yang pernah dialami oleh beberapa negara, baik di negara-negara berkembang terutama setelah negara tersebut mengalami krisis keuangan maupun di negara industri dimana sistem keuangannya sudah maju seperti Amerika Serikat dan Inggris. Sub bab ini melakukan studi literatur terhadap beberapa negara yang pernah mengalami credit crunch, yaitu negara-negara Asia pasca krisis, Amerika Latin dan negara-negara industri. Secara umum dapat dikatakan credit crunch selalu diawali dengan pertumbuhan kredit yang pesat yang kemudian menimbulkan masalah 'bubble' dalam perekonomian yang diikuti oleh krisis keuangan dan perbankan dan credit crunch. Pada tingkat yang berbeda credit crunch secara umum direspon oleh kebijakan dan campur tangan pemerintah oleh negara-negara tersebut.

### Negara-Negara Asia Pasca Krisis

Credit crunch di berbagai negara, khususnya di berbagai negara Asia sejak krisis menjadi bahan kajian menarik bagi para pengambil kebijakan terutama dalam rangka mengatasi terbatasnya kredit yang diperlukan dalam proses pemulihan perekonomian. Walaupun secara konklusif berbagai kajian yang telah dilakukan mengambil kesimpulan bahwa terjadi penurunan pertumbuhan kredit di negara-negara Asia sejak terjadinya krisis, namun sebab-sebab terjadinya penurunan tersebut masih menjadi pertanyaan, apakah disebabkan oleh melemahnya permintaan akibat resesi pasca krisis ataukah karena penawaran kredit oleh perbankan yang menurun.

Studi mengenai credit crunch di berbagai negara Asia yang dilakukan oleh Domac dan Ferri (1999) menyimpulkan bahwa secara umum menunjukkan adanya credit crunch di negara-negara Asia sejak krisis. Hal ini ditandai dengan adanya price maupun non-price credit rationing yang tercermin dari meningkatnya premi risiko dan suku bunga riil yang dibebankan kepada nasabah kredit. Disamping itu terdapat indikasi adanya meningkatnya jumlah nasabah yang permohonan kreditnya ditolak.



Grafik 2.3.

### Pertumbuhan Kredit di Beberapa Negara Asia

kebangkrutan dan permintaan agregat mulai melemah, permintaan kredit juga mengalami penurunan. Sejak kuartal I 1998, menurut studi tersebut, penurunan permintaan kredit telah melampaui penurunan penawaran kredit, yang berarti bahwa tidak terjadi lagi apa yang disebut dengan credit crunch.

Adanya credit crunch di negara-negara Asia telah menimbulkan beberapa akibat sebagai berikut:

- (i) Terjadinya flight to quality dari aset perbankan dari kredit menjadi surat-surat berharga pemerintah yang risk-free.
- (ii) Kontraksi kredit kepada Small and Medium Enterprises (SMEs) lebih besar daripada non-SMEs (flight to quality dari nasabah kredit).

Untuk mengatasi masalah kontraksi kredit SMEs beberapa langkah telah dilakukan oleh Korea untuk memulihkan masalah likuiditas/pendanaan di sektor SMEs, antara lain:

- (i) Melakukan relaksasi ketentuan prudensial. Pada bulan Oktober 1988 Banking Supervisory Agency (BSA) melakukan program untuk mendukung SMEs, yaitu dengan cara:
  - Merelaksasi kriteria seleksi (screening) terhadap pinjaman pada SMEs. SMEs tidak perlu

membayar penalti jika pinjamannya sudah jatuh tempo dan hanya membayar suku bunga yang normal.

- Memberikan bobot tertinggi pada 'jumlah pinjaman yang diberikan pada SMEs' dalam mengevaluasi kinerja manajemen bank.
- (ii) Penalti fasilitas rediscount. Pada bulan Oktober 1998, Bank of Korea memberikan insentif pada bank-bank untuk memberikan pinjaman pada SMEs melalui pengenaan penalti dalam mengalokasikan fasilitas rediscount pada bank-bank yang tidak dapat memenuhi rasio kewajiban pemberian kredit kepada SMEs.
- (iii) Memberikan skema jaminan kredit. Kredit yang dijamin diberikan bobot risiko yang lebih kecil dibandingkan kredit yang di-back-up dengan agunan dalam perhitungan ATMR.

Sedikit berbeda dengan negara Asia lainnya yang mengalami krisis hampir berbarengan, penurunan kondisi perekonomian Jepang lebih disebabkan oleh faktor struktural yaitu kesulitan keuangan dari sistem perbankan, terutama permasalahan permodalan. Dalam studinya, Woo (1999) mengemukakan bahwa krisis dimulai dari tahun 1997, sebagai dampak dari permasalahan di sistem perbankan yaitu penurunan kualitas kredit dan kerugian dari penanaman di saham. Hal tersebut selanjutnya mempengaruhi permodalan perbankan, sehingga diperlukan adanya tambahan modal. Dengan ketatnya peraturan, perbankan mempertahankan permodalannya dengan cara menurunkan jumlah kreditnya. Perubahan ini selanjutnya berdampak pada banyaknya debitur yang tidak mampu membayar pinjamannya, meningkatkan kredit non lancar dan tekanan pada permodalan perbankan.

Namun persoalan credit crunch bukanlah masalah baru di Jepang. Di tahun 1991, kredit juga mengalami penurunan yang cukup signifikan akibat kebijakan moneter yang ketat. Kebijakan ini sebagian merupakan respon terhadap meningkatnya harga aset yang didorong oleh pertumbuhan kredit yang pesat pada tahun-tahun sebelumnya akibat deregulasi sektor keuangan. Meletusnya gelembung harga aset, khususnya harga properti, menyebabkan nilai agunan turun drastis sehingga menurunkan kemampuan akses terhadap kredit. Menurunnya kredit akibat turunnya harga aset ini diperburuk oleh aturan kecukupan modal dari Bank for International Settlement (BIS). Di Jepang,

saham perusahaan merupakan bagian penting dari modal bank, sehingga menurunnya harga saham membuat rasio modal tersebut sulit dicapai.

Dalam rangka menghadapi masalah yang ada, pemerintah menyediakan dana sebesar ¥60 triliun untuk paket restrukturisasi perbankan pada bulan Oktober 1999. Selain itu pemerintah juga menyediakan jaminan deposito bagi deposan sampai dengan Maret 2001 dan adanya jaminan terhadap semua sisi hutang dari Bank Pos yang memiliki jaringan dengan deposan yang cukup besar. Sementara itu Bank of Japan berusaha mengendurkan likuiditas dengan cara melakukan pembelian commercial paper dengan cara repo dari jangka waktu 3 bulan menjadi 1 tahun, sehingga diharapkan dapat membantu penyediaan dana untuk sektor non keuangan.

### Negara-Negara Amerika Latin Pasca Mexican Crisis

Negara-negara Amerika Latin, terutama Mexico (1995) dan Argentina (1996), mengalami persoalan credit crunch sebagai akibat krisis Mexico di tahun 1995. Krisis Mexico yang menyebabkan penurunan Gross Domestic Product (GDP) pada tiga kuartal terakhir tahun 1995 (yaitu -9.2%, -8% dan -7%) segera mengalami pemulihan dengan pertumbuhan yang positif sejak pada kuartal kedua 1996 dan tumbuh rata-rata di atas 5% sampai dengan kuartal pertama 1998. Namun demikian, pemulihan ekonomi setelah krisis di Mexico bersifat asimetri: sektor tradable cenderung tumbuh dan pulih sementara sektor non-tradable mengalami stagnasi akibat adanya credit crunch. Sementara sektor tradable mampu mendapatkan pendanaan dari pasar internasional, sektor non-tradable yang umumnya usaha kecil dan menengah harus menggantungkan pada pembiayaan sendiri akibat perbankan enggan memberikan kredit.

Beberapa faktor penyebab adanya credit crunch di Mexico (Krueger dan Tornell, 1999):

- (i) Bank dibebani kredit-kredit yang bersifat evergreen sehingga mengurangi kapasitas perbankan dalam memberikan dana segar untuk proyek-proyek baru.
- (ii) Rendahnya modal perbankan akibat meningkatnya non-performing loans.

Krisis Mexico juga telah menyebabkan krisis keuangan di Argentina pada akhir 1995.

Akibat kenaikan suku bunga yang sangat tinggi hutang sektor swasta meningkat tajam sehingga meningkatkan persepsi tingginya risiko di dunia perbankan. Hal ini menyebabkan perbankan enggan untuk menyalurkan kredit. Credit crunch ini ditandai dengan adanya flight to quality dari portfolio kredit menjadi surat-surat berharga pemerintah. Disamping itu meningkatnya kebutuhan pinjaman sektor publik mengakibatkan meningkatnya return yang dihasilkan dari surat berharga pemerintah yang risk-free ini sehingga semakin mendorong perbankan untuk melakukan penempatan dananya dalam bentuk aset ini daripada menyalurkan kredit. Meningkatnya persepsi akan credit risk selain memberikan dampak pada menurunnya suplai kredit juga mendorong kenaikan suku bunga pinjaman yang memperparah masalah adverse selection.

### Negara-Negara Industri Di Awal 1990-an

Pada awal tahun 1990an, sejumlah negara industri seperti Amerika, Inggris dan Perancis mengalami kontraksi kredit yang cukup dalam yang mengakibatkan melemahnya pertumbuhan di negara-negara tersebut. Credit crunch yang terjadi di negara-negara industri tidak terlepas dari pertumbuhan kredit yang pesat akibat deregulasi sektor keuangan yang terjadi di negara industri selama tahun 1980-an. Deregulasi sektor keuangan yang mengakhiri kontrol kredit secara langsung diikuti oleh meningkatnya akses kredit perbankan oleh sektor-sektor yang sebelumnya mengalami rationing. Peningkatan yang pesat dari kredit setelah deregulasi menjadi pendorong utama pesatnya kenaikan harga saham dan properti di tahun 1980-an, dan perubahan harga pada aset-aset ini pada gilirannya mempengaruhi pertumbuhan kredit. Meningkatnya kekayaan dan kemampuan untuk melakukan pinjaman meningkat seiring dengan kenaikan harga aset. Namun demikian ketika harga aset mulai turun akibat kebijakan moneter yang ketat untuk mengatasi overheating menyebabkan menurunnya kemampuan kapasitas nasabah untuk melakukan peminjaman. Penurunan kredit di negara-negara industri tersebut di akhir 1980-an dan di awal 1990-an juga dipengaruhi oleh peraturan perbankan yang mengharuskan bank-bank di negara industri untuk mengikuti rasio permodalan mengikuti standar BIS.

Di Amerika Serikat credit crunch terjadi pada kurun waktu 1989-1992. Terdapat beberapa hal yang menyebabkan terjadinya penurunan kredit ini. Pertama, beban pembayaran hutang yang tinggi dan meningkatnya problem keuangan nasabah dan perbankan merupakan faktor utama penyebab menurunnya kredit. Kedua, faktor-faktor penawaran kredit seperti keterbatasan modal dalam rangka memenuhi standar BIS oleh banyak kalangan disinyalir menjadi penyebab terjadinya credit crunch (Bernanke dan Lown, 1991). Pada masa itu bank-bank tidak dapat menjual saham baru karena kinerjanya yang kurang baik, sementara itu banyak juga yang menurunkan laju pertumbuhan dan memperbaiki exposure kreditnya untuk meningkatkan rasio permodalannya (Ballantine Jr, 1999).

Di Inggris, seperti yang terjadi di Jepang, penurunan kredit diawali oleh ketatnya kondisi moneter di awal tahun 1990-an. Perekonomian Inggris mengalami resesi pada summer 1990 yang menyebabkan kegagalan bisnis dan meletusnya gelembung di sektor properti. Jatuhnya harga properti menambah beban di sektor rumah tangga untuk membayar kembali hutang-hutang mortgage-nya yang memang cukup tinggi. Akibatnya bank menjadi enggan menyalurkan kredit ke sektor-sektor ini. Namun sektor properti bukanlah satu-satunya penyebab menurunnya kredit. Maraknya mergers dan akuisisi juga telah menyebabkan sektor korporasi mengalami leverage yang tinggi. Menurunnya kualitas kredit sektor korporasi ini bukan saja menyebabkan bank enggan menyalurkan kredit tetapi juga menyebabkan memburuknya kualitas aktiva bank sehingga menurunkan rasio kecukupan modalnya.

### Republik Czech Pasca Krisis

Sektor perbankan kurang efektif dalam melakukan alokasi dananya, karena kebijakan penanaman dana yang terlalu ekspansif pada akhirnya meningkatkan tekanan inflasi melalui nilai asset bukan harga barang. Hal ini terjadi karena pertumbuhan kredit lebih disebabkan oleh terlalu tingginya nilai agunan, dan lebih banyak digunakan untuk investasi yang kurang produktif seperti real estate. Metode dan proses privatisasi yang dilaksanakan pada perusahaan-perusahaan negara memberikan kontribusi terhadap terlalu tingginya penilaian asset perusahaan, sehingga berdampak pada tingginya nilai aktiva tak bergerak dan surat berharga yang digunakan sebagai agunan.

Selanjutnya hal tersebut menjadi kendala yang cukup besar pada perbankan, saat terjadi penurunan nilai aktiva perusahaan yang dijadikan agunan.

Bank pemerintah memiliki peranan yang cukup besar dalam perekonomian, sehingga penurunan penyaluran oleh bank tersebut cukup mempengaruhi suplai kredit secara keseluruhan. Selain faktor ketentuan, menurunnya kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan mengakibatkan berkurangnya kemampuan untuk membayar pinjaman. Hal ini tercermin dari turunnya trend penurunan laba perusahaan manufaktur sejak akhir 1998, menyebabkan turunnya jumlah kredit yang disalurkan di sektor tersebut.

Penurunan jumlah kredit juga disebabkan oleh turunnya harga saham, sebab perbankan menggunakan saham perusahaan sebagai agunan, sehingga penurunan harga saham akan mempengaruhi jumlah kredit yang disalurkan yang selanjutnya akan berpengaruh terhadap perekonomian. Situasi setelah tahun 1997 adalah sebagai akibat dari transisi kelembagaan (masalah privatisasi atau kerangka kerja hukum yang kurang baik). Selain itu juga disebabkan adanya perubahan kondisi makroekonomi dan moneter karena pembatasan anggaran dan fiskal.

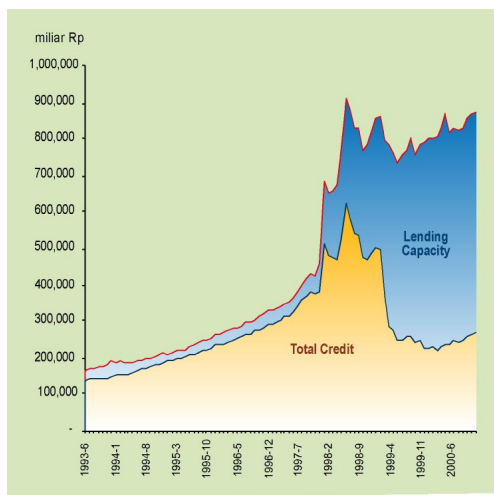
Untuk mengatasi kontraksi kredit dan kinerja perbankan, pemerintah memberikan suntikan modal pada beberapa bank pemerintah. Selain itu melakukan pemindahan kredit non lancar bank pemerintah yang kinerjanya jelek ke bank pemerintah yang lebih baik kondisinya, selanjutnya diharapkan perbaikan tersebut akan meningkatkan penyaluran kredit karena CAR-nya semakin membaik.

# Bab 3

## Fenomena Menurunnya Kredit Perbankan

### PERKEMBANGAN KREDIT PERBANKAN

Pesatnya pertumbuhan kredit perbankan sebelum krisis tidak terlepas dari besarnya kemampuan bank dalam memberikan kredit (lending capacity)<sup>2</sup>. Hal ini tercermin dari pertumbuhan yang relatif sejalan antara lending capacity dengan pertumbuhan kredit perbankan. Dalam periode 1994-1996, lending capacity perbankan mengalami pertumbuhan rata-rata 20,6% yang didorong



Grafik 3.1.

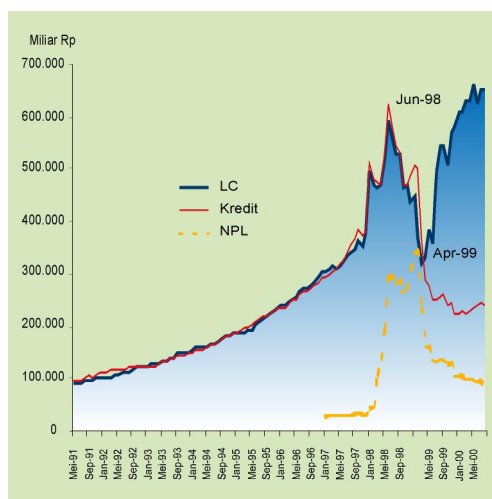
Lending Capacity dan Total Kredit  
Bank Umum

oleh pesatnya pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK), sementara kredit perbankan mengalami pertumbuhan rata-rata 24,9%. Pertumbuhan kredit yang pesat di atas lending capacity tercermin dari tingginya tingkat LDR selama periode tersebut yakni mencapai rata-rata 109,4%. Krisis yang terjadi sejak pertengahan 1997 berakibat pada melambatnya pertumbuhan DPK yang pada gilirannya berdampak terhadap menurunnya pertumbuhan lending capacity perbankan. Namun disisi lain kredit turun jauh lebih cepat, sehingga hal ini mengakibatkan selisih antara lending capacity dengan kredit menunjukkan kecenderungan yang semakin melebar (Grafik 3.1.). Dalam periode 1997-2000, rata-rata pertumbuhan lending capacity mencapai 31,2% sementara rata-rata pertumbuhan kredit berada jauh di bawahnya yakni mencapai 5,9%. Sebelum terjadinya krisis, kredit perbankan tumbuh relatif cepat. Hal ini tercermin dari tingginya

<sup>2</sup> Lending capacity merupakan total liabilities dikurangi dengan GWM, cash in vault dan modal.

pertumbuhan kredit selama periode 1994-1996 yang mencapai rata-rata sebesar 24,9% per tahun. Tingginya pertumbuhan kredit tersebut masih berlanjut pada tahun 1997 meskipun krisis terjadi sejak pertengahan tahun tersebut. Pada tahun 1998 pertumbuhan kredit perbankan tercatat cukup tinggi yaitu mencapai 28,9%, yang sebagian juga diakibatkan pengaruh melemahnya nilai tukar Rupiah sehingga nilai Rupiah dari kredit dalam valas melonjak tajam. Pengaruh krisis terhadap kredit mulai tampak di tahun 1999 ketika posisi kredit tumbuh negatif. Perbaikan pertumbuhan kredit perbankan berangsur-angsur mulai terlihat pada tahun 2000. Dalam tahun tersebut kredit perbankan telah menunjukkan pertumbuhan positif.

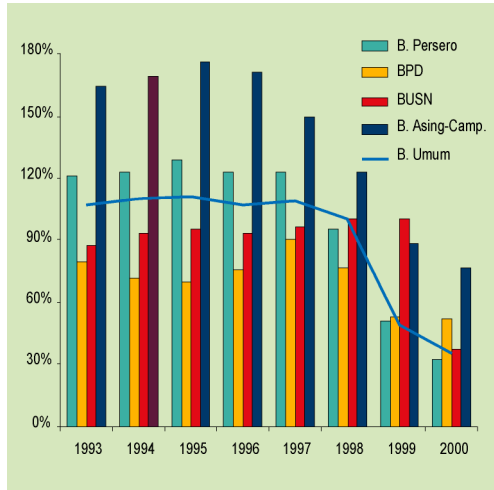
Pada awalnya, penurunan kredit perbankan yang terjadi sejak pertengahan tahun 1998 merupakan akibat dari berkurangnya kemampuan perbankan untuk menyalurkan kredit (Grafik 3.2). Namun, ketika kapasitas kredit perbankan sudah menunjukkan perbaikan sejak pertengahan 1999, volume kredit yang berhasil disalurkan perbankan sempat menurun. Bila diamati, penurunan kredit perbankan tersebut memiliki pola yang serupa dengan berkurangnya angka NPLs perbankan. Ternyata, penurunan kredit perbankan pasca April 1999 lebih disebabkan oleh adanya kewajiban bagi bank-bank peserta rekap untuk mengalihkan kredit kolektibilitas 5 (kredit macet) kepada AMU-BPPN dan kemudian digantikan dengan obligasi pemerintah.



Grafik 3.2. Perkembangan Lending Capacity, NPLs dan Volume Kredit Perbankan

Rendahnya tingkat pemanfaatan kapasitas kredit perbankan juga terlihat pada rendahnya angka LDR perbankan. Bahkan dalam tahun 2000, LDR perbankan masih menunjukkan kecenderungan menurun. Bila LDR pada akhir tahun 1999 masih tercatat sebesar 49,5%, pada akhir tahun 2000 angka tersebut semakin menurun menjadi sebesar 35,5% (Grafik 3.3).

Ditinjau dari kelompoknya, pada tahun 2000 semua kelompok bank nasional (persero, BUSN, dan BPD) memiliki angka LDR dibawah 55%. Bahkan kelompok bank persero dan BUSN



Grafik 3.3.

Perkembangan LDR Perbankan

tercatat memiliki LDR yang relatif kecil yakni masing-masing sebesar 32,1% dan 25,9%. Sementara itu, meski terus menurun angka LDR bank asing-campuran tercatat masih cukup tinggi yakni mencapai 77,0%. Fenomena rendahnya tingkat LDR tersebut, selain disebabkan oleh digantinya kredit yang dialihkan ke BPPN dengan obligasi pemerintah juga disebabkan oleh pertumbuhan kredit perbankan meskipun program rekapitalisasi telah selesai dilakukan.

## SEBAB-SEBAB MELAMBATNYA PERTUMBUHAN KREDIT PERBANKAN

Terganggunya pertumbuhan kredit perbankan dapat terjadi karena lemahnya permintaan kredit, lemahnya penawaran, atau keduanya. Gangguan pada sisi permintaan dapat berupa menurunnya kualitas nasabah kredit, tingginya suku bunga yang melebihi kemampuan membayar nasabah, dan masih tingginya risiko berusaha sehingga nasabah belum berani memulai usahanya. Sementara, gangguan pada sisi penawaran dapat berupa keterbatasan permodalan bank, ketersediaan loanable fund, permasalahan NPLs bank, dan keengganan bank untuk menyalurkan kredit yang terkait dengan tingginya risiko dunia usaha.

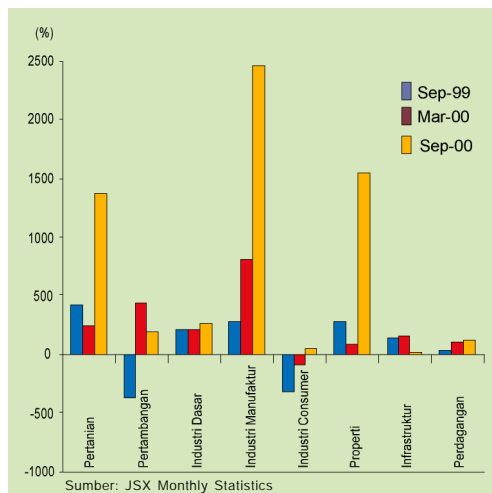
### Permasalahan Di Sisi Permintaan

Pada masa resesi, penurunan kredit merupakan hal normal yang terjadi sebagai refleksi dari turunnya permintaan untuk konstruksi baru, barang-barang modal, dan barang-barang konsumsi

tahan lama (consumer durables).<sup>3</sup> Namun, pertumbuhan kredit di Indonesia meski telah menunjukkan perbaikan menunjukkan pola yang agak berbeda dengan kondisi normal. Dengan demikian, penjelasan mengenai sisi permintaan kredit dalam hal ini diharapkan dapat menerangkan perbedaan pola tersebut.

### Menurunnya Kualitas Nasabah

Salah satu penjelasan utama terhadap lemahnya permintaan adalah melemahnya kondisi neraca (balance sheet) perusahaan yang menjadi nasabah kredit. Sebelum krisis, banyak perusahaan yang secara signifikan meningkatkan leverage-nya, baik yang berasal dari pinjaman bank dalam negeri maupun dari luar negeri. Krisis keuangan yang terjadi pada tahun 1997-1998 mengakibatkan depresiasi nilai tukar dan kenaikan suku bunga yang sangat tinggi. Kondisi ini menyebabkan meningkatnya kewajiban pembayaran hutang (debt services) perusahaan sehingga semakin meningkatkan leverage mereka. Kecenderungan semakin meningkatnya leverage perusahaan-perusahaan juga tercermin dari masih tingginya debt to equity ratio perusahaan-perusahaan publik. Bahkan, tingkat leverage perusahaan-perusahaan yang bergerak pada sektor-sektor industri manufaktur, pertanian dan properti tercatat sangat tinggi (Grafik 3.4).



Grafik 3.4.  
Debt to Equity Ratio Dari  
Perusahaan Yang Listed di JSX

### Tingginya Suku Bunga Kredit dan Risiko Berusaha

Disamping itu, kenaikan suku bunga yang begitu tinggi ketika krisis telah menyebabkan

<sup>3</sup> Bernanke and Lown, 1991

penurunan nilai aset dan cash flow perusahaan. Sehingga, secara umum meskipun terdapat peluang untuk investasi maka nasabah yang dalam kondisi keuangannya perusahaannya sangat lemah (perusahaan yang leverage-nya lebih tinggi atau cash flow-nya lebih rendah) cenderung melakukan pembenahan keuangannya terlebih dahulu daripada melakukan ekspansi usaha. Hal ini menyebabkan rendahnya permintaan kredit yang terjadi.

Dalam hal menjelaskan masih rendahnya aplikasi terhadap kredit perbankan, tingginya risiko berusaha merupakan salah satu faktor utama yang mengurangi permintaan kredit. Ketidakpastian yang masih tinggi mengakibatkan pengusaha belum berani untuk melakukan ekspansi usaha (investasi) sehingga permintaan akan dana untuk investasi secara otomatis juga akan berkurang. Selain itu, dalam kondisi resesi perusahaan biasanya mengurangi investasi dalam persediaan barang (inventory). Berkurangnya jumlah inventory tersebut tentunya berakibat pada menurunnya kebutuhan modal kerja yang pada gilirannya menyebabkan berkurangnya permintaan kredit modal kerja.

#### Permasalahan Di Sisi Penawaran

Sejumlah permasalahan internal perbankan (seperti kecukupan modal, memburuknya kualitas aset, dan ketersediaan loanable fund) diduga telah menyebabkan turunnya kemampuan bank dalam memberikan kredit. Di samping itu, terdapat beberapa persoalan eksternal yang menimbulkan keengganan bank untuk menyediakan pembiayaan bagi dunia usaha.

#### Kecukupan Modal

Salah satu dampak krisis adalah terjadinya penurunan modal perbankan yang cukup tajam akibat besarnya kerugian dan turunnya kualitas aset. Sebagai akibatnya, mayoritas bank sempat memiliki modal yang negatif (Grafik 3.5). Dalam kondisi capital constrained seperti itu, adalah sangat wajar jika bank-bank kemudian bertahan untuk tidak menyalurkan kredit, karena kenaikan kredit yang disalurkan akan menambah aset berisiko sehingga mengharuskan bank

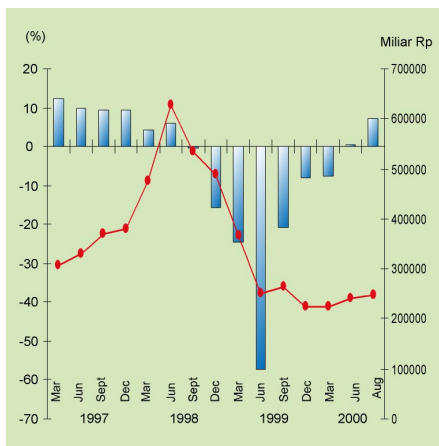
menambah modal. Fenomena ini sering disebut sebagai capital crunch (Bernanke dan Lown, 1991) untuk menggambarkan fenomena turunnya kemampuan bank menyalurkan kredit sebagai akibat kurangnya permodalan.

Meski tingkat permodalan bank secara agregat telah positif sejalan dengan telah selesainya program rekapitalisasi, kewajiban pemenuhan CAR minimal 8% pada akhir 2001 merupakan salah satu faktor internal yang membatasi ruang gerak perbankan dalam memberikan kredit. Bank-bank merasa bahwa CAR sebesar 8% pada akhir tahun 2001 sulit dicapai, sehingga bank-bank menjadi lebih berhati-hati untuk menyalurkan kredit.

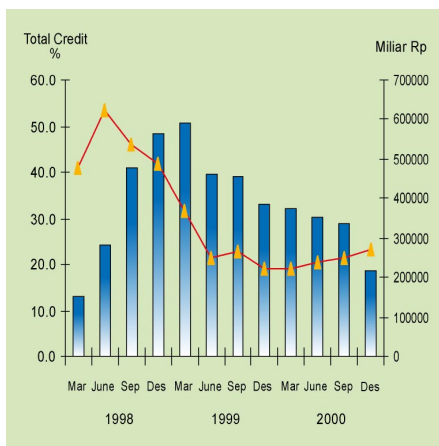
### Kredit Bermasalah (NPLs)

Selain kecukupan modal, tingginya NPLs, yang sempat melonjak hingga di atas 50% pada awal tahun 1999, merupakan salah satu faktor yang menyebabkan engganannya perbankan memberikan kredit (Grafik 3.6). Dalam kondisi NPLs yang tinggi tersebut, perbankan lebih cenderung melakukan konsolidasi internal guna memperbaiki kualitas aset ketimbang menyalurkan kredit.

Tingginya NPLs tersebut juga berpengaruh terhadap memburuknya kondisi permodalan. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya PPAP yang harus



Grafik 3.5.  
CAR (Bar chart) dan Kredit Yang Diberikan (Line chart)

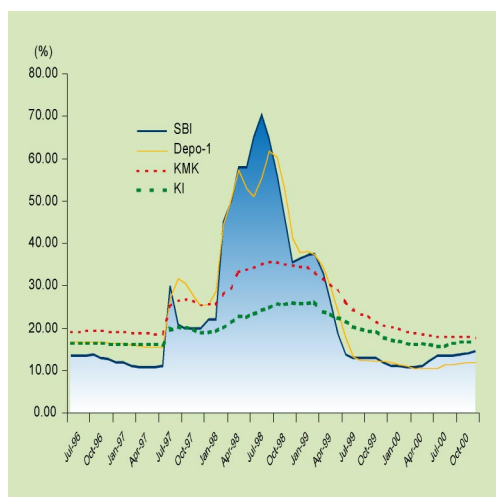


Grafik 3.6.  
NPLs (Bar chart) dan Kredit Yang Diberikan (Line chart)

dibentuk serta menurunnya pendapatan bunga. Meskipun NPLs hingga akhir tahun 2000 berangsur-angsur telah menurun, tingginya kerugian akibat NPLs pada periode-periode sebelumnya menyebabkan perbankan menjadi risk-averse sehingga pertumbuhan kredit tidak cukup signifikan.

### Tingginya Risiko Kredit

Salah satu indikator yang mencerminkan masih tingginya risiko dunia usaha menurut perspektif perbankan adalah dengan melihat lebarnya spread antara suku bunga kredit dengan suku bunga dana. Penelitian yang pernah dilakukan menunjukkan bahwa salah satu penyebab



Grafik 3.7.

Perkembangan Suku Bunga SBI,  
Deposito, KMK, dan KI

lebaranya spread suku bunga pasca krisis adalah besarnya komponen margin risiko yang ditetapkan bank dalam suku bunga kreditnya (Grafik 3.7).<sup>4</sup> Di samping itu, terdapat sejumlah temuan lain yang mendukung bahwa masih tingginya risiko dunia usaha telah menimbulkan keengganan bank memberikan kredit, yaitu: bank cenderung untuk meminta collateral yang likuid; bank cenderung untuk hanya berhubungan dengan debitur lama yang telah dikenal; dan terjadi perubahan organisasi kredit pada bank yang cenderung lebih sentralistik dalam pemutusan kredit. Tingginya risiko kredit juga tercermin dari masih tingginya leverage perusahaan seperti yang dikemukakan sebelumnya.

<sup>4</sup> Lihat "Pembentukan Struktur Suku Bunga dari Sisi Perbankan dalam Menunjang Efektivitas Kebijakan Perbankan", Bagian SPPK-DKM, Tahun 2000.

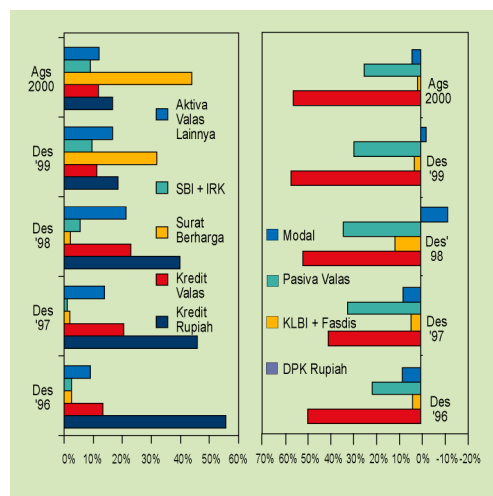
## PERUBAHAN PORTOFOLIO PERBANKAN

### Portofolio Perbankan Sebelum Krisis

Sebelum terjadinya krisis, sumber utama dana bank umum berasal dari DPK rupiah dan pasiva valas. Hal ini tercermin dari tingginya pangsa kedua sumber tersebut yakni mencapai 71% (Grafik 3.8). Layer berikutnya bersumber dari modal, antarbank pasiva, pinjaman yang diterima, dan KLBI.

Pada masa normal, perbankan menyalurkan dananya terutama dalam bentuk kredit rupiah sebagaimana tercermin dari pangasanya yang mencapai 55,7% dari seluruh dana yang dimiliki pada tahun 1996. Pada tahap berikutnya, bank umum menempatkan dananya dalam bentuk kredit valas, antarbank aktiva, dan aktiva valas lainnya. Penempatan pada SBI pada periode tersebut hanya berjumlah 2,5% dari dana yang dimiliki.

Terdapat hal menarik pada pengelolaan likuiditas antar kelompok dan pola ini tidak hanya terjadi pada masa normal namun juga terjadi pada periode pengamatan lainnya. Bank asing-campuran terlihat sangat efisien dalam memelihara likuiditas dalam bentuk kas (idle fund) yang selalu diusahakan seminimal mungkin. Jumlah kas bank asing-campuran pada setiap periode pengamatan berkisar 0,1%-0,2%, hanya pada Desember 1999 jumlahnya melonjak menjadi 0,6% sebagai antisipasi terhadap issue Y2K. Sementara bank-bank lokal (kelompok lainnya) memelihara kas yang relatif besar, yaitu berkisar 0,6%-2,8% pada periode normal dan kemudian meningkat pada periode lainnya.



Grafik 3.8

Portofolio Aktiva dan Pasiva  
Bank Umum

Hal lain yang juga ditemui adalah kecenderungan perbankan untuk long valas sejak periode normal (Rp6,9 triliun) dan membesar pada periode krisis (Rp85,1 triliun pada Desember 1998). Namun, sejak program rekapitalisasi dilakukan, bank umum mengalami short valas yang jumlahnya pada Agustus 2000 mencapai Rp9 triliun. Hal tersebut disebabkan adanya pengalihan kredit valas bank persero ke BPPN dan digantikan dengan hedge bond. Sementara itu, kelompok lainnya tetap mengalami long valas. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan perbankan untuk mengkonversi sebagian dana rupiah yang dihimpun ke dalam bentuk penanaman valas.

### Portofolio Perbankan Pada Masa Krisis

Pada awal masa krisis, Desember 1997, terjadi perubahan yang cukup berarti pada komposisi sumber dana bank umum. Walaupun DPK rupiah dan pasiva valas tetap merupakan sumber dana utama, hanya saja komposisi DPK rupiah menurun dan komposisi pasiva valas meningkat akibat adanya tambahan sebesar US\$1,6 miliar disamping akibat melemahnya nilai rupiah pada masa itu. Selain itu, terjadi peningkatan komposisi sumber dana dari BI yang bersumber dari peningkatan fasilitas diskonto yang diterima sejumlah bank yang mengalami kesulitan likuiditas. Penurunan komposisi DPK rupiah pada awal masa krisis semata-mata bukan disebabkan oleh penurunan jumlah DPK rupiah yang dihimpun perbankan. Namun, disebabkan oleh pertumbuhan DPK rupiah yang relatif lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan pasiva valas. Pada Desember 1997, semua kelompok bank berhasil meningkatkan jumlah DPK rupiahnya, hanya BUSND yang mencatat penurunan DPK rupiah sebagai akibat likuidasi 16 bank pada Nopember 1997.

Pada sisi aktiva, portofolio aset bank umum di awal masa krisis mulai berubah. Walaupun kredit rupiah masih tetap merupakan portofolio aset yang utama, namun secara perlahan dominasinya mulai berkurang. Di lain pihak, komposisi kredit valas dan aktiva valas lainnya mulai meningkat. Seiring dengan mulai terjadinya penurunan kualitas kredit yang dimiliki perbankan maka PPAP yang dibentuk juga menunjukkan peningkatan. Portofolio yang dimiliki perbankan dalam bentuk

SBI pada Desember 1997 juga mulai menurun seiring dengan kesulitan likuiditas yang terjadi pada masa itu.

Pada Desember 1998, komposisi sumber dana bank umum tidak mengalami perubahan yang berarti dibandingkan dengan komposisinya pada Desember 1997. Hanya saja, semakin memburuknya kondisi perbankan terlihat pada negatifnya permodalan (*negative networth*) akibat besarnya kerugian yang dialami. Disamping itu, sumber dana dari BI juga menunjukkan peningkatan yang signifikan akibat bertambahnya pemberian fasilitas diskonto kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas.

Komposisi DPK rupiah perbankan pada Desember 1998 relatif lebih tinggi dibandingkan komposisinya pada periode sebelumnya. Dibandingkan dengan Desember 1997, DPK rupiah bank umum meningkat sebesar Rp183,8 triliun. Peningkatan tersebut terutama terjadi pada simpanan berjangka (*deposito*) seiring dengan tingginya suku bunga yang diberikan perbankan pada saat itu. Pasiva valas yang dimiliki bank umum pada Desember 1998 turun US\$6,8 miliar dibandingkan posisinya pada Desember 1997. Penurunan pasiva valas tersebut diduga terkait dengan tingginya arus modal keluar (*capital out-flow*) yang terjadi pada masa itu.

Kerugian tahun berjalan yang diderita perbankan pada Desember 1998 telah berjumlah Rp168,3 triliun dan menyebabkan modal perbankan menjadi negatif Rp98,5 triliun. Besarnya kerugian yang diderita oleh perbankan terutama disebabkan oleh: *spread* negatif akibat peningkatan suku bunga dana yang tinggi sementara suku bunga kredit tidak dapat dinaikkan dengan seketika; terganggunya arus pendapatan bank akibat bertambahnya jumlah kredit bermasalah karena banyak perusahaan yang *collapse* pada masa krisis; dan kerugian-kerugian yang terjadi karena fluktuasi nilai tukar.

Portofolio aset bank umum pada Desember 1998 masih tetap didominasi oleh kredit rupiah, kredit valas, dan aktiva valas. Hanya saja, terjadi penurunan komposisi kredit rupiah, sementara komposisi kredit valas dan aktiva valas meningkat. Selain itu, terjadi peningkatan pada komposisi PPAP sebagai akibat dari berlanjutnya proses pemburukan

kualitas kredit dan peningkatan pada komposisi SBI karena menariknya suku bunga yang ditawarkan.

Jumlah SBI yang dimiliki oleh bank umum meningkat Rp40,8 triliun selama periode Desember 1997-Desember 1998. Berdasarkan kelompoknya, peningkatan terbesar terjadi pada kelompok BUSD sejumlah Rp18 triliun. Sementara, SBI yang dimiliki bank persero dan asing-campuran meningkat Rp10,5 triliun dan Rp10,1 triliun. Sedangkan BUSND dan BPD menambah jumlah dana yang ditempatkan di SBI sejumlah Rp2,1 triliun dan Rp116 miliar.

### Portofolio Perbankan Pasca Program Rekapitalisasi

Pada Desember 1999, setelah pemerintah melaksanakan program rekapitalisasi pada sebagian bank, mulai terlihat perbedaan portofolio perbankan baik di sisi pasiva maupun aktiva. Pada sisi pasiva, walaupun DPK rupiah dan pasiva valas masih tetap merupakan sumber dana perbankan yang utama namun negatif permodalan perbankan dan komposisi fasilitas diskonto sudah mulai mengalami penurunan. Fasilitas diskonto sudah kembali ke pola normal ketika krisis belum terjadi. Sementara itu, dengan adanya tambahan setoran modal dari pemerintah maka negatif permodalan perbankan mulai mengecil.

Pada sisi aktiva, program rekapitalisasi telah mengakibatkan terjadinya pergeseran portofolio perbankan yang cukup signifikan. Komposisi utama penggunaan dana bank umum berpindah dari kredit rupiah kepada obligasi pemerintah. Kredit rupiah, aktiva valas, kredit valas, dan SBI merupakan portofolio layer kedua. Penurunan portofolio perbankan pada kredit rupiah terjadi karena beberapa hal, yaitu: terjadinya pengalihan kredit bank-bank rekap kepada AMU-BPPN sebagai persyaratan keikutsertaannya pada program dimaksud; beberapa bank menghapusbukukan kredit bermasalahnya dalam upaya restrukturisasi kredit yang dilakukan sendiri; masih tingginya resiko dunia usaha menyebabkan perbankan enggan untuk memberikan kredit baru; dan masih adanya kendala CAR bagi beberapa bank karena harus menyisihkan dana untuk

membentuk PPAP menyebabkan bank tidak dapat menyalurkan kredit baru. Di lain pihak, sejalan dengan adanya kendala dalam penyaluran kredit maka perbankan mengalihkan dana yang dimiliki untuk ditanamkan dalam bentuk SBI dan IRK.

Sampai dengan Agustus 2000, pola portofolio pasiva dan aktiva perbankan tersebut di atas belum banyak berubah. Kelanjutan program rekapitalisasi terhadap bank-bank pemerintah dan beberapa bank BTO hanya berdampak pada perbaikan modal yang telah menunjukkan angka positif. Selain itu, pada sisi aktiva, kelanjutan program rekapitalisasi hanya semakin memperbesar dominasi obligasi pemerintah sebagai portofolio utama bank umum. Sementara itu, portofolio bank umum di SBI juga tidak menunjukkan perubahan jumlah yang berarti.

Pengamatan terhadap pola perilaku portofolio perbankan pasca program rekapitalisasi menunjukkan bahwa secara umum fungsi intermediasi perbankan masih belum pulih. Walaupun hal tersebut hanya terjadi pada bank persero dan BUSD, namun mengingat bahwa kedua kelompok tersebut merupakan mayoritas perbankan dalam hal aset maka masalah ini menjadi perlu untuk dicarikan pemecahannya. Pola portofolio bank persero dan BUSD (sampai dengan Agustus 2000) menunjukkan bahwa program rekapitalisasi saja ternyata tidak cukup untuk menyelesaikan peliknya persoalan pada sektor perbankan.

Pasca program rekapitalisasi kemampuan perbankan untuk men-generate kredit belum sepenuhnya pulih. Setumpuk persoalan yang masih tersisa pada tingginya risiko dunia usaha dan lambannya restrukturisasi perusahaan mengakibatkan perbankan kehilangan fungsinya sebagai intermediary antara kreditur dan debitur. Sebagian besar dana perbankan hanya ditempatkan dalam surat-surat berharga (obligasi pemerintah dan SBI), yang bukan merupakan core business bank karena lebih menyerupai aktivitas mutual fund.

---

## Bab 4

# Kajian Empiris: Apakah Ada Credit Crunch?

Kajian dalam bab ini dilakukan untuk menguji secara empiris apakah penurunan kredit yang terjadi lebih banyak disebabkan oleh faktor-faktor penawaran seperti dalam hipotesa credit crunch. Kajian ini dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu makro-agregat dan mikro-perbankan. Secara makro pengujian dilakukan dengan menggunakan data agregat dengan model ketidak seimbangan (disequilibrium model) seperti yang dilakukan oleh Pazarbasioglu (1997) dan Gosh dan Gosh (1999). Secara mikro, pengujian dilakukan dengan regresi panel menggunakan data individual bank.

## KAJIAN EMPIRIS SECARA MAKRO

### Metodologi

Persoalan utama dalam menguji adanya credit crunch adalah bagaimana mengidentifikasi bahwa kredit yang disalurkan oleh perbankan lebih banyak disebabkan oleh penawaran atau permintaan. Identifikasi ini dilakukan dengan metode "switching regression" untuk memperoleh informasi apakah aktual kredit yang ada dapat dihubungkan dengan fungsi penawaran kredit atau permintaan kredit.

Dalam model empiris ini, penawaran kredit secara riil ( $L^s$ ) ditentukan oleh kapasitas kredit dan faktor-faktor yang mempengaruhi keinginan bank untuk menawarkan kredit seperti tingkat suku bunga, rasio modal terhadap aset, dan non performing loans (NPLs). Kapasitas kredit didefinisikan sebagai total pasiva dikurangi modal bank, giro wajib minimum dan kas bank. Suku bunga pinjaman adalah rata-rata tertimbang suku bunga kredit untuk modal kerja dan investasi. Berbeda dengan studi-studi yang dilakukan sebelumnya (misalnya oleh Gosh and Gosh, 1999),

kajian ini memasukkan faktor-faktor mikro perbankan seperti rasio modal terhadap aset dan NPLs sebagai faktor yang mempengaruhi penawaran kredit. Hipotesa yang digunakan adalah turunnya modal, khususnya selama masa krisis hingga saat ini telah menyebabkan penurunan kredit bank. Menurut Bernanke and Lown, 1991, hipotesa ini menjadikan "capital crunch" sebagai alternatif penjelasan yang lebih baik terhadap fenomena credit crunch yang sedang terjadi. Spesifikasi penawaran kredit yang dibentuk adalah sebagai berikut:

$$L_t^S = \alpha_0 + \alpha_1 \text{icap}_t + \alpha_2 r_t + \alpha_3 y_t + \alpha_4 \text{CA}_t + \text{NPL}_t + \varepsilon_t \quad (1)$$

dimana, icap adalah kapasitas kredit,  $r_t$  merupakan tingkat suku bunga kredit,  $y_t$  adalah output, CA adalah rasio modal bank terhadap aset yang merupakan proksi dari CAR, dan NPLs adalah non performing loans (NPLs) yang ada di perbankan.

Permintaan kredit ( $L^D$ ) ditentukan oleh GDP riil dan suku bunga kredit. GDP riil bulanan diperoleh dengan cara menginterpolasi data GDP riil kuartalan. Permintaan kredit terutama kredit modal kerja tergantung pada produksi di sektor riil, semakin tinggi output semakin besar permintaan kredit. Sementara itu, permintaan kredit memiliki hubungan yang negatif dengan tingkat suku bunga yang juga mencerminkan biaya modal. Spesifikasi formal untuk permintaan kredit adalah sebagai berikut :

$$L_t^D = \beta_0 + \beta_1 y_t + \beta_2 r_{1,t} + \varepsilon_t \quad (2)$$

Persamaan (1) dan (2) dapat disederhanakan dalam dua persamaan simultan berikut :

$$L_t^S = X_{1t}' \alpha + \varepsilon_{1t} \quad (3)$$

$$L_t^D = X_{2t}' \alpha + \varepsilon_{2t} \quad (4)$$

dimana  $X_1$  adalah faktor-faktor dari fungsi penawaran kredit dan  $X_2$  adalah faktor-faktor dari fungsi permintaan.

Jika pasar kredit bekerja secara sempurna, suku bunga kredit selalu melakukan penyesuaian untuk menjamin bahwa penawaran sama dengan permintaan. Namun, jika pasar kredit tidak

bekerja secara sempurna dimana suku bunga tidak melakukan penyesuaian atau terjadi credit rationing, maka permintaan kredit ( $L^D$ ) tidak selalu sama dengan penawaran kredit ( $L^S$ ), sehingga tingkat aktual kredit ( $L$ ) dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$L_t = \min(L_t^D, L_t^S) \quad (5)$$

Apabila  $L^D > L^S$ , maka observasi jumlah  $L$  disebabkan oleh fungsi penawaran, dan jika  $L^D < L^S$ , maka jumlah  $L$  didorong oleh fungsi permintaan.

Maddala (1983) menunjukkan bahwa dalam disequilibrium model, koefisien-koefisien dalam persamaan (1) dan (2) dapat di estimasi melalui metode maximum likelihood dengan fungsi likelihood (ML) sebagai berikut:

$$ML = \prod_t \{g_1(L_t)[1 - G_2(L_t)] + g_2(L_t)[1 - G_1(L_t)]\} \quad (6)$$

dimana  $g_1(L_t)$  dan  $g_2(L_t)$  merupakan probabilitas aktual kredit masing-masing sebagai akibat penawaran dan permintaan, yang diasumsikan mengikuti distribusi normal.  $G_1(L_t)$  dan  $G_2(L_t)$  merupakan fungsi kepekatan kumulatif (cumulative density function) dari penawaran dan permintaan.

## Hasil Empiris

Estimasi persamaan (1) dilakukan pada periode sampel 1993.06-2000.12 dan dilaporkan pada Tabel 4.1. Dalam fungsi penawaran, seluruh koefisien sesuai dengan apa yang diperkirakan. Kapasitas kredit memiliki tanda yang positif, artinya kredit yang diberikan sangat tergantung pada kapasitas kredit yang tersedia. Suku bunga kredit memiliki koefisien yang positif dan signifikan yang dapat diartikan semakin tinggi suku bunga semakin banyak kredit yang ditawarkan oleh bank. Temuan lain yang jauh lebih menarik adalah penawaran kredit secara positif dipengaruhi oleh rasio modal terhadap aset. Hasil ini mendukung hipotesa sebelumnya yang menyatakan bahwa

penurunan kredit setelah masa krisis sebagian merupakan akibat capital crunch. Sementara itu, koefisien NPLs memiliki hubungan negatif dan signifikan yang mengimplikasikan semakin tinggi NPLs yang dimiliki bank, semakin menurun kredit yang dapat disalurkan. NPLs yang tinggi menyebabkan bank harus membentuk cadangan penghapusan yang lebih besar.

Tabel 4.1.

Hasil Estimasi Maximum Likelihood Persamaan Penawaran dan Permintaan Kredit

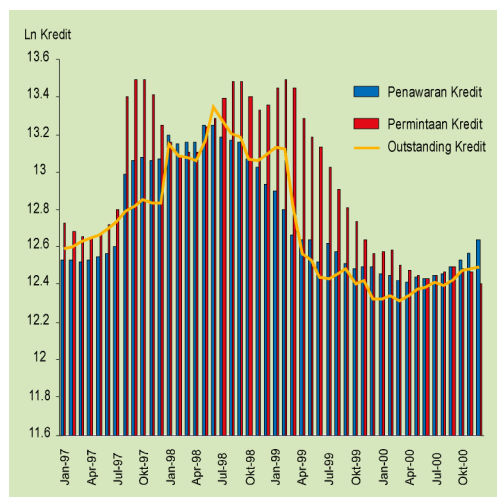
Variabel	Koefisien	t-stat
Penawaran		
Konstanta	3.720	7.80***
Kapasitas kredit	0.451	11.21***
Suku bunga krdit	1.299	11.94***
Capital/asset ratio	0.002	3.09**
NPLs	-0.335	-8.98***
Permintaan		
Konstanta	-3.249	-3.21**
Output	2.871	10.41***
Suku bunga kredit	1.966	29.83***

\* signifikan pada 10%, \*\* signifikan pada 5%, \*\*\* signifikan pada 1%

Dalam persamaan permintaan kredit, output memiliki hubungan yang searah dan signifikan dengan permintaan kredit. Hubungan ini mendukung alasan penggunaan variabel ini sebagai proksi permintaan terhadap kredit. Sementara, suku bunga kredit yang seharusnya memiliki hubungan negatif malah memiliki hubungan positif. Fenomena ini mencerminkan suku bunga tidak menjadi masalah utama bagi dunia usaha dalam melakukan permohonan kredit.

Selanjutnya, untuk memperoleh gambaran apakah outstanding kredit yang ada dipengaruhi faktor penawaran atau permintaan, kedua fungsi tersebut ditampilkan pada satu grafik (Grafik 4.1). Dari grafik tersebut terlihat bahwa secara umum sebelum krisis kredit perbankan lebih banyak didorong oleh permintaan. Sedangkan sepanjang krisis, terjadi kelebihan permintaan kredit bank

dibandingkan penawaran kredit, sehingga dapat disimpulkan bahwa penurunan kredit yang terjadi setelah masa krisis lebih didorong oleh faktor penawaran kredit. Credit crunch yang ditandai dengan terjadinya kelebihan permintaan kredit terjadi khususnya satu bulan setelah terjadinya krisis nilai tukar. Krisis nilai tukar yang terjadi mengakibatkan memburuknya kemampuan perusahaan dan pada gilirannya meningkatkan kredit bermasalah dalam sistem perbankan. Sementara itu, bank juga menghadapi permasalahan akibat besarnya pasiva dalam denominasi valas yang dimiliki yang



Grafik 4.1.

#### Hasil Estimasi Penawaran dan Permintaan Kredit

ketatnya ketentuan BMPK memaksa bank untuk menyesuaikan perilaku pemberian kredit mereka yang sebelumnya cenderung pada perusahaan dalam satu grupnya. Oleh karena hubungan antara bank dan debitur bersifat jangka panjang, penyesuaian yang diperlukan oleh bank juga memerlukan waktu yang lama, misalnya untuk mengumpulkan informasi mengenai debitur potensial baru mereka.

Dari grafik terlihat bahwa sejak pertengahan 2000 tidak lagi terdapat kelebihan permintaan, yang menunjukkan perubahan outstanding kredit tidak lagi disebabkan oleh faktor penawaran. Ada beberapa faktor yang mungkin dapat menjelaskan fenomena ini: (1) credit crunch memang telah berangsur-angsur pulih; (2) terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran namun tidak tertangkap dalam model seperti masih tingginya risiko kredit dunia usaha. Survei yang dilakukan

sangat rentan terhadap gejolak nilai tukar. Nilai tukar yang semakin terdepresiasi disertai suku bunga yang tinggi juga telah melemahkan neraca perusahaan sehingga mengurangi kemampuan investasi di masa mendatang. Hal ini pada gilirannya mengurangi permintaan kredit yang tercermin dari semakin mengecilnya kelebihan permintaan kredit.

Di sisi penawaran, upaya pencapaian CAR sesuai standar BIS dalam tahun 2001 mengurangi kemauan bank untuk menyalurkan dananya ditengah-tengah permasalahan kredit bermasalah yang dihadapi. Selain itu, semakin

terhadap perbankan dan dunia usaha/perusahaan seperti yang dilaporkan dalam Bab 5 dan Bab 6 akan mengkonfirmasi pertanyaan tersebut.

## KAJIAN EMPIRIS SECARA MIKRO

### Regresi Panel Data

Kajian empiris dengan data mikro ini dilakukan untuk menguji hipotesa bahwa penurunan kredit yang terjadi adalah karena faktor penawaran seperti yang disinyalir oleh hipotesa credit crunch, khususnya lemahnya kondisi keuangan internal bank-bank, terutama bagi bank-bank yang mengalami penurunan modal secara substansial sehingga harus menjalani proses rekapitalisasi. Data yang digunakan dalam kajian empiris ini adalah panel data individual bank dengan sampel antara Januari 1994 sampai dengan Desember 1999. Dengan menghilangkan bank-bank yang ditutup sebelum akhir Desember 1999 diperoleh 140 bank yang memiliki periode sampel tersebut, sehingga panel berjumlah 10.080 observasi.

Dalam spesifikasi model, faktor penawaran kredit menggunakan rasio antara modal dan aset sebagai proksi dari rasio modal bank (CAR). Selain faktor penawaran, dalam model juga dimasukkan faktor permintaan, yaitu pertumbuhan GDP dan variabel kebijakan moneter yang dalam hal ini menggunakan suku bunga SBI. Persamaan matematis dari spesifikasi model tersebut adalah sebagai berikut:

$$\Delta L_{i,t} / A_{i,t} = b_0 + b_1 (\Delta L_{i,t-1} / A_{i,t-1}) + b_2 CA_{i,t-1} + b_3 y_t + b_4 rSBI_{t-1} \quad (7)$$

dimana indeks  $i$  adalah indeks untuk individual bank dan  $t$  adalah indeks periode waktu.  $L_{it}$  adalah posisi kredit,  $A_{it}$  adalah total aset,  $CA_{it}$  adalah rasio antara modal terhadap total aset (untuk selanjutnya disebut rasio modal),  $y_t$  adalah pertumbuhan GDP dan  $rSBI$  adalah suku bunga SBI.

## Hasil Regresi Panel

Regresi Panel dari persamaan (1) dilakukan untuk keseluruhan periode sampel (Januari 1994-Desember 1999), selain itu regresi juga dilakukan untuk periode sampel sebelum krisis (Januari 1994 - Juli 1997) dan periode setelah krisis (Agustus 1997 - Desember 1999). Khusus untuk sampel seluruh periode, dalam persamaan ditambahkan satu variabel boneka (dummy variable) krisis untuk menangkap perubahan struktural yang mungkin terjadi dari periode sebelum krisis dan setelahnya. Hasil regresi dapat dilihat dalam Tabel 4.2.

Tabel 4.2. Hasil Regresi Panel Seluruh Bank

Variabel	Seluruh sampel (Jan 94-Des 99)	Pre-krisis (Jan 94-Jul 97)	Pasca-krisis (Ags 97-Des 00)
Konstanta	0.011 (10.38)	0.011 (3.26)	0.006 (2.45)
$\Delta L_{i,t-1}/A_{i,t-1}$	0.028 (2.78)	-0.006 (-0.46)	0.041 (2.57)
$CA_{t-1}$	0.025 (5.96)	0.031 (6.69)	0.022 (3.05)
GDP growth	0.130 (3.64)	0.183 (3.99)	0.108 (1.93)
rSBI(-1)	-0.038 (-7.91)	-0.041 (-1.58)	-0.037 (-5.77)
Dummy Krisis	-0.005 (-3.27)	-	-

( ) angka dalam kurung adalah t-ratio.

Hasil estimasi untuk keseluruhan bank menunjukkan bahwa secara keseluruhan koefisien model sesuai dengan yang diperkirakan, yaitu rasio modal dan pertumbuhan GDP berpengaruh positif pada pertumbuhan kredit sementara suku bunga SBI sebagai variabel kebijakan moneter berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan kredit. Hubungan tersebut terjadi baik pada seluruh periode, maupun pada periode sebelum dan sesudah krisis.

Secara konsisten, rasio modal yang juga memiliki koefisien positif dan signifikan untuk seluruh periode sampel, sebelum krisis dan setelah krisis. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan kredit dari bank dengan modal yang rendah cenderung untuk tumbuh lebih lambat dibandingkan dengan bank dengan rasio modal lebih tinggi. Temuan ini sejalan dengan fakta bahwa salah satu faktor yang menjadi penghambat penyaluran kredit perbankan ditinjau dari sisi penawaran adalah ketentuan pemenuhan modal minimum (CAR), khususnya pada masa krisis.

Sementara itu, pertumbuhan GDP sebagai proksi dari sisi permintaan kredit menunjukkan koefisien yang positif dan signifikan pada seluruh periode pengamatan. Hal ini mencerminkan pertumbuhan kredit perbankan meningkat searah dengan permintaan yang naik. Namun demikian, dibandingkan antara periode sebelum krisis dan pada masa krisis hingga saat ini, besarnya koefisien dan tingkat signifikansi pertumbuhan kredit mengalami penurunan. Fenomena ini mengimplikasikan bahwa sejak krisis terjadi perilaku kredit perbankan yang didorong dari faktor permintaan mengalami penurunan.

Selanjutnya untuk melihat lebih mendalam mengenai hal ini dalam periode krisis hingga saat ini, regresi panel dilakukan dengan membedakan kelompok bank menjadi dua kategori yaitu: (1) bank dalam proses rekap, merupakan bank yang ikut dalam program rekapitalisasi dan, (2) bank-non rekap yaitu yang tidak masuk dalam program rekapitalisasi yang terdiri dari bank-bank dalam kategori A dan bank-bank asing. Regresi ini dilakukan menggunakan persamaan (7) dengan menambahkan variabel rasio non performing loans (NPLs)<sup>5</sup>, yang dimiliki bank sebagai salah satu faktor lain yang diduga cukup kuat mempengaruhi penawaran kredit bank, sehingga persamaan menjadi :

$$\Delta L_{i,t} / A_{i,t} = b_0 + b_1 (\Delta L_{i,t-1} / A_{i,t-1}) + b_2 CA_{i,t-1} + b_3 y_t + b_4 rSBI_{t-1} + b_5 NPL_t \quad (8)$$

Hasil estimasi menunjukkan bahwa koefisien rasio modal bank dalam rekap memiliki hubungan yang positif dan signifikan, sedangkan untuk bank-bank non-rekap koefisiennya menjadi tidak signifikan. Hubungan tersebut dapat diartikan bahwa permasalahan modal sebagai kendala

<sup>5</sup> Data NPLs untuk individual bank sebelum krisis tidak tersedia.

dalam penyaluran kredit, hanya dihadapi oleh bank dalam proses rekap. Sementara koefisien rasio NPLs terhadap total kredit memiliki koefisien yang negatif dan signifikan baik pada bank rekap maupun bank non rekap. Hubungan yang negatif tersebut menunjukkan semakin tinggi rasio NPLs semakin mengurangi jumlah kredit yang disalurkan oleh kedua kelompok bank. Kondisi ini menunjukkan faktor penawaran masih mempengaruhi penyaluran kredit oleh kedua kelompok bank tersebut.

Tabel 4.3 Hasil Regresi Panel, Jan 97 - Des 99,  
Bank Dalam Rekap vs non-Rekap

Variabel	Bank rekap	Bank non-rekap	Semua bank
Konstanta	0.001 (1.66)	0.024 (7.04)	0.02 (6.29)
$\Delta Li_{i,t-1}/Ai_{i,t-1}$	-0.091 (-2.90)	0.033 (1.77)	0.02 (0.98)
CA <sub>t-1</sub>	0.033 (2.98)	0.013 (1.43)	0.02 (2.55)
GDP growth	0.235 (2.31)	0.296 (4.34)	0.23 (4.06)
r SBI	0.014 (-1.19)	-0.044 (-5.69)	-0.03 (-4.45)
NPL t-1	-0.049 (-7.06)	-0.044 (-8.55)	-0.04 (-9.22)

Angka dalam tanda ( ) adalah t-ratio.

Dilihat dari sisi permintaan, koefisien pertumbuhan ekonomi menunjukkan nilai yang positif dan signifikan. Kelompok bank rekap memiliki signifikansi pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dibandingkan dengan kelompok bank non rekap. Fenomena yang dimiliki oleh bank rekap, yang memiliki koefisien variabel rasio modal dan NPLs yang signifikan, sedangkan signifikansi koefisien pertumbuhan ekonomi rendah mengimplikasikan bahwa faktor penawaran (supply) lebih menentukan dalam pertumbuhan kredit mereka.

Temuan lain yang menarik dari regresi panel data kedua kelompok bank adalah koefisien suku bunga SBI yang dimiliki oleh kelompok bank dalam proses rekap sangat kecil dan tidak signifikan secara statistik dalam mempengaruhi pertumbuhan kredit. Sebaliknya untuk bank non rekap yang memiliki rasio modal besar koefisien variabel kebijakan moneter ini secara signifikan mempengaruhi pertumbuhan kredit. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan moneter menjadi tidak efektif dalam mempengaruhi kredit perbankan, terutama untuk bank-bank rekap yang memiliki rasio modal kecil. Mengingat pangsa aset kelompok bank ini relatif besar terhadap perekonomian, pemblokiran jalur transmisi ini secara agregat menurunkan efektivitas kebijakan moneter.

---

## Bab 5

# Kajian Penawaran Kredit: Hasil Survei Perbankan

Dalam pembahasan sebelumnya, telah disajikan adanya fenomena credit crunch melalui kajian empiris. Untuk mengkonfirmasi kajian empiris tersebut, studi ini melakukan survei pada perbankan untuk mengetahui apakah memang faktor-faktor penawaran yang menjadi penyebab menurunnya kredit. Survei dilakukan pada 20 bank yang memiliki karakteristik sebagai berikut: (i) rata-rata aset mendekati 90% dari total aset seluruh bank, (ii) rata-rata kredit mendekati 70% dari total outstanding kredit perbankan, (iii) rata-rata dana pihak ketiga masing-masing sebesar 80% dan 70% dari total dana pihak ketiga perbankan.

Pertanyaan dalam survei disusun untuk dapat memberikan informasi berbagai macam mekanisme yang dapat menyebabkan terjadinya credit crunch, seperti persoalan yang dihadapi bank sejak krisis, kemungkinan terjadinya persoalan adverse selection, dan preferensi bank terhadap likuiditas (liquidity preference).

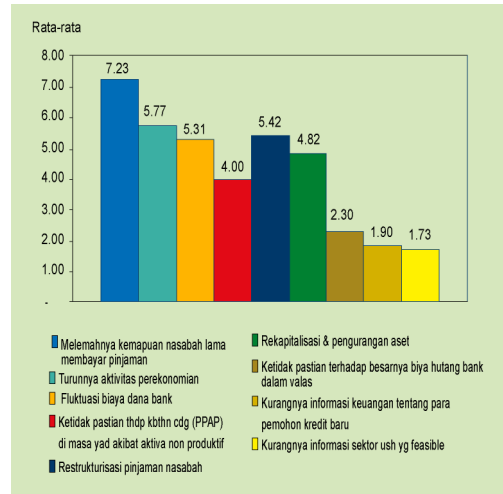
Analisa hasil survei dilakukan dengan memberikan nilai tertinggi pada jawaban yang menjadi prioritas utama dan nilai terendah pada jawaban dengan prioritas terakhir. Nilai tersebut kemudian dirata-rata dari seluruh sampel yang masuk. Rata-rata tertinggi menunjukkan jawaban tersebut adalah prioritas/urutan yang menurut responden sampel merupakan yang paling utama. Selain itu, analisa juga dilakukan dengan menghitung prosentase responden untuk suatu pertanyaan tertentu. Kuisisioner secara lengkap dari survei ini disajikan dalam Lampiran 1.

Dari jawaban hasil survei yang masuk yaitu 13 bank, ditemukan beberapa hal penting berkaitan dengan penyaluran kredit yang mendukung terjadinya credit crunch yaitu :

- Persetujuan atau penolakan kredit oleh bank umum lebih tergantung pada informasi mengenai calon debitur daripada jenis proyek yang diajukan untuk diberi kredit.
- Dalam melakukan penolakan, bank tidak mempertimbangkan suku bunga sebagai faktor penentu

(non-price credit rationing). Kurangnya informasi baik mengenai debitur maupun sektor yang feasible menjadi salah satu faktor penentu dalam penyaluran kredit bank.

- Dewasa ini terjadi perubahan preferensi bank dalam portofolio penanaman dananya. Bank cenderung untuk memegang aset yang likuid dan relatif kurang berisiko, seperti SBI, obligasi pemerintah dan penanaman di pasar uang antar bank. Bank sangat memperhatikan biaya hutang dan cenderung untuk mengurangi aset mereka daripada memberikan kredit baru. Bank juga peduli akan kebutuhan dana untuk rekapitalisasi dan restrukturisasi.



Grafik 5.1.  
Permasalahan Bank

## PERMASALAHAN BANK SEJAK MASA KRISIS

Berdasarkan nilai rata-rata yang diolah terhadap pertanyaan mengenai permasalahan utama yang dihadapi bank, melemahnya kemampuan nasabah lama untuk membayar pinjaman memiliki nilai paling besar yaitu 7,23 dari nilai maksimum sebesar 9 (Grafik 5.1).

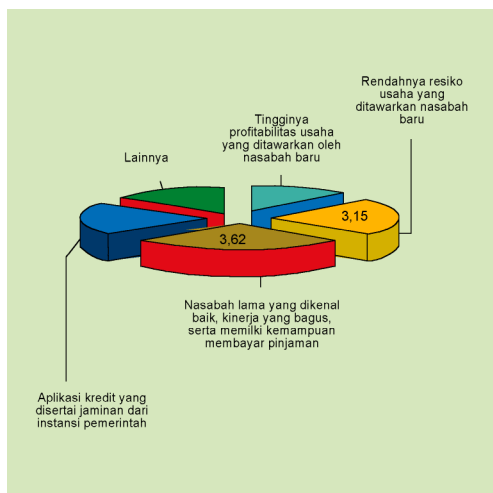
Nilai tersebut dapat diartikan melemahnya kemampuan membayar debitur menjadi permasalahan utama bagi perbankan. Responden yang menempatkan masalah ini sebagai masalah utama sebanyak 70% responden. Masalah ini dihadapi bank khususnya sejak masa krisis yang mengakibatkan memburuknya kondisi dunia usaha sehingga mengganggu keuangan perusahaan, yang sebagian besar juga adalah debitur bank. Situasi politik yang tidak menentu yang mengakibatkan tingginya risiko usaha semakin memperburuk aktivitas usaha sehingga melemahkan kemampuan keuangan perusahaan. Memburuknya kondisi keuangan perusahaan, khususnya yang menjadi debitur, menyebabkan kualitas kredit yang dimiliki bank juga memburuk.

Permasalahan lain yang dihadapi bank adalah turunnya aktivitas perekonomian dan restrukturisasi pinjaman nasabah yang berjalan lambat. Perekonomian yang belum sepenuhnya pulih menyebabkan menurunnya aktivitas dunia usaha sehingga debitur bank mengurangi aktivitas usahanya yang pada gilirannya dapat menurunkan permohonan kreditnya kepada bank. Sementara itu, lambatnya restrukturisasi pinjaman debitur menyebabkan bank sulit untuk menemukan debitur yang layak.

Selain permasalahan di atas, bank juga menghadapi beberapa permasalahan konsolidasi internal dalam rangka memenuhi ketentuan prudential banking yang telah ditetapkan. Beberapa ketentuan yang dianggap menjadi kendala, khususnya dalam hal penyaluran kredit oleh bank adalah ketentuan Capital Adequacy Ratio (CAR), Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan juga Giro Wajib Minimum (GWM)<sup>6</sup>.

## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN KREDIT

Memburuknya kualitas kredit debitur menyebabkan terjadinya perubahan perilaku bank dalam penyaluran kreditnya yang tercermin dari keputusan bank untuk menyetujui atau menolak



Grafik 5.2.

### Faktor Persetujuan Kredit

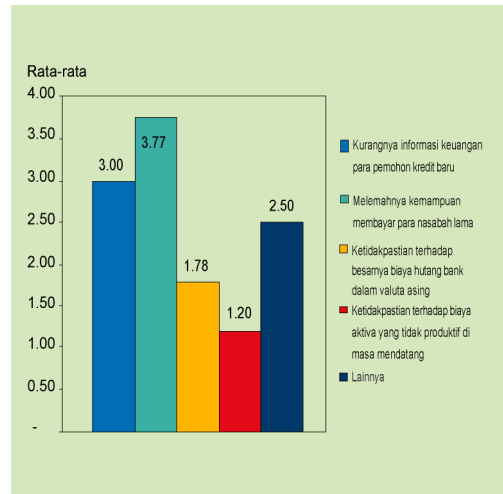
permohonan kredit. Dalam hal persetujuan kredit, nilai tertinggi dari rata-rata jawaban yang diberikan yaitu 3,62 dari nilai maksimum 5 (Grafik 5.2.) menunjukkan bahwa keputusan bank untuk memberikan kredit tergantung pada lamanya perusahaan/debitur menjadi nasabah kredit, kinerja perusahaan dan memiliki kemampuan membayar jaminan. Dilihat dari persentase sampelnya, 70% responden bank menjadikan alasan ini sebagai pertimbangan utama utama dalam keputusan kredit mereka. Faktor lain yang ikut dipertimbangkan

<sup>6</sup> Lihat Struktur Pembentukan Suku Bunga Dari Sisi Perbankan untuk Menunjang Efektivitas Kebijakan Moneter. Program kerja Goal Tahun 2000, Bagian SPPK-DKM

dalam memutus kredit adalah rendahnya risiko usaha dari calon debitur. Sementara profitabilitas calon debitur, yang umumnya menjadi faktor utama dalam persetujuan kredit malah menjadi faktor terakhir dalam pertimbangan pemberian kredit.

Dari sisi penolakan kredit, sebanyak 77% responden menjawab bahwa faktor utama yang dipertimbangkan dalam penolakan kredit adalah kemampuan membayar nasabah lama yang melemah, yang juga tercermin dari paling besarnya nilai rata-rata terhadap jawaban ini yaitu sebesar 3,77 dari nilai maksimum 5 (Grafik 5.3).

Hal ini juga didukung dari jawaban seluruh responden bank yang melakukan penolakan terhadap permohonan kredit yang diajukan oleh nasabah baru. Semakin baik bank mengenal debitur semakin kecil kemungkinan penolakan pengajuan kredit. Fenomena ini mengimplikasikan adanya sikap risk averse bank terhadap permohonan kredit baru.

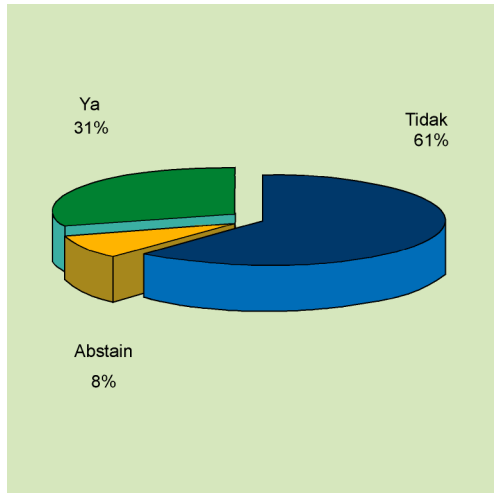


Grafik 5.3.  
Faktor Penolakan Kredit

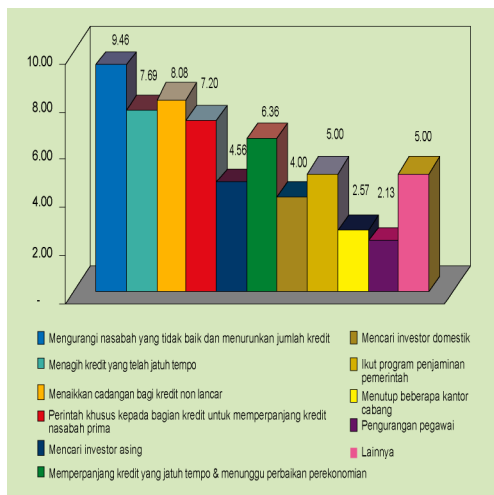
Fenomena bahwa persetujuan atau penolakan kredit oleh bank yang didasarkan pada informasi calon debitur, khususnya nasabah lama yang memiliki hubungan baik, menunjukkan adanya indikasi bahwa faktor-faktor non-price lebih penting dalam keputusan penyaluran kredit. Selain itu, penilaian bank terhadap calon debitur baru yang didasarkan pada perilaku debitur lamanya menunjukkan adanya persoalan informasi yang asimetri. Bank dalam hal ini melakukan 'averaging' kualitas nasabah.

Masalah informasi yang asimetri ini dapat diminimasi dengan menyediakan informasi mengenai kualitas debitur secara lengkap. Non-price credit rationing yang dilakukan oleh bank dalam mengantisipasi terjadinya adverse selection dalam mengambil keputusan memberikan kredit juga tercermin dari 100% responden yang menyatakan bahwa mereka tidak akan menerima permohonan kredit yang ditolak, meskipun debitur setuju untuk membayar dengan suku bunga yang lebih tinggi

dan atau dengan jangka waktu yang lebih pendek. Bank juga yakin bahwa permohonan debitur yang mereka tolak tidak akan diterima oleh lembaga keuangan lainnya (Grafik 5.4).



Grafik.5.4  
Apakah Menurut Anda Calon Nasabah yang Ditolak Kreditnya akan Diterima Bank Lain?



Grafik 5.5.  
Kebijakan Bank Dalam Masa Krisis

## KEBIJAKAN PEMBERIAN KREDIT BANK SEJAK MASA KRISIS

Dari hasil survei ditemukan bahwa dalam rangka mengatasi krisis yang terjadi, 85% responden bank melakukan kebijakan perkreditan yaitu mengurangi nasabah yang tidak baik dan mengurangi pemberian kredit yang terlihat pada nilai rata-rata jawaban paling tinggi sebesar 9,46 dari nilai maksimum 11 (Grafik 5.5). Selain itu, kebijakan lainnya adalah meningkatkan cadangan penghapusan untuk kredit yang non lancar yang memberi konsekuensi menurunnya keuntungan bank, menagih kredit yang telah jatuh tempo untuk meminimalkan kerugian dan juga melakukan perpanjangan kredit khususnya kepada nasabah prima yang mereka miliki.

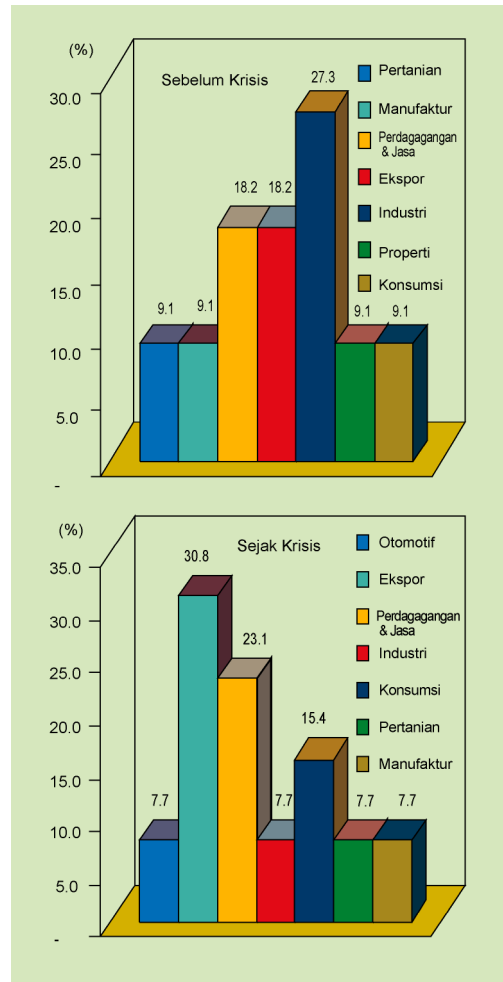
Krisis yang melanda dan adanya kebijakan kredit bank yang lebih ketat dalam menyalurkan dananya memberi implikasi menurunnya outstanding kredit yang dimiliki oleh bank. Sebanyak 70% responden menyatakan bahwa sejak Juli 1997 mereka mengalami penurunan kredit yang mereka miliki lebih dari 20% rata-rata

outstanding kredit sebelum krisis. Dilihat dari jumlah nasabahnya, 54% responden menyatakan bahwa jumlah nasabah yang mereka miliki juga berkurang sebesar lebih dari 20% rata-rata periode sebelum krisis.

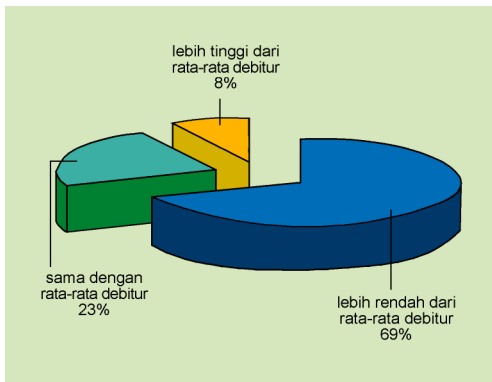
Menurut pendapat perbankan, sektor ekonomi yang paling terpuruk akibat kesulitan penyaluran kredit adalah sektor properti, importir dan lembaga keuangan lainnya yang selama ini sangat tergantung pada dana perbankan. Sebelum masa krisis, sektor industri merupakan sektor berpeluang besar bagi perbankan untuk menghasilkan keuntungan dalam penyaluran kredit. Sementara sejak krisis hingga sekarang, sektor yang memiliki peluang memberi keuntungan bagi perbankan adalah sektor ekspor (grafik 5.6). Dilihat dari risikonya, 69% responden menyatakan ekportir relatif memiliki risiko yang lebih rendah dibanding dengan debitur lainnya.

Dalam hal penilaian risiko kredit, faktor utama yang dipertimbangkan bank responden baik sebelum krisis maupun setelah krisis adalah pembayaran kredit oleh debitur. Sepanjang calon debitur dapat menjamin pembayaran kredit melalui penjualannya maka risiko kredit debitur tersebut akan dinilai rendah. Faktor lainnya yang juga dipertimbangkan adalah rasio hutang terhadap modal (leverage), agunan yang dimiliki dan pertumbuhan penjualan usaha calon debitur.

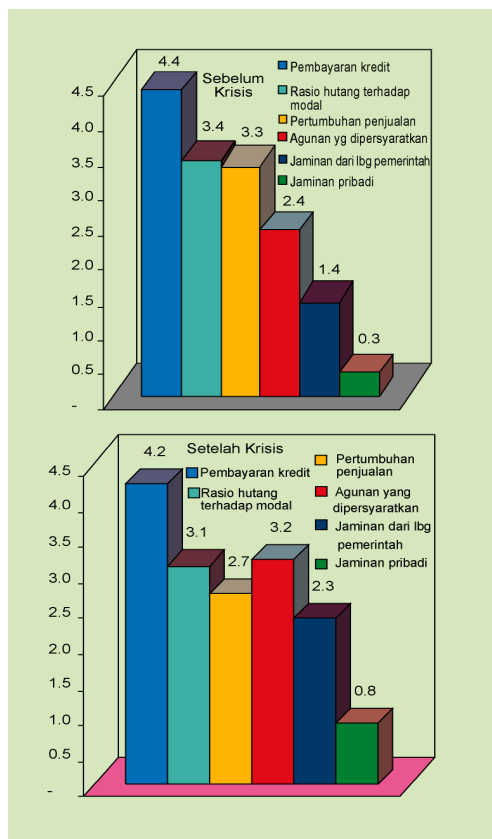
Dari evaluasi yang dilakukan bank responden terhadap kondisi usaha dan kualitas kredit para nasabahnya, kredit usaha kecil (KUK) memiliki kondisi usaha yang lebih baik



Grafik 5.6.  
Sektor Yang Menguntungkan Bagi Perbankan



Grafik 5.7.  
Penilaian Risiko Kredit Kepada Eksportir



Grafik 5.8.  
Faktor-Faktor Risiko

dibandingkan dengan usaha menengah (yaitu dengan aset Rp 1-5 miliar) dan usaha besar (dengan aset di atas Rp 5 miliar) (Grafik 5.9). Meskipun usaha kecil cenderung lebih memiliki kualitas kredit yang lebih baik, bank masih enggan untuk menyalurkan dananya secara besar-besaran kepada usaha kecil. Hal ini disebabkan bank masih berpandangan administrasi terhadap usaha kecil sangat rumit dan memerlukan biaya yang tinggi.

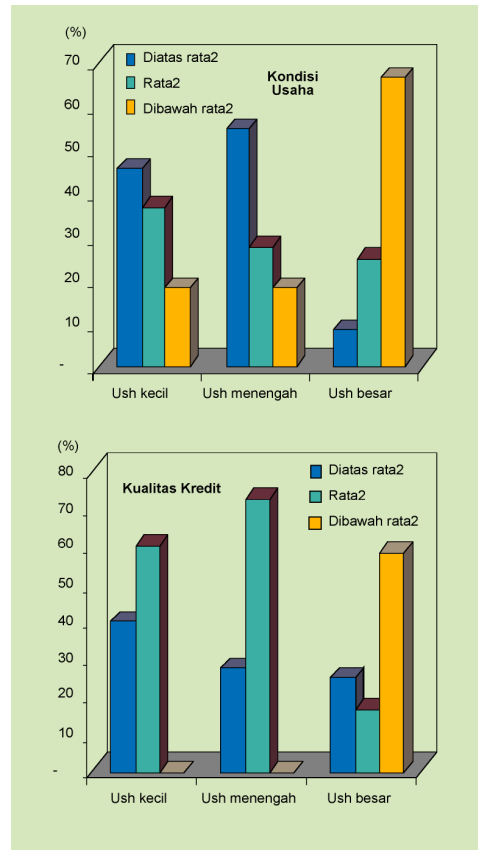
Bank responden berpandangan bahwa dalam rangka memperbaiki perkreditan di Indonesia perlu diprioritaskan upaya stabilitas nilai tukar sehingga dapat mendorong iklim usaha yang kondusif. Selain itu pertumbuhan ekonomi yang tinggi, restrukturisasi hutang debitur, dan penyediaan informasi yang lengkap mengenai usaha dan sektor yang potensial untuk dibiayai juga perlu diupayakan oleh pemerintah. Bank juga menyatakan diperlukan suatu stimulus dalam penyaluran kredit seperti adanya skim penjaminan oleh pemerintah dalam hal kredit dan skim pembiayaan baik oleh domestik maupun asing sebagai instrumen kredit.

Dari sisi nasabah, faktor-faktor yang dianggap menghambat penyaluran kredit

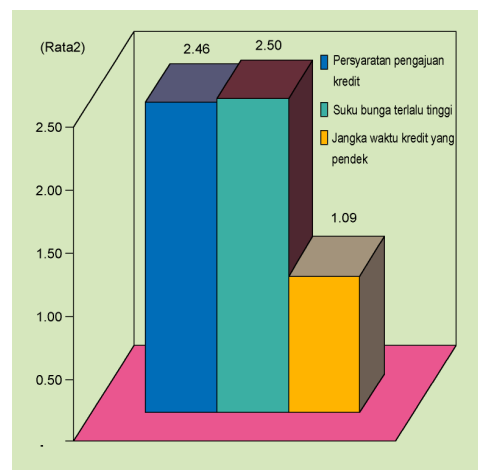
dan sering dikomplain kepada bank adalah suku bunga yang terlalu tinggi dan persyaratan untuk pengajuan kredit yang dianggap terlalu berat. Sebanyak 60% responden dengan nilai rata-rata sebesar 2,5 menyatakan faktor utama keluhan debitur adalah suku bunga yang tinggi (Grafik 5.10).

## PREFERENSI TERHADAP LIKUIDITAS

Masih tingginya ketidakpastian, ditengah situasi politik yang belum stabil, dan masih berlangsungnya proses konsolidasi internal perbankan dalam rangka memenuhi berbagai ketentuan prudensial Bank Indonesia menyebabkan penyaluran kredit perbankan belum pulih sebagaimana kondisi sebelum krisis. Kondisi ini pada gilirannya mengakibatkan terjadinya perubahan preferensi bank dalam penempatan dananya. Sebanyak 85% responden memiliki preferensi untuk menempatkan kelebihan dananya dalam bentuk obligasi pemerintah dan Sertifikat Bank Indonesia, masing-masing dengan nilai rata-rata sebesar 7,9 dan 6,3 dari nilai maksimum 9 (Grafik 5.11). Selain pada kedua aset yang bebas risiko tersebut, bank cenderung untuk menempatkan dananya dalam jangka waktu yang sangat pendek yaitu antar bank



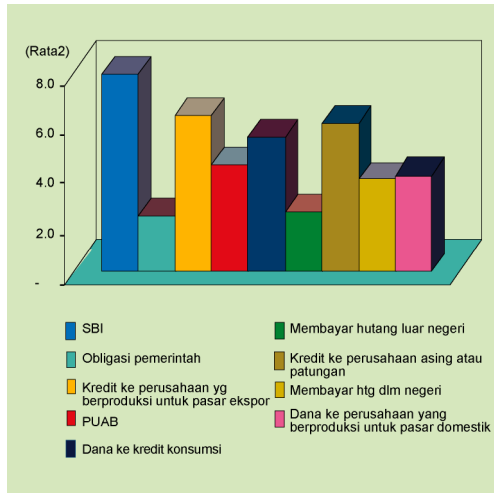
Grafik 5.9.  
Kondisi dan Kualitas Kredit



Grafik 5.10.  
Keluhan Debitur

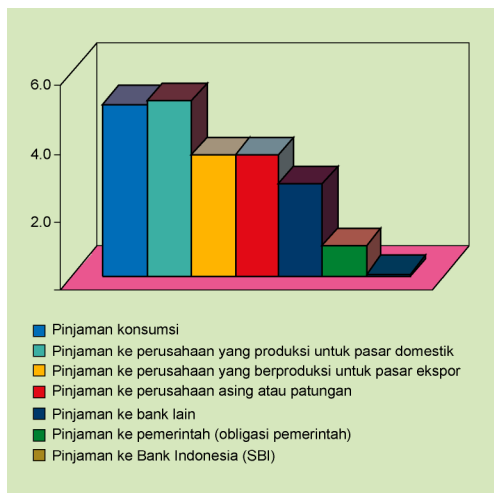
(PUAB). Hal ini terjadi karena tingginya risiko usaha di sektor riil yang menyebabkan bank cenderung untuk memegang aset yang likuid.

Bank menilai kredit kepada perusahaan masih memiliki risiko yang tinggi. Kredit



Grafik 5.11.

### Preferensi Bank Dalam Penempatan Dana



Grafik 5.12

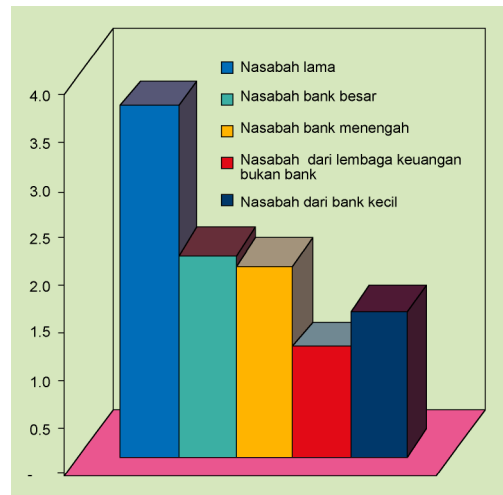
### Risiko Aktivitas Penempatan Dana

kepada perusahaan yang berorientasi domestik dan kredit konsumsi merupakan jenis penempatan yang dianggap memiliki risiko yang paling tinggi, yang tercermin dari tingginya nilai rata-ratanya masing-masing sebesar 5,2 dan 5,1 (Grafik 5.12).

Dewasa ini penyaluran kredit yang dilakukan oleh bank sebagian besar merupakan perpanjangan dari kredit yang lalu. Sebagian besar debitur yang menerima kredit baru tersebut adalah nasabah lama dari bank tersebut. Selanjutnya bank memberikan kredit baru kepada nasabah yang berasal dari bank-bank besar. Keputusan bank untuk memberikan kredit baru sebagian besar ditentukan oleh kemampuan membayar calon debitur.

Penurunan outstanding kredit perbankan sebagian besar disebabkan oleh pengalihan kredit kepada AMU/BPPN dalam rangka restrukturisasi kredit. Berdasarkan pertanyaan dalam kuesioner, permasalahan yang dihadapi bank dalam melakukan restrukturisasi kredit adalah masalah informasi debitur seperti cash flow, neraca dll yang tidak

memadai. Terjadinya perubahan preferensi bank pada aset yang aman dan likuid, yang diperburuk dengan ketidaksempurnaan informasi semakin memperkuat adanya fenomena credit crunch.



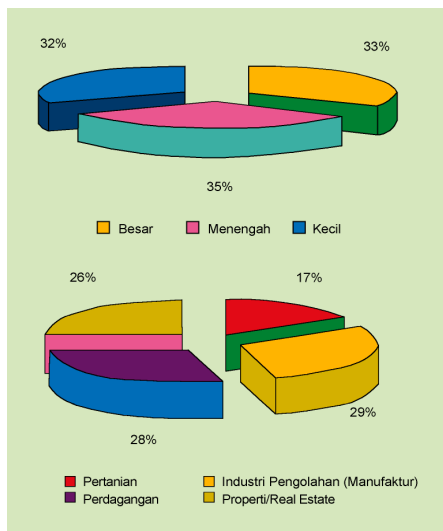
Grafik 5.13.

Permohonan Kredit yang Disetujui

## Bab 6

# Permintaan Kredit Dunia Usaha: Hasil Survei Pada Perusahaan

Pada bab sebelumnya, hasil survei kepada bank mengindikasikan bahwa terdapat keengganan bank untuk menyalurkan kredit kepada perusahaan akibat masih adanya beberapa masalah yang dihadapi bank seperti masalah informasi debitur, pemenuhan ketentuan kehati-hatian perbankan dan masih tingginya risiko dunia usaha. Temuan tersebut menunjukkan bahwa penurunan kredit pada masa krisis dan perlambatan pertumbuhannya yang saat ini masih berlangsung, lebih didorong oleh faktor penawaran kredit yaitu dari sisi bank selaku pemberi kredit. Untuk memperoleh hasil yang obyektif, penelitian ini juga melakukan survei dari sisi permintaan kredit, yaitu dari sudut pandang perusahaan sebagai pihak yang memperoleh kredit.



Grafik 6.1.

Sektor dan Skala Usaha Responden

Survei dilakukan terhadap responden perusahaan yang masih mempunyai kredit dari perbankan, meliputi beberapa sektor yaitu pertanian; industri manufaktur; perdagangan, dan properti. Perusahaan-perusahaan yang disurvei juga dibagi dalam tiga skala usaha yaitu perusahaan besar, menengah, dan kecil. Survei diarahkan untuk memperoleh informasi kualitatif dari responden mengenai sumber pembiayaan usaha, akses kepada kredit perbankan, alternatif pembiayaan di masa krisis, dan preferensi perusahaan terhadap sumber pembiayaan dari bank.

## KARAKTERISTIK RESPONDEN PERUSAHAAN

Jumlah responden yang berhasil diwawancarai sebanyak 120 perusahaan dengan

rincian sebagai berikut: sektor pertanian sebanyak 17%, manufaktur 29%, perdagangan 28%, dan properti/real estate sebanyak 26%. Dilihat dari skala usahanya, sebanyak 35% responden merupakan perusahaan menengah, 33% perusahaan besar, dan sisanya 32% perusahaan kecil.

Sebagian besar responden telah beroperasi antara 10-30 tahun. Sebanyak 21% responden beroperasi kurang dari 10 tahun, sementara 4% beroperasi lebih dari 40 tahun. Hampir separuh responden merupakan perusahaan yang sudah terdaftar di bursa. Kegiatan usaha responden yang berorientasi pada usaha ekspor sebanyak 36% dari total responden, sedangkan sisanya berorientasi pada pasar domestik.

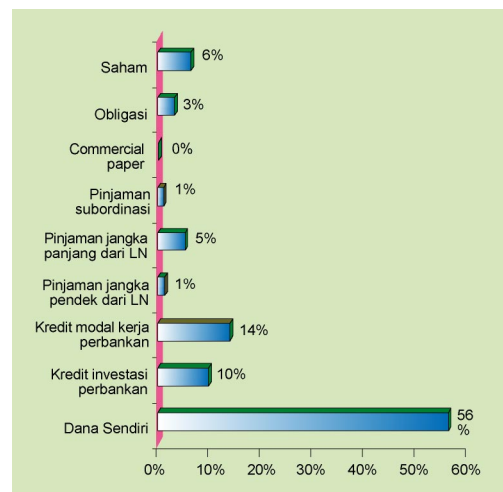
Sementara itu, sumber pengadaan bahan bakunya sebagian besar berasal dari dalam negeri. Hanya 7% responden yang seluruh bahan bakunya diimpor dari luar negeri.

### SUMBER PEMBIAYAAN USAHA RESPONDEN

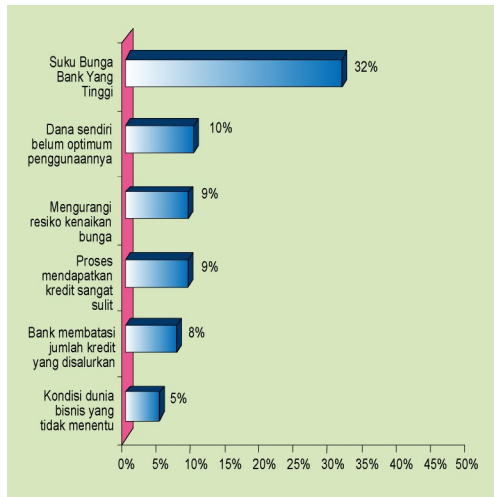
Dalam melakukan aktivitas usahanya responden menggunakan modal sendiri sebagai sumber pembiayaan utama, yaitu sebesar 56%. Porsi tersebut meningkat cukup tajam dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Sebagai contoh survei yang dilakukan sebelumnya



Grafik 6.2.  
Porsi Responden Yang Tercatat Di Bursa Dan Orientasi Usaha

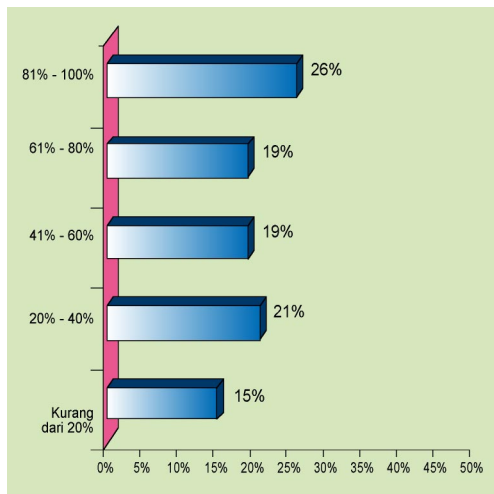


Grafik 6.3.  
Sumber Pembiayaan Responden



Grafik 6.4.

#### Alasan Penggunaan Dana Sendiri



Grafik 6.5.

#### Porsi Dana Sendiri dari Total Pembiayaan

oleh Dwor Frecaut et al. (1999), porsi dana sendiri yang digunakan sebagai sumber pembiayaan sekitar 40%. Sementara itu, sebagai sumber pembiayaan eksternal, kredit perbankan dalam negeri masih menjadi sumber yang utama walaupun porsinya menurun, yaitu sekitar 24% yang terdiri dari kredit modal kerja dan investasi masing-masing sebesar 14% dan 10%. Sementara itu, pasar modal menjadi sumber pembiayaan eksternal berikutnya, yaitu sekitar 8%.

Dari survei dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab meningkatnya penggunaan dana sendiri sebagai sumber pembiayaan utama adalah suku bunga kredit yang relatif tinggi, masih belum optimalnya penggunaan dana sendiri, prosedur kredit yang sulit, dan bank membatasi penyaluran kreditnya. Hal ini mencerminkan masih adanya pengaruh faktor penawaran yang menyebabkan turunnya permintaan kredit oleh perusahaan. Disamping itu, alasan suku bunga yang relatif tinggi mencerminkan ekspektasi pengusaha terhadap pergerakan suku bunga di masa yang akan datang. Fenomena ini terjadi pada seluruh skala

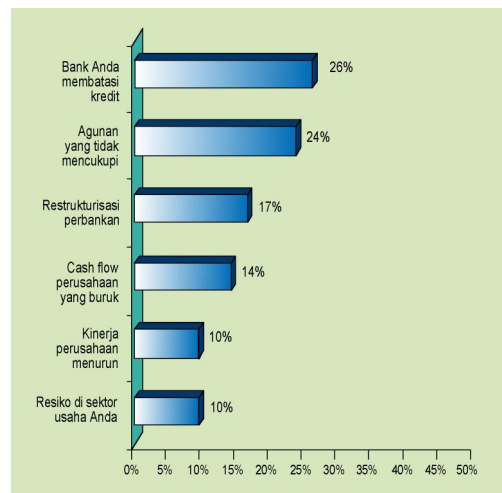
Dilihat dari porsinya, sebanyak 26% responden menggunakan dana sendiri dengan porsi berkisar 81% - 100% dari jumlah total pembiayaan. Sementara hanya 15% responden yang persentase dana sendirinya kurang dari 20%. Temuan ini sejalan dengan kondisi aktual di mana aktivitas kegiatan ekonomi secara agregat sebagian besar dibiayai dari self financing dunia usaha.

## AKSES PERUSAHAAN KEPADA KREDIT PERBANKAN

### Kemudahan Akses

Seiring dengan membaiknya kondisi perbankan, hasil survei menunjukkan bahwa dalam satu tahun terakhir responden tidak mengalami kesulitan untuk memperoleh kredit kepada perbankan. Sebanyak 65% responden tidak merasa kesulitan untuk memperoleh kredit dari bank, sementara 35% responden mengalami kesulitan. Dari responden yang mengalami kesulitan, diperoleh informasi bahwa terdapat beberapa faktor penyebab yaitu adanya pembatasan pemberian kredit oleh bank, agunan yang tidak mencukupi, cash flow perusahaan yang memburuk, kinerja perusahaan yang menurun, dan bank yang akan memberikan kredit masih dalam proses restrukturisasi.

Semakin besar skala usaha sebuah perusahaan, tingkat kesulitan untuk memperoleh kredit akan semakin bertambah yang tercermin dari semakin besarnya persentase responden yang menjawab (Tabel 6.1). Hal ini disebabkan perusahaan berskala besar umumnya memiliki tingkat leverage yang tinggi.



Grafik 6.6.  
Penyebab Kesulitan Memperoleh Kredit

Tabel 6.1.  
Akses Kredit Menurut Skala Usaha

Kesulitan Memperoleh Kredit	Total	Besar	Menengah	Kecil
	120	40	42	38
Ya	35%	45%	33%	26%
Tidak	63%	53%	64%	74%

Dilihat dari sektor usaha, perusahaan yang bergerak di sektor industri pengolahan (manufaktur) relatif lebih mudah untuk mendapatkan kredit bank dibandingkan dengan perusahaan yang bergerak di bidang pertanian, perdagangan dan properti/real estate. Sebanyak 71% dari responden yang bergerak di bidang industri pengolahan merasa tidak mengalami kesulitan dalam memperoleh kredit dari bank (Tabel 6.2)

Tabel 6.2.  
Akses Kredit Menurut Sektoral

Kesulitan Memperoleh Kredit	Total	Pertanian	Industri Pengolahan (Manufaktur)	Perdagangan	Properti/ Real Estate
	120	20	35	34	31
Ya	35%	45%	26%	32%	42%
Tidak	63%	55%	71%	65%	58%

Berdasarkan hasil uji tabulasi silang diperoleh informasi faktor penyebab sektor properti kesulitan untuk mendapatkan kredit adalah memburuknya kondisi cash flow perusahaan. Sedangkan untuk perusahaan dari sektor pertanian dan industri pengolahan mengalami kesulitan memperoleh kredit karena bank membatasi pengucuran kredit kepada kedua sektor tersebut.

#### Mengetatnya Persyaratan Kredit

Walaupun 65% responden mengatakan tidak mengalami kesulitan dalam memperoleh kredit, 76% responden menyatakan bank semakin memperketat persyaratan kredit yang ditawarkan,

khususnya berkaitan dengan agunan. Mengetatnya persyaratan kredit tersebut juga tercermin dari rendahnya fleksibilitas perbankan dalam negosiasi agunan dan suku bunga dalam satu tahun terakhir. Survei menunjukkan 63% responden menyatakan bahwa bank tidak fleksibel dalam bernegosiasi mengenai agunan. Sementara itu, sekitar separuh responden menyatakan bahwa bank tidak fleksibel dalam bernegosiasi mengenai suku bunga kredit. Mengetatnya persyaratan kredit ini bukan hanya dialami oleh nasabah baru, tetapi juga oleh perusahaan telah lama menjadi debitur bank (Tabel 6.3).

Tabel 6.3.  
Hubungan Responden dan Persyaratan Kredit.

Hubungan Dengan Bank Pemberi Kredit	Total	Ketat	Tidak Ketat
Total	120	91	29
Kurang dari 2 tahun	5%	100%	0%
2 sampai 5 tahun	14%	88%	12%
5 sampai 10 tahun	34%	73%	27%
lebih dari 10 tahun	47%	71%	29%

Keketatan dalam penentuan agunan ini paling dirasakan oleh responden di sektor pertanian yaitu sebanyak 70%, sedangkan sektor yang paling mendapat kelonggaran adalah sektor properti sebanyak 58%. Hal ini disebabkan properti dapat dijadikan sebagai barang jaminan.

Tabel 6.4.  
Fleksibilitas Bank Dalam Penentuan Agunan

Bank memberikan fleksibilitas dalam negosiasi agunan	Skala Usaha			Sektor Usaha				Total Responden
	Kecil	Menengah	Besar	Pertanian	Industri/Manufaktur	Perdagangan	Properti/Real Estate	
Jumlah responden	38	42	40	20	35	34	31	120
Ya	29%	38%	45%	30%	37%	38%	42%	38%
Tidak	71%	62%	55%	70%	63%	62%	58%	62%

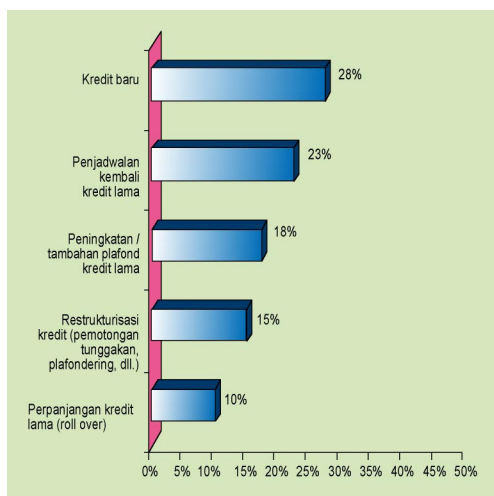
Dilihat dari skala usaha, semakin kecil skala usaha responden, semakin ketat penetapan agunan yang disyaratkan bank (Tabel 6.4). Hal ini sesuai dengan kenyataan yang terjadi, karena

umumnya debitur dengan skala usaha kecil tidak memiliki kekuatan tawar menawar dengan bank (power of bargain).

Sementara dalam hal penentuan tingkat suku bunga pinjaman, bank lebih memberikan fleksibilitas dalam negosiasi suku bunga pinjaman yang tercermin dari 56% jawaban responden. Menurut sektor usaha, terlihat bahwa sektor industri pengolahan (manufaktur) dan sektor properti/real estate merupakan sektor yang paling banyak mendapatkan kelonggaran tersebut, sedangkan sektor yang paling sedikit mendapatkan kelonggaran adalah sektor pertanian. Dilihat dari skala usaha, seluruh skala usaha memperoleh fleksibilitas dalam negosiasi penentuan suku bunga pinjaman dari bank (Tabel 6.5).

Tabel 6.5.  
Fleksibilitas Bank Dalam Penentuan Bunga Pinjaman

Bank memberikan fleksibilitas dalam negosiasi suku bunga pinjaman	Skala Usaha			Sektor Usaha				Total Responden
	Kecil	Menengah	Besar	Pertanian	Industri/Manufaktur	Perdagangan	Properti/Real Estate	
Jumlah responden	38	42	40	20	35	34	31	120
Ya	57%	55%	55%	40%	63%	53%	61%	56%
Tidak	43%	45%	45%	60%	37%	47%	39%	44%



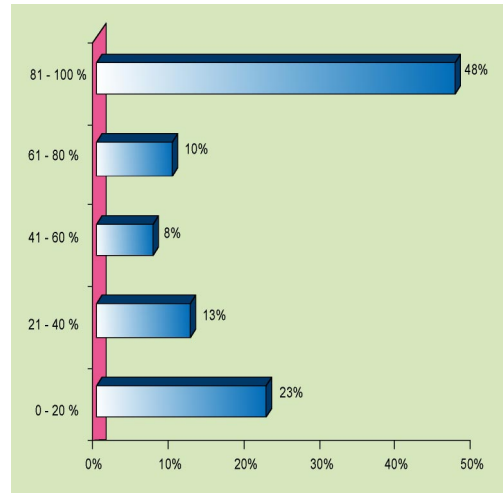
Grafik 6.7.  
Tujuan Pengajuan Kredit

### Pengajuan Kredit Setelah Krisis

Seperti yang telah dikemukakan di atas, setelah krisis terjadi peningkatan porsi dana sendiri yang digunakan sebagai sumber pembiayaan usaha. Akibatnya hanya sepertiga responden yang pernah melakukan akad kredit dengan perbankan. Dari responden yang pernah melakukan akad kredit, hanya 28% yang melakukan akad kredit baru, sedangkan sisanya dalam bentuk penjadwalan,

plafondering kredit lama, dan dalam rangka restrukturisasi kredit. (Grafik 6.7)

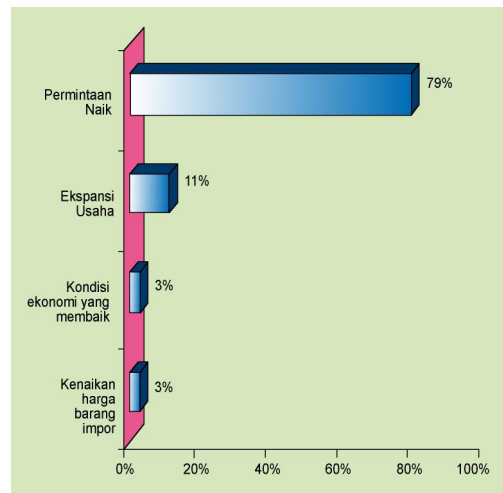
Dari responden yang mengajukan permohonan kredit, separuh responden menyatakan bahwa nilai kredit yang disetujui oleh bank mencapai 80%-100% dari nilai kredit yang diminta (Grafik 6.8). Kredit tersebut mayoritas diperoleh dari kelompok bank swasta nasional dan bank asing/campuran yang bukan menjadi afiliasi dari kelompok usahanya. Sebagian besar kategori kredit responden yang diperoleh dari bank adalah kredit modal kerja.



Grafik 6.8.  
Kredit Yang Disetujui

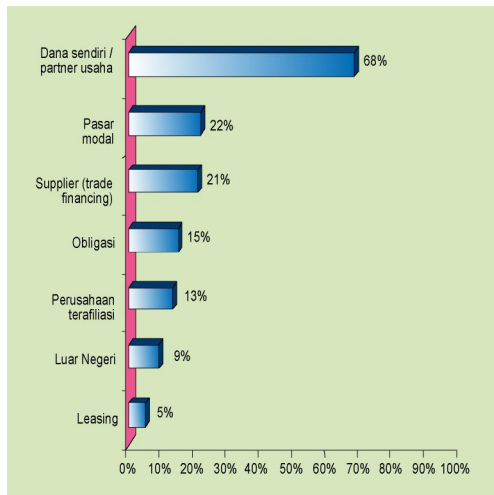
## INVESTASI USAHA DAN PEMBIAYAANNYA

Sejalan dengan mulai pulihnya perekonomian dua tahun terakhir ini, 60% responden mengatakan bahwa tingkat produksi dan penjualan mereka mengalami peningkatan. Penyebab dari kenaikan produksi tersebut sebagian besar berasal dari meningkatnya permintaan dan ekspansi usaha (Grafik 6.9.). Walaupun kenaikan produksi diakibatkan meningkatnya permintaan, hanya separuh responden yang akan melakukan ekspansi usaha/ investasi. Hal ini mengindikasikan masih adanya kapasitas produksi yang belum terpakai.



Grafik 6.9.  
Penyebab Kenaikan Produksi dan Penjualan

Dari responden yang akan melakukan investasi, sebagian besar pendanaan investasi bersumber dari dana sendiri, sedangkan dana eksternal berasal dari bank dan pasar modal. Hal ini

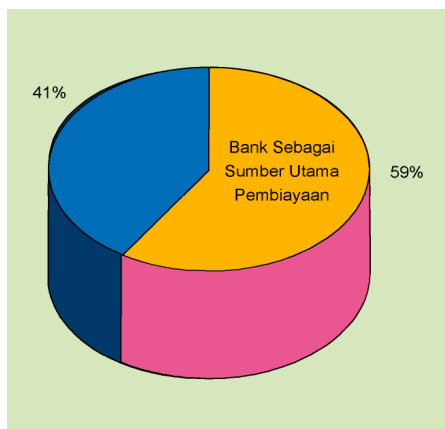


Grafik 6.10.  
Alternatif Sumber Pembiayaan  
non-Kredit

sejalan dengan sumber pembiayaan usaha yang telah dikemukakan di atas. Sementara itu, jika perusahaan mengalami kesulitan untuk memperoleh pembiayaan dari bank, terdapat alternatif sumber pembiayaan seperti dana sendiri, pasar modal, supplier, obligasi, perusahaan terafiliasi, luar negeri serta leasing.

Dilihat dari sektor usaha, sebagian besar responden pada tiap sektor usaha memanfaatkan dana sendiri sebagai alternatif utama sumber pembiayaan. Hal yang sama juga terjadi pada responden menurut besarnya skala usaha.

## PREFERENSI PERUSAHAAN TERHADAP SUMBER PEMBIAYAAN DARI BANK



Grafik 6.11.  
Preferensi Responden Terhadap Bank

Walaupun dari hasil survei ditemukan bahwa sebagian besar responden tidak pernah melakukan akad kredit setelah masa krisis, preferensi terhadap bank sebagai sumber pendanaan tidak mengalami perubahan. Sebanyak 59% responden masih mengharapkan bank sebagai sumber pembiayaan.

Dilihat dari sektor usaha, sektor pertanian merupakan sektor yang mengalami penurunan preferensi terhadap pembiayaan bank

yaitu sektor pertanian dan sektor properti. Sementara dilihat dari skala usaha, hanya responden dengan skala usaha besar yang mengalami penurunan preferensi. (Tabel 6.6).

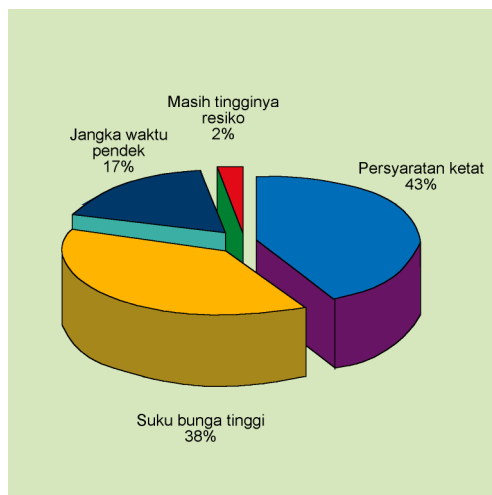
Tabel 6.6.  
Preferensi Menurut Sektor dan Skala Usaha

Penurunan preferensi thd sumber pembiayaan bank	Skala Usaha			Sektor Usaha				Total Responden
	Kecil	Menengah	Besar	Pertanian	Industri/ Maufaktur	Perdagangan	Properti/ Real Estate	
Jumlah responden	38	42	40	20	35	34	31	120
Ya	40%	33%	50%	50%	37%	35%	45%	41%
Tidak	60%	67%	50%	50%	63%	65%	55%	59%

Penurunan preferensi ini disebabkan oleh berbagai faktor antara lain ketatnya persyaratan bank seperti agunan dan prosedur untuk mengajukan kredit, tingginya suku bunga pinjaman, pendeknya jangka waktu kredit dan masih tingginya risiko karena belum pulihnya perekonomian.

#### Prospek Permintaan Kredit

Walaupun terdapat kesulitan dalam memperoleh sumber pembiayaan dari bank, dalam 2 tahun ke depan sebagian besar responden yaitu 53% masih berkeinginan dan merencanakan untuk mengajukan kredit ke bank, khususnya responden yang berorientasi ekspor. Responden yang paling banyak merencanakan mengajukan kredit adalah responden dengan skala usaha menengah sebesar 60%, kemudian skala besar 55% dan skala kecil 43%. Sedangkan ditinjau secara sektoral, sektor pertanian merupakan sektor yang paling banyak respondennya yang ingin mengajukan kredit



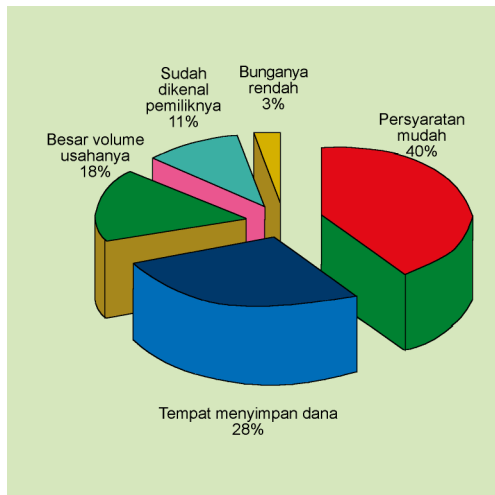
Grafik 6.12.  
Faktor Penyebab Menurunnya Preferensi Bank

65%, sektor industri/manufaktur dan sektor perdagangan sama sebesar 53%, dan sektor properti 45%.

Tabel 6.7.  
Rencana Pengajuan Kredit 2 Tahun ke Depan

Rencana Penjualan kredit dalam 2 tahun ke depan	Skala Usaha			Sektor Usaha				Total Responden
	Kecil	Menengah	Besar	Pertanian	Industri/ Maufaktur	Perdagangan	Properti/ Real Estate	
Jumlah responden	38	42	40	20	35	34	31	12
Kredit Modal Kerja	75%	72%	55%	54%	72%	83%	50%	67%
Kredit Investasi	25%	28%	45%	46%	28%	17%	50%	33%

Jenis kredit yang ingin diajukan dalam 2 tahun ke depan sebagian besar dalam bentuk kredit modal kerja sebesar 67%, sementara kredit investasi 33%. Hal ini menunjukkan masih adanya kekhawatiran terhadap prospek ekonomi dalam jangka panjang. Menurut skala usaha,



Grafik 6.13

Kategori Bank yang Dipilih Dalam Pengajuan Kredit

responden yang paling banyak akan mengajukan kredit modal kerja adalah responden skala usaha kecil 75%. Sedangkan responden yang paling banyak untuk mengajukan kredit investasi adalah responden dengan usaha berskala besar sebanyak 45%. Jika diamati menurut sektor usaha, maka sektor yang paling banyak merencanakan pengajuan kredit modal kerja adalah sektor perdagangan sebesar 83%, sedangkan untuk kredit investasi adalah sektor properti/real estate sebesar 50%.

Rencana responden untuk mengajukan kredit tertuju pada bank dengan kriteria memiliki

bunga rendah. Kriteria bank harus dikenal mengimplikasikan adanya informasi yang asimetri dalam keputusan pemberian kredit oleh bank.

Masih cukup tingginya preferensi terhadap kredit dari bank dan adanya rencana perusahaan 2 tahun mendatang untuk mengajukan kredit mencerminkan adanya permintaan kredit. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa fenomena menurunnya kredit lebih didorong oleh faktor penawaran dibanding faktor permintaan.

---

## Bab 7

# Implikasi Pada Kebijakan Moneter dan Perbankan

### IMPLIKASI PADA KEBIJAKAN MONETER

Credit crunch mempunyai implikasi yang sangat penting bagi kebijakan moneter, pertama implikasinya pada efektivitas kebijakan moneter terutama karena terjadinya pemblokiran jalur transmisi dari variabel moneter ke aktivitas perekonomian; kedua implikasinya pada penggunaan berbagai informasi moneter dalam operasional kebijakan moneter; ketiga bagaimana kebijakan moneter diarahkan agar credit crunch yang terjadi dapat dikurangi.

#### Efektivitas Kebijakan Moneter

Rendahnya keinginan perbankan dalam menyalurkan kredit terutama yang dipicu oleh faktor-faktor seperti adverse selection, risiko dunia usaha, rendahnya modal perbankan menyebabkan suku bunga bukan menjadi tolok ukur yang digunakan oleh perbankan dalam memberikan kredit kepada seorang debitur. Kondisi ini secara keseluruhan akan memblokir bekerjanya jalur transmisi kebijakan moneter baik yang melalui jalur suku bunga, jalur kredit dan jalur neraca.

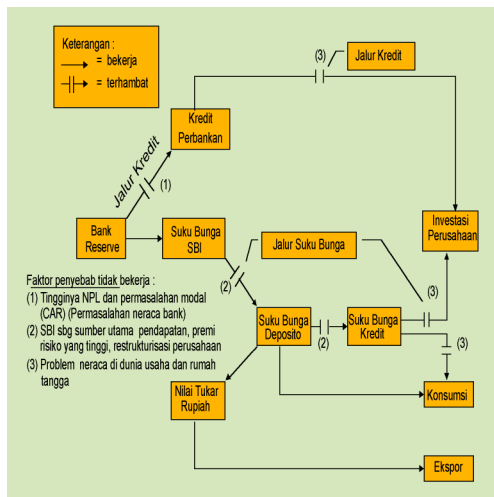
Jalur kredit jelas akan terhambat. Karena bank enggan memberikan kredit dengan berbagai sebab yang sudah dijelaskan, kebijakan moneter ekspansif yang meningkatkan cadangan bank tidak digunakan untuk meningkatkan portofolio kredit. Seperti yang didiskusikan di atas, kelebihan likuiditas lebih banyak ditempatkan dalam aset-aset dengan risiko rendah terutama pada SBI. Karena pembiayaan sektor riil di Indonesia sebagian besar masih sangat tergantung pada pembiayaan dari bank karena masih belum berkembangnya alternatif pembiayaan lainnya seperti commercial papers dan corporate bonds, maka berhentinya kredit perbankan akan menekan investasi dan

konsumsi. Bagi negara-negara dimana pasar keuangannya lebih berkembang, dimana tingkat substitusi kredit perbankan dengan alternative pembiayaan lainnya relatif lebih sempurna, dampak credit crunch terhadap perekonomian tidak sebesar negara yang pasar keuangannya relatif kurang berkembang seperti di Indonesia.

Credit crunch bukan saja memutus jalur kredit terutama ketika ekspansi moneter, tetapi juga menghambat bekerjanya jalur sukubunga/uang beredar. Ekspansi moneter dari Bank Indonesia memang direspon positif oleh pasar dengan menurunnya suku bunga pasar uang dan suku bunga deposito seperti yang kita amati pergerakannya setelah krisis. Namun respon suku bunga deposito semakin tidak sensitif ketika portofolio aset perbankan mengalami pergeseran dari kredit menuju SBI dan di sisi lain deposito perbankan tidak memiliki saingan sebagai instrumen penyimpan kekayaan kecuali dengan aset riil seperti tanah atau bangunan. Dalam kondisi demikian, kebijakan moneter yang ketat yang ditandai dengan kenaikan suku bunga SBI tidak diikuti dengan kenaikan suku bunga deposito yang proporsional karena bank berusaha untuk mendapatkan margin dari kenaikan return surat berharga ini (Bank Indonesia, 2000).

Respon suku bunga kredit bahkan lebih lamban dibanding dengan respon suku bunga deposito, terutama ketika kebijakan moneter melonggar. Selain penyesuaian (adjustment) yang dilakukan oleh bank-bank setelah krisis untuk meningkatkan interest spread, pergeseran penawaran kredit juga menahan suku bunga berada pada tingkat yang tinggi sehingga berperan dalam lambatnya respon suku bunga kredit terhadap suku bunga pasar. Akibatnya transmisi melalui jalur suku bunga menjadi terhambat yang tercermin dari tidak efektifnya kebijakan moneter dalam menurunkan biaya modal. Melemahnya kondisi keuangan sejak krisis yang menurunkan kondisi keuangan perusahaan juga telah memperlemah transmisi kebijakan moneter melalui jalur neraca, terutama ketika kebijakan moneter bersifat ekspansif. Dalam kondisi lemahnya keuangan perusahaan, ekspansi moneter berupa turunnya suku bunga tidak serta merta akan meningkatkan investasi mereka. Perusahaan cenderung menggunakan kesempatan ini untuk melakukan berbagai langkah untuk merestrukturisasi kondisi keuangan mereka misalnya mengurangi tingkat leverage yang tinggi (deleveraging). Namun transmisi kebijakan moneter melalui neraca ini dapat bersifat asimetri, dalam arti bahwa transmisi melalui jalur neraca justru akan

menguat ketika kebijakan moneter bersifat kontraktif. Kebijakan yang kontraktif yang tercermin dari tingginya suku bunga bukan hanya meningkatkan biaya modal untuk investasi tetapi juga akan semakin memperburuk kualitas aset perusahaan, sehingga semakin memperbesar dampak kebijakan moneter



Gambar 1.

### Terhambatnya Transmisi Kebijakan Moneter akibat Credit Crunch

terutama sektor ekspor dan impor. Namun secara umum, turunnya efektivitas kebijakan moneter telah dapat dilihat dewasa ini. Pertanyaannya kemudian apakah credit crunch juga mempengaruhi efektivitas kebijakan moneter dalam jangka panjang. Jika credit crunch yang terjadi dewasa ini mempengaruhi perbankan secara permanen misalnya bank-bank menjadi risk-averse dalam memberikan kredit dibandingkan sebelumnya, maka dampak kebijakan moneter terhadap kredit perbankan menjadi lebih kecil. Ketidakpastian hubungan antara variabel kebijakan moneter dengan berbagai variabel keuangan dan sektor riil mempunyai implikasi pada operasional pengendalian moneter.

pada sektor riil, suatu fenomena yang sering disebut sebagai financial accelerator. Studi empiris yang dilakukan oleh Agung (2000) menunjukkan kemungkinan terjadinya fenomena ini. Implikasinya adalah dalam situasi dimana credit crunch terjadi, kebijakan moneter yang bersifat kontraktif harus dilakukan lebih berhati-hati.

Tentu saja, berbagai faktor yang sulit diisolir pengaruhnya ikut mempengaruhi fenomena penurunan kredit yang sangat tajam seperti ketidakpastian politik, ketidakpastian nilai tukar yang mempengaruhi tingkat risiko berbagai sektor

---

## Boks 2

### Transmisi Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter mempengaruhi aktivitas perekonomian melalui berbagai jalur transmisi, antara lain jalur suku-bunga/uang beredar (*interest/money channel*), jalur kredit (*credit channel*), jalur neraca (*balance sheet channel*), jalur nilai tukar (*exchange rate channel*).

Dalam jalur suku bunga atau uang beredar, bank tidak secara eksplisit berperanan. Peranan bank tidak lebih sebagai pencipta likuiditas (uang) di masyarakat melalui pemberian kredit atau pembelian surat-surat berharga dari masyarakat. Dalam kontraksi moneter, *reserve* perbankan berkurang sehingga kemampuan bank untuk menciptakan likuiditas (uang beredar) juga berkurang. Kalau tingkat harga tidak berubah secara fleksibel (*sticky*), uang beredar secara riil akan berkurang. Akibatnya, suku bunga jangka pendek meningkat dan melalui ekspektasi inflasi yang menurun dimasa datang, sukubunga riil jangka panjang juga akan meningkat. Pada gilirannya, kegiatan investasi menurun karena peningkatan biaya modal yang tercermin dari suku bunga riil jangka panjang yang meningkat.

Dalam jalur kredit, kebijakan moneter mempengaruhi permintaan agregat secara langsung melalui tersedianya kredit perbankan. Kebijakan moneter yang kontraktif, sebagai contoh, akan menurunkan suplai kredit perbankan karena menurunnya cadangan bank dan biaya dana yang menjadi mahal. Dengan asumsi bahwa mayoritas pendanaan investasi perusahaan berasal dari kredit perbankan (yaitu kredit perbankan tidak bersubstitusi sempurna dengan bentuk pendanaan lainnya, misalnya *commercial paper*, *corporate bonds*, dll), kebijakan moneter yang dapat mempengaruhi jumlah kredit perbankan secara langsung akan mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk melakukan investasi.

Jalur neraca perusahaan dalam transmisi kebijakan moneter bekerja melalui perubahan kondisi keuangan perusahaan. Sebagai contoh, kebijakan moneter yang ketat seperti yang tercermin dari meningkatnya suku bunga akan menurunkan nilai aset perusahaan dan *cash flow* perusahaan. Menurunnya nilai aset perusahaan akan mengurangi akses perusahaan terhadap dana dari luar yang pada gilirannya akan mengurangi kemampuan investasi.

## Stance Kebijakan Moneter

Credit crunch yang ditandai dengan pergeseran portfolio aset perbankan dari kredit kepada surat-surat berharga (terutama SBI) telah menyebabkan stance kebijakan moneter menjadi sulit dipahami. Seperti yang dapat diamati selama tahun 2000, indikator stance kebijakan moneter seperti yang tercermin dari pergerakan suku bunga dan base money seringkali memberikan signal yang agak kontradiktif.

Pertumbuhan base money sebesar 23,4% selama tahun 2000 menunjukkan bahwa stance kebijakan moneter relatif longgar, namun dengan merangkaknya suku bunga SBI hingga mencapai tingkat 14,53% pada akhir tahun 2000<sup>7</sup> dari 11,48% pada bulan Januari 2000 menunjukkan bahwa stance kebijakan moneter menunjukkan ke arah yang ketat. Di samping itu, tingkat suku bunga deposito riil menunjukkan arah yang sebaliknya. Pergerakan selama tahun 2000 menunjukkan bahwa suku bunga riil mengalami penurunan yang sangat tajam yakni dari sekitar 12% pada awal tahun 2000 menjadi hanya sekitar 2% pada akhir tahun.

## Indikator Dan Sasaran Kebijakan Moneter

Melemahnya dan ketidakpastian hubungan antara kebijakan moneter dan sektor riil berimplikasi bahwa penggunaan berbagai indikator moneter baik sebagai sasaran antara maupun sebagai variabel informasi menjadi sulit. Tidak berfungsinya suplai kredit perbankan mempengaruhi hubungan antara kredit dan perekonomian agregat. Penggunaan suku bunga sebagai target operasional juga perlu dikaji lebih mendalam terutama pada saat credit crunch berlangsung mengingat bahwa dalam kondisi credit crunch kriteria bank dalam memberikan kredit lebih pada faktor-faktor non harga (non price rationing) seperti kecukupan agunan, jalinan hubungan yang telah lama antara bank dan debitur, dsb. Oleh sebab itu perubahan suku bunga memberikan dampak yang kurang

---

<sup>7</sup> Pada akhir bulan Maret 2001, suku bunga SBI sudah mencapai 15.24%.

signifikan terhadap kredit dan aktivitas perekonomian dibandingkan ketika credit crunch tidak terjadi. Dengan melemahnya kandungan informasi berbagai variabel moneter, penggunaan sejumlah indikator moneter (broad based indicators) tampaknya lebih tepat dilakukan daripada sekedar mentargetkan satu variabel saja. Penggunaan sejumlah indikator dalam kebijakan moneter ini sejalan dengan perkembangan pasar keuangan melalui proses inovasi dan deregulasi yang mendorong terjadinya evolusi dalam transmisi kebijakan moneter. Oleh sebab itu penelitian mengenai kandungan informasi sejumlah indikator moneter/keuangan menjadi agenda penting dalam kebijakan moneter dalam jangka menengah.

Penggunaan sejumlah indikator moneter (bukan mentargetkan satu indikator moneter) ini seiring dengan kerangka kerja pentargetan inflasi. Secara implisit kerangka pentargetan inflasi mengakui kelemahan kerangka kerja dengan menggunakan sasaran antara terutama karena ketidakpastian hubungan antara sasaran antara dan sasaran akhir.

Implikasi selanjutnya adalah kebijakan moneter dengan menggunakan instrumen suku bunga perlu dilakukan secara berhati-hati mengingat bahwa kenaikan suku bunga akan memperburuk kondisi keuangan baik perusahaan maupun perbankan yang akhirnya meningkatkan derajat credit crunch yang terjadi.

### Stabilitas Nilai Tukar Rupiah

Masih tingginya risiko berusaha merupakan permasalahan mendasar yang menyebabkan kredit yang disalurkan ke sektor riil tersendat meskipun perbankan secara umum mengalami kondisi likuiditas yang cukup longgar. Tingginya faktor resiko tersebut telah mengurangi keinginan perbankan/perusahaan untuk menawarkan/mengajukan permohonan kredit. Dari perspektif perbankan, mereka menilai bahwa tingginya risiko berusaha hanya akan memperbesar potensi kegagalan pengembalian terhadap kredit yang disalurkan. Sementara dari perspektif pengusaha, mereka menilai lebih baik menunda rencana untuk melakukan ekspansi usaha ketimbang melakukannya namun menghadapi risiko kegagalan usaha yang sangat tinggi.

Banyak faktor yang mempengaruhi tingginya tingkat resiko ini. Pengusaha menilai hal ini juga disebabkan oleh perkembangan yang tidak menentu pada nilai tukar rupiah. Nilai tukar rupiah yang terus berfluktuasi dalam kisaran yang sangat lebar telah menyulitkan pengusaha dalam merencanakan kegiatan usahanya dan menentukan harga produksinya. Dari survei yang dilakukan terhadap pengusaha, mayoritas responden memilih stabilitas nilai tukar rupiah sebagai hal prioritas yang perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan penyaluran kredit ke sektor riil di Indonesia.

Implikasi penting dari informasi di atas adalah pentingnya menciptakan stabilitas nilai tukar dengan segera. Bagi pengusaha, nilai tukar rupiah yang stabil pada posisi tertentu lebih penting dibandingkan dengan nilai tukar yang terus berfluktuasi. Di samping berbagai kebijakan moneter yang telah ditempuh guna menstabilkan nilai tukar rupiah, kajian mengenai pembentukan mekanisme baru yang memberikan kepastian kurs terhadap pengusaha-pengusaha yang memang memerlukan dan memiliki underlying transaction dapat dipertimbangkan. Dalam hal ini pembentukan lembaga penjamin fluktuasi nilai tukar semacam Indonesia Debt Restructuring Agency (INDRA) bisa dikaji lebih lanjut.

## IMPLIKASI PADA KEBIJAKAN PERBANKAN

Credit crunch merupakan fenomena non-price credit rationing, sehingga adalah sulit untuk mengatasi persoalan ini dengan hanya melalui kebijakan moneter, melainkan memerlukan kebijakan yang bersifat mikro, baik pada perbankan maupun perusahaan.

### Mengatasi Persoalan Informasi Debitur Yang Feasibel

Persoalan utama dari credit crunch yang terjadi pasca krisis berakar pada persoalan informasi tentang debitur. Selain karena kondisi keuangan perusahaan secara umum melemah yang menyebabkan bank tidak dapat membedakan kualitas nasabah/calon nasabah, masalah ini juga akibat hilangnya atau paling tidak berkurang informasi debitur akibat ditutupnya dan merger-nya

sejumlah bank. Krisis ekonomi yang telah menyebabkan bangkrutnya sejumlah perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan besar yang menjadi satu grup dengan bank, telah mengharuskan bank-bank mulai melakukan menjalin hubungan dengan nasabah baru. Namun, mendapatkan nasabah baru dengan track record dan reputasi yang baik bukanlah hal yang mudah dalam kondisi dimana sebagian besar perusahaan mengalami kesulitan finansial. Walaupun bank cenderung untuk tetap menjalin hubungan dengan nasabah-nasabah lama yang masih dalam kondisi baik, namun karena sebagian besar manajemen perbankan umumnya mengalami pergantian mereka kehilangan informasi yang bersifat confidential tentang nasabah lama.

Disamping itu, penutupan dan merger-nya bank-bank juga menyebabkan hubungan antara nasabah dengan bank menjadi terputus. Merger yang dilakukan antar bank tidak menjamin bahwa track record dari nasabah sebelumnya secara efektif digunakan. Merger juga berarti bahwa terjadinya pergantian manajemen sehingga seperti disinggung di atas akan ada suatu learning process yang harus dilakukan oleh manajemen baru dalam menjalin hubungan dengan nasabah. Sekali lagi karena sifat dari hubungan nasabah-bank dalam pasar kredit bersifat jangka panjang. Spesialisasi bank dalam hal ini yang menjadikan kredit bank berbeda dengan instrumen lainnya seperti corporate bonds atau saham yang bersifat market based.

Implikasi penting dari persoalan informasi ini adalah bahwa pemerintah perlu memberikan guide mana debitur yang feasible mana yang tidak, selain memberikan gambaran sektoral yang prospektif. Selain sistem informasi debitur yang telah ada di BI, BPPN sebagai lembaga yang memegang informasi penting nasabah-nasabah besar dapat melakukan seleksi mana perusahaan yang masih layak diberi kredit mana yang tidak. Di Korea sebagai contoh, identifikasi 'bad risks' (perusahaan yang tidak layak kredit) dan 'good risks' (perusahaan yang layak kredit) dilakukan bersamaan dengan proses restrukturisasi kredit.

Domac dan Ferri (1999) menawarkan solusi dengan memberikan 'credit voucher' kepada nasabah yang prospektif sebagai bentuk 'jaminan' kualitas nasabah kredit yang dapat memberikan petunjuk kepada bank dalam keputusan memberikan kredit.

## Regulatory Forebearance

Persoalan internal yang mendasar yang menyebabkan menurunnya kredit yang disalurkan bank adalah masalah capital crunch dan masih relatif besarnya NPLs. Walaupun proses rekapitalisasi dan restrukturisasi perbankan sudah menunjukkan kemajuan yang berarti yang tercermin dari CAR yang meningkat dan rasio NPLs yang menurun, namun secara umum untuk mencapai kecukupan modal (CAR) yang disyaratkan sebesar 8% pada akhir tahun 2001 dan rasio NPLs sebesar 5% bukanlah hal yang mudah. Regulasi ini paling tidak akan mendorong bank-bank untuk melakukan pergeseran portfolionya dari kredit yang berisiko menjadi aset-aset yang bebas risiko seperti SBI dan obligasi pemerintah. Disamping itu, upaya bank untuk meningkatkan modal disetor dalam rangka pemenuhan CAR, pada tingkat tertentu menyebabkan bank mengurangi 'investasi'nya dalam modal informasi (Hellman, Murdoch and Stiglitz, 1999), artinya adanya insentif untuk mengurangi biaya yang dikeluarkan untuk mengumpulkan informasi (screening dan monitoring) terhadap nasabah dan calon nasabah.

Implikasi dari kondisi ini adalah perlunya pada tingkat tertentu melakukan regulatory forbearance dengan memperhatikan kondisi moral hazard yang dapat dilakukan oleh bank-bank karena hal ini. Dampak negatif yang dapat ditimbulkan adanya regulatory forbearance adalah masalah kredibilitas peraturan akibat penerapan kebijakan/peraturan yang tidak konsisten. Namun demikian, mengingat kembalinya fungsi intermediasi perbankan menjadi kunci pemulihan ekonomi dan efektivitas kebijakan moneter, maka costs and benefits dari regulatory forbearance tetap valid untuk dipertimbangkan, terutama untuk relaksasi terhadap ketentuan rasio NPLs. Pertama, dalam praktek regulasi perbankan internasional, rasio NPLs bukan merupakan bagian dari peraturan prudensial. Kedua, penerapan CAR dan rasio NPLs pada saat yang bersamaan dimana kondisi keuangan perbankan baru pulih merupakan suatu yang memberatkan.

Jika relaksasi terhadap CAR juga dilakukan, seharusnya tidak dilakukan dengan dasar kasus per kasus tetapi perlu melalui suatu 'objective rules', misalnya untuk mendorong penyaluran kredit kepada eksportir dan usaha kecil/menengah perhitungan bobot risiko untuk pinjaman ke

sektor ekspor serta sektor usaha kecil dan menengah mendapatkan bobot relatif kecil. Hal ini juga didukung dari hasil survei ke perbankan yang menyatakan bahwa sektor ekspor dan usaha kecil-menengah memiliki risiko yang relatif rendah.

### Jaminan Kredit Terutama Kepada SMEs

Dengan tingginya ketidakpastian, perbankan cenderung bersikap risk averse dalam menyalurkan kreditnya. Dalam kondisi ini, perbankan mengubah preferensinya dengan menanamkan dananya ke dalam bentuk yang dinilai aman seperti SBI maupun obligasi rekap ketimbang menempatkannya dalam bentuk kredit yang menurut persepsi bank memiliki risiko pengembalian yang jauh lebih kecil.

Implikasi dari kondisi ini adalah pentingnya memberikan jaminan kepada perbankan agar tidak ragu-ragu dalam menyalurkan dananya ke sektor riil. Dalam hal ini, salah satu alternatif yang dapat dipertimbangkan adalah dengan mengkaji pembentukan lembaga penjamin kredit, khususnya kepada usaha kecil dan yang berorientasi ekspor. Pemilihan usaha kecil dalam program penjaminan dilakukan dengan pertimbangan bahwa usaha kecil menyerap tenaga kerja cukup besar, memiliki daya tahan tinggi, dan dapat membantu pemerataan pendapatan penduduk. Sedangkan penjaminan kegiatan ekspor dilakukan guna memperluas pasar internasional, memperkuat neraca pembayaran, mendukung stabilitas nilai tukar, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Skema penjaminan ini memang dapat membawa dampak negatif berupa timbulnya moral hazard dan membawa konsekuensi kepada timbulnya biaya tambahan yang harus dipikul yang tentunya menjadi tidak populer di tengah sulitnya pemerintah menambal sulam defisit keuangannya. Namun, skema ini merupakan alternatif yang dapat digunakan untuk stimulus bagi perekonomian.

Skema usulan penjaminan kredit oleh pemerintah ini telah digunakan oleh beberapa negara dalam mengatasi keengganan bank memberikan kredit. Di Korea, misalnya, guna mengurangi dampak

krisis keuangan sekaligus untuk memberikan stimulus pada perekonomian, pada tahun 1998 pemerintah mengeluarkan program penjaminan khusus (*special guarantee program*) bagi usaha kecil dan menengah serta ekspor. Program ini dilaksanakan oleh Korean Credit Guarantee Fund.

### Moral Suasion Kepada Bank Untuk Memberikan Kredit: Pemerintah Sebagai Pemilik Mayoritas Perbankan Nasional

Enggannya bank-bank menyalurkan dananya ke sektor riil juga karena perilaku perbankan yang bertindak ekstra hati-hati (*risk averse*) dalam pemberian kreditnya ke dunia usaha terkait dengan trauma yang dialaminya pada saat terjadinya krisis serta tersedianya alternatif penanaman dana yang relatif lebih aman dan tidak memerlukan kegiatan administrasi yang rumit seperti SBI.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah, yang saat ini notabene adalah pemegang saham mayoritas perbankan di Indonesia, dapat mendorong pemberian kredit bank-bank tersebut melalui penyusunan kebijakan perkreditan. Namun demikian, guna menghindari praktik KKN, perlu diupayakan agar keterlibatan pemerintah hanya pada penyusunan kebijakan dan tidak sampai pada penetapan nasabah yang akan dibiayai. Dari sisi pengawasan bank, Bank Indonesia juga perlu memantau secara cermat realisasi RKAT dan *business plan* bank-bank yang telah disampaikan ke BI.

### Pengembangan Pasar Sekuritas Sebagai Alternatif Pembiayaan

Dalam jangka panjang, pengembangan pasar keuangan terutama *securities*, seperti *corporate bonds* perlu diupayakan. Instrumen ini dapat digunakan oleh bank-bank dalam penempatan dana yang bersifat ekspansif sehingga dapat berfungsi sebagai instrumen moneter. Disamping itu, karena instrumen hutang (*debt instrument*) ini bersifat *market based* (bukan *intermediate based* seperti kredit bank), pasar keuangan akan menjadi lebih transparan. Diversifikasi sumber pembiayaan menjadi isu penting mengingat ketergantungan ada sumber dana pada perbankan, menyebabkan perekonomian lebih rawan terhadap krisis

# Daftar Rujukan

- Agung, J. (1998). Financial Deregulation and Bank lending channel in Developing Countries: The case of Indonesia. *Asian Economic Journal*, Sep., 12(3), pp. 273-294.
- Agung, J. (2000). Financial Constraints, Firms' Investment and the Channel of Monetary Policy in Indonesia. *Applied Economics*.
- Bagian SPPK – DKM, Struktur Pembentukan Suku Bunga Dari Sisi Perbankan Untuk Menunjang Efektivitas Kebijakan Moneter, September 2000
- Bernanke, B. and Lown, C. (1991). The credit crunch. *Brooking Paper in Economic Activity*. February.
- Bernanke, B., Gertler, M. and Gilchrist, S. (1996). The Financial Accelerator and the Flight to Quality. *Review of Economics and Statistics*, Feb, pp.1-15.
- Ding, W., Domac, I, and Ferri, G. (1998). Is there a Credit Crunch in East Asia? *World Bank - Policy Research Working Paper Series*, No.1959.
- Domac, I, and Ferri, G. (1998). The Real Impact of Financial Shocks: Evidence from the Republic of Korea. *World Bank - Policy Research Working Paper Series*, No.2010.
- Gosh, A. and Gosh, S. (1998). East Asia in the Aftermath: Was there a crunch?. *IMF Working Paper* 1999/38.
- Kim, H.E. (1999). Was Credit Channel a Key Monetary Transmission Mechanism following the Recent Financial Crisis in the Republic of Korea? *World Bank - Policy Research Working Paper Series*, No.3003.
- Kliesen, K.L. and Tatom, J.A. (1992). The Recent Credit Crunch: The Neglected Dimensions. *Federal Reserve Bank of St Louis Economic Review*. September/October 1992.
- Pazarbasioglu, C. (1997). A Credit Crunch? Finland in the Aftermath of the Banking Crisis. *IMF Staff Paper*, Vol. 44, pp. 315-27.
- Stiglitz, J.E. and Weiss, A. (1981). Credit Rationing in Markets with Imperfect Information. *The American Economic Review*, Jun, pp. 393-410.

---

# Lampiran 1

## Kuesioner Survey Perilaku Perbankan Setelah Krisis

1. Apa permasalahan utama yang dihadapi bank Saudara sejak masa krisis ? Harap diisi dengan urutan prioritas (nomorurut 1 = sangat penting)

	Melemahnya kemampuan nasabah lama membayar pinjaman
	Turunnya aktivitas perekonomian
	Fluktuasi biaya dana bank
	Ketidakpastian terhadap kebutuhan cadangan (PPAP) di masa mendatang akibat aktiva yang tidak produktif .
	Restrukturisasi pinjaman nasabah
	Rekapitalisasi dan pengurangan aset
	Ketidakpastian terhadap besarnya biaya hutang bank dalam valas
	Kurangnya informasi keuangan tentang para pemohon kredit baru
	Kurangnya informasi sektor-sektor usaha yang feasible
	Lainnya (jelaskan) .....

2. Dalam rangka memberikan persetujuan kredit kepada nasabah lama dan baru pada tahun lalu, faktor-faktor apa yang menjadi pertimbangan bank dalam memberikan persetujuan terhadap aplikasi kredit ? (Harap diisi dengan urutan prioritas, nomorurut 1 = sangat penting)

	Tingginya profitabilitas usaha yang ditawarkan oleh nasabah baru
	Rendahnya resiko usaha yang ditawarkan nasabah baru
	Nasabah lama yang telah dikenal baik, kinerja yang bagus, serta memiliki kemampuan membayar pinjaman
	Aplikasi kredit yang disertai jaminan dari instansi pemerintah
	Lainnya (jelaskan) .....

3. Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam melakukan penolakan pemberian kredit baik kepada nasabah lama maupun baru pada tahun lalu adalah : (isi sesuai urutan prioritas, nomor urut 1 = sangat penting)

	Kurangnya informasi keuangan para pemohon kredit baru
	Melemahnya kemampuan membayar para nasabah lama
	Ketidakpastian terhadap besarnya biaya hutang bank dalam valas
	Ketidakpastian terhadap biaya aktiva yang tidak produktif di masa mendatang
	Lainnya (jelaskan) .....

4. Kategori para nasabah yang ditolak adalah sebagai berikut :  
(pilih salah satu)

	Nasabah baru
	Nasabah lama di bank Saudara telah lebih dari 1 tahun
	Nasabah lama di bank Saudara telah lebih dari 2 tahun
	Nasabah lama di bank Saudara telah lebih dari 5 tahun

5. Beberapa faktor yang menjadi keluhan para nasabah, urutkan sesuai peringkatnya :  
(nomor urut 1 = paling penting)

	Kondisi yang tidak mendukung untuk persetujuan kredit, karena ketatnya persyaratan pengajuan kredit, seperti agunan
	Suku bunga terlalu tinggi
	Jangka waktu kredit yang pendek
	Lainnya (jelaskan) .....

6. Bagi pemohon kredit yang ditolak, apabila mereka menerima suku bunga yang lebih tinggi, apakah lembaga keuangan lain akan memberikan pinjaman ?

	Ya
	Tidak

7. Bagaimana bank Saudara bereaksi terhadap krisis yang terjadi ? Harap diisi sesuai urutan prioritas (nomorurut 1 = paling utama).

	Kurangnya informasi keuangan para pemohon kredit baru
	Manajemen menginginkan untuk mengurangi nasabah yang tidak baik dan menurunkan jumlah kredit
	Menagih kredit-kredit yang telah jatuh tempo
	Menaikkan cadangan bagi kredit non lancar
	Memberikan perintah khusus kepada bagian kredit untuk memperpanjang kredit nasabah prima
	Mencari investor asing
	Memperpanjang kredit yang jatuh tempo dan menunggu perbaikan perekonomian
	Mencari investor domestik
	Ikut serta dalam program penjaminan pemerintah
	Menutup beberapa kantor cabang
	Melakukan pengurangan pegawai
	Lainnya (jelaskan) .....

8. Menurut pendapat Saudara, sektor ekonomi mana yang paling terpuruk karena adanya kesulitan penyaluran likuiditas. Harap diisi sesuai urutan keterpurukan (nomorurut 1 = paling terpuruk).

	Sektor Industri pengolahan
	Sektor pertanian
	Sektor Jasa
	Eksportir
	Importir
	Bank-bank lain atau lembaga keuangan bukan bank
	Lainnya (jelaskan) .....

9. Bagaimana Saudara mengevaluasi kondisi usaha dan kualitas kredit pada nasabah menurut ukurannya ? (isi dengan tick mark = v).

Skala Usaha	Kondisi usaha			Kualitas kredit		
	Di atas rata2	Rata-rata	Di bawah rata2	Di atas rata2	Rata-rata	Di bawah rata2
Usaha kecil (KUK)						
Usaha menengah (aset Rp1-5 M)						
Usaha besar (aset > Rp5 M)						

10. Apakah ada nasabah bank Saudara yang memiliki akses pembiayaan dari cabang atau kantor pusatnya di luar negeri ? (isi dengan tick mark = v).

	Ya
	Tidak

Apabila ada, berapa persen dari jumlah nasabah dan berapa persen kebutuhan dananya dipenuhi dari cabang atau kantor pusatnya di luar negeri ? (isi dengan persentase)

Persentase dari jumlah nasabah	Persentase dari kebutuhan dana

11. Dalam masa sebelum krisis, sektor manakah yang memiliki peluang terbaik bagi penyaluran kredit dilihat dari profitabilitasnya ? Misalnya sektor properti, ekspor, industri, dll. (isi dengan sektornya)

Sektor terbaik	
Sektor terbaik kedua	
Sektor terbaik ketiga	

12. Dalam masa sekarang, sektor manakah yang memiliki peluang terbaik bagi penyaluran kredit sehubungan dengan profitabilitas ? Misalnya sektor properti, ekspor, industri, dll. (isi dengan sektornya)

Sektor terbaik	
Sektor terbaik kedua	
Sektor terbaik ketiga	

13. Dilihat dari profitabilitasnya, jenis kredit apa yang ditawarkan bank Saudara serta berapa persen pangsa pendapatan dari masing-masing jenis kredit ?

Jenis	Urutan	Persentase pendapatan
Kredit modal kerja		
Kredit investasi		
Kredit konsumsi		
• Credit card		
• KPR		
• Kredit mobil		
• Lainnya		

14. Faktor-faktor apa yang menjadi bahan pertimbangan bank Saudara dalam melakukan penilaian terhadap resiko yang dihadapi nasabah baru dalam masa sebelum krisis maupun sekarang ? (isi urutan sesuai tingkat kepentingan, nomor urut 1 = paling penting)

Keterangan	Urutan	
	Sebelum Krisis	Sekarang
Pembayaran kredit		
Rasio hutang terhadap modal		
Pertumbuhan penjualan		
Jumlah agunan yang dipersyaratkan		
Jaminan dari lembaga pemerintah		
Jaminan pribadi atau perusahaan		

15. Bagaimana bank Saudara melakukan penilaian resiko terhadap eksportir ?

(isi dengan tick mark = v)

<input type="checkbox"/>	Beresiko lebih rendah dari rata-rata debitur
<input type="checkbox"/>	Memiliki resiko yang sama dengan rata-rata debitur
<input type="checkbox"/>	Beresiko lebih tinggi dari rata-rata debitur

16. Apabila eksportir memiliki resiko yang sama atau lebih tinggi dari rata-rata debitur, harap diisi urutannya faktor-faktor yang mempengaruhi :

(nomor urut 1 = alasan yang paling utama)

<input type="checkbox"/>	Eksportir mempunyai berbagai kegiatan yang tidak dapat dirinci
<input type="checkbox"/>	Eksportir mempunyai hutang dalam valas yang besar
<input type="checkbox"/>	Volume usaha kecil

17. Harap diisi penurunan jumlah nasabah dan outstanding kredit setelah krisis (Juli 1997). (isi dengan tick mark = v)

Prosentase	Dari total nasabah	Dari volume kredit
1 – 5 %		
5 – 10%		
10 – 20%		
Lebih dari 20%		

18. Jika bank Saudara telah menyalurkan kredit, masuk dalam kategori manakah kredit tersebut (Isi berdasarkan urutan paling besar, nomorurut 1 = paling besar)

Jenis	Prioritas
Kredit Baru	
Perpanjangan	
Lainnya	

19. Aplikasi kredit baru berasal dari kelompok mana ? (isi urutan sesuai asal kelompok, nomorurut 1 = paling banyak)

	Nasabah lama bank Saudara
	Nasabah yang berasal dari bank besar
	Nasabah yang berasal dari bank menengah
	Nasabah yang berasal dari lembaga keuangan non-bank
	Nasabah yang berasal dari bank kecil

20. Apa yang dihadapi bank Saudara dalam restrukturisasi kredit ? (isi berdasarkan urutan, nomorurut 1 = masalah paling utama)

	Masalah informasi debitur (misal Neraca, cash flow, dll.)
	Tidak ada instrumen keuangan yang memadai untuk restrukturisasi kredit
	Biaya untuk due dilligence yang terlalu besar
	Tidak ada permasalahan dalam restrukturisasi kredit
	Lainnya (jelaskan) .....

21. Jika bank Saudara mengurangi jumlah kredit, darimana nasabah Saudara akan mendapat alternatif pembiayaan ? (isi sesuai urutan prioritas, nomorurut 1 = paling besar)

	Pembiayaan sendiri
	Partisipasi investor asing
	Investor domestik
	Penerbitan surat berharga perusahaan (CP, obligasi, dll)
	Tidak ada alternatif
	Lainnya (jelaskan) .....

22. Dari sudut pandang bank Saudara, apa yang diperlukan untuk memperbaiki pasar perkreditan di Indonesia ? (isi sesuai urutan prioritas, nomor urut 1 = paling penting)

	Stabilitas nilai tukar
	Restrukturisasi hutang perusahaan di Indonesia
	Pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi
	Informasi yang lebih baik tentang keadaan keuangan debitur
	Peningkatan jumlah kredit oleh bank asing
	Pembagian resiko usaha antara sektor swasta dan pemerintah
	Lainnya (jelaskan) .....

23. Apakah instrumen kredit menurut pertimbangan Saudara penting untuk pemulihan perekonomian ? (isi sesuai urutan prioritas, nomor urut 1 = paling penting)

	Skema penjaminan oleh bank pemerintah
	Pinjaman jangka menengah dan panjang
	Trade financing oleh bank domestik
	Trade financing oleh bank asing
	Fasilitas overdraft
	SKBDN
	Lainnya .....

24. Dalam bank Saudara telah menolak permohonan kredit, apakah Saudara akan menyetujui permohonan kredit tersebut apabila nasabah menerima : (isi dengan tick mark = v)

Alasan	Ya	Tidak
Suku bunga yang lebih tinggi		
Jangka waktu yang lebih pendek		

25. Isi urutan kegiatan di bawah ini sesuai dengan kategori resikonya :

(nomor urut 1= paling beresiko)

	Pinjaman konsumsi
	Pinjaman ke perusahaan yang memproduksi untuk pasar domestik
	Pinjaman ke perusahaan yang memproduksi untuk pasar ekspor
	Pinjaman ke perusahaan asing atau patungan
	Pinjaman ke bank lain
	Pinjaman ke pemerintah (obligasi pemerintah)
	Pinjaman ke Bank Indonesia (SBI)

26. Apakah yang bank Saudara saat ini lakukan apabila mengalami kelebihan likuiditas ? (isi sesuai dengan urutan prioritas, nomor urut 1 = paling utama)

	Menanamkan dana di SBI
	Membayar hutang luar negeri
	Membeli obligasi pemerintah
	Menyalurkan kredit ke perusahaan asing atau patungan
	Menyalurkan kredit ke perusahaan yang memproduksi untuk pasar ekspor
	Membayar hutang dalam negeri
	Menanam dana ke bank lain (PUAB)
	Menanamkan dana ke perusahaan yang memproduksi untuk pasar domestik
	Menanamkan dana ke kredit konsumsi
	Lainnya (jelaskan) .....

---

## Lampiran 2

# Kuesioner Survey Permintaan Kredit

Nama		Nama	
Respondent		Interviewer	
Posisi / Jabatan		Telepon	
Nama		Team Leader	
Perusahaan			
Alamat		Supervisor	
Respondent			
Tanggal		Waktu Interview	
Interview			

Selamat pagi/siang/sore, saya \_\_\_\_\_ dari PT. Insight sebuah perusahaan penelitian. Saat ini kami sedang melakukan penelitian mengenai kredit bank. Oleh karena itu saya ingin sekali bertemu dan berbicara dengan staff keuangan di perusahaan ini.

### BAGIAN A - PERTANYAAN PENYARINGAN

P01	Apakah perusahaan Anda pernah mengajukan permohonan kredit ke bank?	Kode	Route
	Ya	1	P02
	Tidak	2	STOP

P01	Apakah saat ini perusahaan Anda mempunyai pinjaman di bank?	Kode	Route
	Ya	1	S00A
	Tidak	2	STOP

PERHATIKAN:

JIKA KODE "1" DI P01 DAN P02, LANJUTKAN KE BAGIAN B. JIKA TIDAK, STOP.

CATATAN : PASTIKAN BAHWA PERUSAHAAN RESPONDEN  
MEMPUNYAI LAPORAN KEUANGAN DAN RESPONDEN YANG AKAN  
DIWAWANCARAI BENAR-BENAR MENGETAHUI DAN MENGURUSI  
KEUANGAN PERUSAHAAN.

!!!!

S00A	INTERVIEWER: Tulis Jawaban, tandailah kode yang sesuai. SHOW CARD Bergerak dalam bidang apakah perusahaan Anda?	
SEKTOR USAHA		Kode
Pertanian		1
Industri pengolahan (manufaktur)		2
Perdagangan		3
Property / Real estate		4
Lainnya,		5

S00B	INTERVIEWER: Jangan tanyakan, isi kode sesuai dengan daftar skala perusahaan dari BI.	Kode
Besar		1
Menengah		2
Kecil		3

S01	Pada tahun berapa perusahaan Anda mulai beroperasi ? (Open Ended)

S02	Apakah perusahaan Anda tercatat di bursa?	Kode
	Ya	1
	Tidak	2

S03	Apakah perusahaan Anda berorientasi ekspor ?	Kode
	Ya	1
	Tidak	2

S04	Berasal dari manakah sumber pengadaan bahan baku	Kode
	perusahaan Anda (impor/ lokal)?	
	Impor	1
	Lokal	2

S05	SHOW CARD		
	INTERVIEWER: Tandailah kode yang sesuai dengan pilihan responden kemudian isilah persentasenya pada kolom di sebelahnya. Setelah selesai, jumlahkan persentase sumber pembiayaan dan isilah jumlahnya pada kolom paling kanan bawah. Jumlah total harus = 100 %. Jika tidak = 100 %, mintalah responden untuk mengulangi jawabannya.		
	Berasal dari mana sajakah sumber pembiayaan perusahaan Anda dan berapa persen masing-masing sumber pembiayaan tersebut dari jumlah total seluruh sumber pembiayaan per akhir tahun 2000? (Multiple)		
		Kode	Persentase
	S05A	Dana Sendiri	1 %
	S05B	Kredit investasi perbankan	2 %
	S05C	Kredit modal kerja perbankan	3 %
	S05D	Pinjaman jangka pendek dari luar negeri	4 %
	S05E	Pinjaman jangka panjang dari luar negeri	5 %
	S05F	Pinjaman subordinasi	6 %
	S05G	Commercial Paper	7 %
	S05H	Obligasi	8 %
S05I	Saham	9 %	
T O T A L ( HARUS = 100 % !!! )			%

S06	INTERVIEWER: Lihat Tabel di atas, carilah jawaban dari S05A sampai S05I yang persentasenya terbesar.		
	Apa alasan Anda memilih ... (persentase terbesar pada tabel di atas) sebagai sumber pembiayaan dengan persentase yang terbesar? (Open Ended)		
	PROBE FULLY (Multiple)		

S07	INTERVIEWER: Tanyakan Satu per Satu, Tulis Jawaban Sebenarnya pada Tabel yang tersedia.						
	Berdasarkan laporan keuangan perusahaan, berapa Volume Produksi, Omzet Penjualan, Investasi Baru, dan Jumlah Karyawan Tetap Perusahaan Anda dari Tahun 1996 sampai tahun 2000 : (Open Ended)						
			1996	1997	1998	1999	2000
		Volume					
	S07A	Produksi					
		(Rp. juta)					
		Omzet					
	S07B	Penjualan					
		(Rp. juta)					
		Investasi					
	S07C	Baru					
		(Rp. juta)					
		Karyawan					
	S07D	Tetap					
	(orang)						

S08	INTERVIEWER: Tanyakan Satu per Satu, Tulis Jawaban Sebenarnya pada Tabel yang tersedia.					
	Berdasarkan laporan keuangan perusahaan, berapa Jumlah Hutang Total, Modal, Laba Kotor, Asset Total, HPP, Rata-rata Persediaan (Inventory), Net cash flow, dan Passiva Lancar (Current Liabilities) Perusahaan Anda dari Tahun 1996 sampai tahun 2000 : (Open Ended)					
		1996	1997	1998	1999	2000
S08A	Hutang					
	(Rp. juta)					
S08B	Modal					
	(Rp. juta)					
S08C	Laba Ktr					
	(Rp. juta)					
S08D	Asset					
	(Rp. Juta)					
S08E	HPP					
	(Rp. Juta)					
S08F	Inventory					
	(Rp. Juta)					
	Net cash					
S08G	flow					
	(Rp. Juta)					
	Passiva					
S08H	Lancar					
	(Rp. Juta)					

## INDIKATOR KEUANGAN

INTERVIEWER: Jangan Tanyakan Tabel Ini, isilah sesuai dengan formula yang diberikan di bawah setelah interview selesai.

Indikator	Formula	1996	1997	1998	1999	2000
DER (%)	Hutang/modal					
	(S08A/S08B)					
ROE (%)	Laba Kotor/modal					
	(S08C/S08B)					
ROA (%)	Laba Kotor/Asset					
	(S08C/S08D)					
Inventory turnover	HPP/Inventory					
	(S08E/S08F)					
Cash Flow from Operation Ratio (%)	Net Cash Flow/ Passiva Lancar					
	(S08G / S08H)					

S00B	INTERVIEWER: Jangan tanyakan, isi kode sesuai dengan daftar skala perusahaan dari BI.	Kode
	Besar	1
	Menengah	2
	Kecil	3

Q01	Bagaimana perkembangan produksi atau penjualan perusahaan Anda dalam 2 tahun terakhir (naik / turun)?	Kode	Route
	Naik	1	Q02
	Turun	2	Q04

Q02	SHOW CARD Apa sajakah penyebab kenaikan produksi / penjualan perusahaan Anda? (Multiple)	Kode
	Permintaan naik	1
	Ekspansi usaha	2
	Mendapat tambahan modal	3
	Mendapat tambahan kredit	4
	Lainnya, jelaskan .....	5

Q03	<p>INTERVIEWER:</p> <p>JIKA RESPONDEN MENJAWAB LEBIH DARI SATU JAWABAN PADA Q02, MINTALAH RESPONDEN UNTUK MENGURUTKAN JAWABANNYA BERDASARKAN PENYEBAB KENAikan PRODUKSI / PENJUALAN DARI YANG PALING UTAMA (NO. URUT 1) DAN ISILAH TITIK-TITIK DI BAWAH INI DENGAN KODE PADA Q02.</p> <p>JIKA RESPONDEN HANYA MENJAWAB SATU JAWABAN PADA Q02, JANGAN TANYAKAN, TULIS KODE JAWABAN TERSEBUT PADA URUTAN 1 DAN LANJUTKAN KE Q06.</p> <p>Tolong urutkan jawaban Anda berdasarkan penyebab kenaikan produksi / penjualan yang paling utama (no. urut 1)</p>
Q03A	Urutan 1 ..... (kode di Q02)
Q03B	Urutan 2 ..... (kode di Q02)
Q03C	Urutan 3 ..... (kode di Q02)
Q03D	Urutan 4 ..... (kode di Q02)
Q03E	Urutan 5 ..... (kode di Q02)

Q04	SHOW CARD Apa sajakah penyebab penurunan produksi / penjualan perusahaan Anda ? (Multiple)	Kode
	Permintaan turun	1
	Tidak tersedianya kredit perbankan	2
	Restrukturisasi perusahaan	3
	Peningkatan harga	4
	Lainnya, jelaskan .....	5

Q05	<p>INTERVIEWER:</p> <p>JIKA RESPONDEN MENJAWAB LEBIH DARI SATU JAWABAN PADA Q04, MINTALAH RESPONDEN UNTUK MENGURUTKAN JAWABANNYA BERDASARKAN PENYEBAB PENURUNAN PRODUKSI / PENJUALAN DARI YANG PALING UTAMA (NO. URUT 1) DAN ISILAH TITIK-TITIK DI BAWAH INI DENGAN KODE PADA Q04.</p> <p>JIKA RESPONDEN HANYA MENJAWAB SATU JAWABAN PADA Q04, JANGAN TANYAKAN, TULIS KODE JAWABAN TERSEBUT PADA URUTAN 1 DAN LANJUTKAN KE Q06.</p> <p>Tolong urutkan jawaban Anda berdasarkan penyebab penurunan produksi / penjualan yang paling utama (no. urut 1)</p>
	Q05A Urutan 1 ..... (kode di Q04)
	Q05B Urutan 2 ..... (kode di Q04)
	Q05C Urutan 3 ..... (kode di Q04)
	Q05D Urutan 4 ..... (kode di Q04)
	Q05E Urutan 5 ..... (kode di Q04)

Q06	Apabila terjadi kenaikan produksi / penjualan, apakah Anda melakukan peningkatan kapasitas usaha (investasi) ?	Kode	Route
	Ya	1	Q07
	Tidak	2	Q10

Q07	SHOW CARD Dari mana sajakah sumber pembiayaan investasi Anda ? (Multiple)	Kode
	Dana sendiri / partner usaha	1
	Bank	2
	Pasar Modal	3
	Obligasi	4
	Supplier (trade financing)	5
	Perusahaan terafiliasi	6
	Leasing	7
	Luar Negeri	8
	Lainnya, .....	9

Q08	<p>INTERVIEWER:</p> <p>JIKA RESPONDEN MENJAWAB LEBIH DARI SATU JAWABAN PADA Q07, MINTALAH RESPONDEN UNTUK MENGURUTKAN JAWABANNYA BERDASARKAN SUMBER PEMBIAYAAN INVESTASI YANG JUMLAH NOMINALNYA PALING BESAR (NO. URUT 1) SAMPAI YANG PALING KECIL DAN ISILAH TITIK-TITIK DI BAWAH INI DENGAN KODE PADA Q07.</p> <p>JIKA RESPONDEN HANYA MENJAWAB SATU JAWABAN PADA Q07, JANGAN TANYAKAN, TULIS KODE JAWABAN TERSEBUT PADA URUTAN 1 DAN LANJUTKAN KE Q09.</p> <p>Tolong urutkan jawaban Anda berdasarkan sumber pembiayaan dari yang jumlah nominalnya terbesar (no. urut 1) sampai yang terkecil.</p>
	Q08A Urutan 1 ..... (kode di Q07)
	Q08B Urutan 2 ..... (kode di Q07)
	Q08C Urutan 3 ..... (kode di Q07)
	Q08D Urutan 4 ..... (kode di Q07)
	Q08E Urutan 5 ..... (kode di Q07)
	Q08F Urutan 6 ..... (kode di Q07)
	Q08G Urutan 7 ..... (kode di Q07)
	Q08H Urutan 8 ..... (kode di Q07)

Q09	<p>INTERVIEWER: LIHAT KODE Q08A DAN TANYAKAN PERTANYAAN BERIKUT INI</p>
	<p>Apa alasan Anda memilih .... (kode Q08A) sebagai sumber pembiayaan utama ? (Open Ended) PROBE FULLY (Multiple)</p>

Q10	Apakah perusahaan Anda mengalami kesulitan memperoleh kredit dalam kurun waktu 1 tahun terakhir ?	Kode	Route
	Ya	1	Q11
	Tidak	2	Q13

Q11	SHOW CARD Apa yang menjadi penyebab perusahaan Anda mengalami kesulitan memperoleh kredit dalam kurun waktu 1 tahun terakhir ? (Multiple)	Kode
	Cash flow perusahaan yang buruk	1
	Agunan yang tidak mencukupi	2
	Resiko di sektor usaha Anda	3
	Kinerja perusahaan menurun	4
	Bank Anda membatasi kredit	5
	Informasi keuangan yang belum memenuhi persyaratan bank	6
	Lainnya, jelaskan .....	7

Q12	<p>INTERVIEWER:</p> <p>JIKA RESPONDEN MENJAWAB LEBIH DARI SATU JAWABAN PADA Q11, MINTALAH RESPONDEN UNTUK MENGURUTKAN JAWABANNYA BERDASARKAN PENYEBAB KESULITAN MEMPEROLEH KREDIT DARI YANG PALING UTAMA (NO. URUT 1) DAN ISILAH TITIK-TITIK DI BAWAH INI DENGAN KODE PADA Q11.</p> <p>JIKA RESPONDEN HANYA MENJAWAB SATU JAWABAN PADA Q11, JANGAN TANYAKAN, TULIS KODE JAWABAN TERSEBUT PADA URUTAN 1 DAN LANJUTKAN KE Q13.</p> <p>Tolong urutkan jawaban Anda dari penyebab kesulitan memperoleh kredit dari yang paling utama (no. urut 1)</p>
	Q12A Urutan 1 ..... (kode di Q11)
	Q12B Urutan 2 ..... (kode di Q11)
	Q12C Urutan 3 ..... (kode di Q11)
	Q12D Urutan 4 ..... (kode di Q11)
	Q12E Urutan 5 ..... (kode di Q11)
	Q12F Urutan 6 ..... (kode di Q11)
	Q12G Urutan 7 ..... (kode di Q11)

Q13	<p>SHOW CARD</p> <p>Apabila perusahaan Anda menghadapi kesulitan pendanaan dari bank, apa alternatif Anda untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan? (Multiple)</p>	Kode
	Dana sendiri / partner usaha	1
	Pasar modal	2
	Obligasi	3
	Supplier (trade financing)	4
	Perusahaan terafiliasi	5
	Leasing	6
	Luar Negeri	7
	Lainnya, jelaskan .....	8

Q14	<p>INTERVIEWER:</p> <p>JIKA RESPONDEN MENJAWAB LEBIH DARI SATU JAWABAN PADA Q13, MINTALAH RESPONDEN UNTUK MENGURUTKAN JAWABANNYA BERDASARKAN ALTERNATIF SUMBER PEMBIAYAAN YANG PALING UTAMA (NO. URUT 1) DAN ISILAH TITIK-TITIK DI BAWAH INI DENGAN KODE PADA Q13.</p> <p>JIKA RESPONDEN HANYA MENJAWAB SATU JAWABAN PADA Q13, JANGAN TANYAKAN, TULIS KODE JAWABAN TERSEBUT PADA URUTAN 1 DAN LANJUTKAN KE Q15.</p> <p>Tolong urutkan jawaban Anda dari alternatif sumber pembiayaan yang paling utama (no.urut 1)</p>
	Q14A Urutan 1 ..... (kode di Q13)
	Q14B Urutan 2 ..... (kode di Q13)
	Q14C Urutan 3 ..... (kode di Q13)
	Q14D Urutan 4 ..... (kode di Q13)
	Q14E Urutan 5 ..... (kode di Q13)
	Q14F Urutan 6 ..... (kode di Q13)
	Q14G Urutan 7 ..... (kode di Q13)

CATATAN: JIKA KODE "1" PADA Q14A, LANJUTKAN KE Q15. JIKA TIDAK, LANGSUNG KE Q16.

Q15	<p>JIKA KODE "1" PADA Q14A</p> <p>SHOW CARD</p> <p>Apa alasan Anda memilih dana sendiri sebagai alternatif sumber pembiayaan utama ?</p>	Kode
	Modal sendiri lebih murah dibanding modal dari luar	1
	Sulit mendapatkan dana dari luar	2
	Bank / investor campur tangan terhadap manajemen	3
	Lainnya, jelaskan .....	4

Q16	Apakah perusahaan Anda melihat persyaratan untuk memperoleh kredit semakin ketat ?	Kode
	Ya	1
	Tidak	2

Q17	Apakah bank Anda memberikan fleksibilitas dalam negosiasi mengenai tingkat suku bunga pinjaman dalam 1 tahun terakhir?	Kode
	Ya	1
	Tidak	2

Q18	Apakah bank Anda memberikan fleksibilitas dalam negosiasi mengenai agunan dalam 1 tahun terakhir?	Kode
	Ya	1
	Tidak	2

Q19	Apakah perusahaan Anda pernah melakukan akad kredit pada masa setelah krisis ekonomi ?	Kode	Route
	Ya	1	Q20
	Tidak	2	Q22

Q20	SHOW CARD Dalam rangka apa perusahaan Anda melakukan akad kredit? (Multiple)	Kode
	Kredit baru	1
	Peningkatan / tambahan plafond kredit lama	2
	Penjadwalan kembali kredit lama	3
	Restrukturisasi kredit (pemotongan tunggakan, plafondering, dll.)	4
	Perpanjangan kredit lama (roll over)	5
	Lainnya, jelaskan .....	6

Q21	<p>INTERVIEWER:</p> <p>JIKA RESPONDEN MENJAWAB LEBIH DARI SATU JAWABAN PADA Q20, MINTALAH RESPONDEN UNTUK MENGURUTKAN JAWABANNYA BERDASARKAN TUJUAN MELAKUKAN AKAD KREDIT YANG PALING UTAMA (NO. URUT 1) DAN ISILAH TITIK-TITIK DI BAWAH INI DENGAN KODE PADA Q20.</p> <p>JIKA RESPONDEN HANYA MENJAWAB SATU JAWABAN PADA Q20, JANGAN TANYAKAN, TULIS KODE JAWABAN TERSEBUT PADA URUTAN 1 DAN LANJUTKAN KE Q22.</p> <p>Tolong urutkan jawaban Anda berdasarkan tujuan melakukan akad kredit dari yang paling utama (no. urut 1)</p>
	Q21A Urutan 1 ..... (kode di Q20)
	Q21B Urutan 2 ..... (kode di Q20)
	Q21C Urutan 3 ..... (kode di Q20)
	Q21D Urutan 4 ..... (kode di Q20)
	Q21E Urutan 5 ..... (kode di Q20)
	Q21F Urutan 6 ..... (kode di Q20)

Q22	Berapa persenkah kebutuhan kredit perusahaan Anda yang dapat disetujui oleh bank dari pengajuan kredit selama 2 tahun terakhir ?	Kode
	0 – 20 %	1
	21 – 40 %	2
	41 – 60 %	3
	61 – 80 %	4
	81 – 100 %	5

Q23	SHOW CARD Kelompok bank apa yang menyalurkan kredit ke perusahaan Anda ? (Multiple)	Kode
	Persero	1
	Bank swasta nasional	2
	Bank asing / campuran	3
	Bank Pembangunan Daerah	4
	Bank perkreditan Rakyat	5
	Lainnya, jelaskan ...	6

Q24	INTERVIEWER: JIKA RESPONDEN MENJAWAB LEBIH DARI SATU JAWABAN PADA Q23, MINTALAH RESPONDEN UNTUK MENGURUTKAN JAWABANNYA BERDASARKAN BANK YANG MENYALURKAN KREDIT DENGAN JUMLAH NOMINAL YANG TERBESAR (NO. URUT 1) SAMPAI YANG TERKECIL DAN ISILAH TITIK-TITIK DI BAWAH INI DENGAN KODE PADA Q23. JIKA RESPONDEN HANYA MENJAWAB SATU JAWABAN PADA Q23, JANGAN TANYAKAN, TULIS KODE JAWABAN TERSEBUT PADA URUTAN 1 DAN LANJUTKAN KE Q25. Tolong urutkan jawaban Anda berdasarkan bank yang menyalurkan kredit dengan jumlah nominal yang terbesar (no. urut 1) sampai yang terkecil.
	Q24A Urutan 1 ..... (kode di Q23)
	Q24B Urutan 2 ..... (kode di Q23)
	Q24C Urutan 3 ..... (kode di Q23)
	Q24D Urutan 4 ..... (kode di Q23)
	Q24E Urutan 5 ..... (kode di Q23)
	Q24E Urutan 6 ..... (kode di Q23)

Q25	Berapa jumlah bank di mana perusahaan Anda menjadi nasabahnya ?	Kode
	1	1
	2	2
	3	3
	4	4
	5	5
	Lebih dari 5	6

Q26	Sudah berapa lama perusahaan Anda menjalin hubungan dengan bank yang sekarang ini memberikan kredit terbesar ke perusahaan Anda?	Kode
	Kurang dari 2 tahun	1
	2 sampai 5 tahun	2
	5 sampai 10 tahun	3
	Lebih dari 10 tahun	4

Q27	Apakah bank pemberi kredit merupakan perusahaan terafiliasi dengan perusahaan Anda (satu grup usaha) ?	Kode
	Ya	1
	Tidak	2

Q28	SHOW CARD	Kode
	Apabila perusahaan Anda memperoleh kredit dari bank, maka termasuk dalam kategori kredit apa ? (Multiple)	
	Kredit investasi	1
	Kredit modal kerja	2

CATATAN : JIKA RESPONDEN MENJAWAB KEDUANYA PADA PERTANYAAN Q28, LANJUTKAN KE Q29. JIKA RESPONDEN HANYA MENJAWAB SALAH SATU SAJA, LANGSUNG KE Q30.

Q29	JIKA KODE "1" DAN "2" DI Q28 Manakah jumlah kredit yang lebih besar, kredit investasi atau kredit modal kerja ?	Kode
	Kredit investasi	1
	Kredit modal kerja	2

Q30	Apakah preferensi Anda terhadap sumber pembiayaan dari bank mengalami penurunan ?	Kode	Route
	Ya	1	Q31
	Tidak	2	Q33

Q31	SHOW CARD Apa penyebab penurunan preferensi Anda terhadap sumber pembiayaan dari bank ? (Multiple)	Kode
	Suku bunga tinggi	1
	Persyaratan ketat (agunan, prosedur, dll.)	2
	Jangka waktu kredit terlalu pendek	3
	Lainnya, jelaskan .....	4

Q32	<p>INTERVIEWER:</p> <p>JIKA RESPONDEN MENJAWAB LEBIH DARI SATU JAWABAN PADA Q31, MINTALAH RESPONDEN UNTUK MENGURUTKAN JAWABANNYA BERDASARKAN PENYEBAB PENURUNAN PREFERENSI TERHADAP SUMBER PEMBIAYAAN DARI BANK DARI YANG PALING UTAMA (NO. URUT 1) DAN ISILAH TITIK-TITIK DI BAWAH INI DENGAN KODE PADA Q31.</p> <p>JIKA RESPONDEN HANYA MENJAWAB SATU JAWABAN PADA Q31, JANGAN TANYAKAN, TULIS KODE JAWABAN TERSEBUT PADA URUTAN 1 DAN LANJUTKAN KE Q33.</p> <p>Tolong urutkan jawaban Anda berdasarkan penyebab penurunan preferensi terhadap sumber pembiayaan dari bank dari yang paling utama (no.urut 1).</p>		
	Q32A	Urutan 1 .....	(kode di Q31)
	Q32B	Urutan 2 .....	(kode di Q31)
	Q32C	Urutan 3 .....	(kode di Q31)
	Q32D	Urutan 4 .....	(kode di Q31)

Q33A	SHOW CARD	Kode	Route
	Apakah perusahaan Anda merencanakan untuk mengajukan kredit ke bank dalam 2 tahun ke depan ?		
	Ya	1	Q33B
	Tidak	2	Q36

Q33B	SHOW CARD	Kode
	Jenis kredit apa yang menjadi preferensi perusahaan Anda dalam 2 tahun ke depan ?	
	Kredit investasi	1
	Kredit modal kerja	2

Q34	SHOW CARD Apabila perusahaan Anda akan mengajukan kredit ke bank, maka bank yang bagaimana yang Anda pilih ? (Multiple)	Kode
	Bank yang selama ini digunakan untuk menyimpan dana	1
	Bank yang menawarkan persyaratan yang mudah	2
	Bank yang besar volume usahanya	3
	Bank yang sudah Anda kenal pemiliknya	4
	Lainnya, jelaskan .....	5

Q35	INTERVIEWER: JIKA RESPONDEN MENJAWAB LEBIH DARI SATU JAWABAN PADA Q34, MINTALAH RESPONDEN UNTUK MENGURUTKAN JAWABANNYA BERDASARKAN PILIHAN RESPONDEN DARI BANK YANG PALING UTAMA (NO. URUT 1) DAN ISILAH TITIK-TITIK DI BAWAH INI DENGAN KODE PADA Q34. JIKA RESPONDEN HANYA MENJAWAB SATU JAWABAN PADA Q34, JANGAN TANYAKAN, TULIS KODE JAWABAN TERSEBUT PADA URUTAN 1 DAN LANJUTKAN KE Q36. Tolong urutkan jawaban Anda berdasarkan pilihan bank dari yang paling utama (no. urut 1).	
	Q35A	Urutan 1 ..... (kode di Q34)
	Q35B	Urutan 2 ..... (kode di Q34)
	Q35C	Urutan 3 ..... (kode di Q34)
	Q35D	Urutan 4 ..... (kode di Q34)
	Q35E	Urutan 5 ..... (kode di Q34)

Q36	SHOW CARD Bagaimana Anda melakukan pengajuan permohonan kredit ke bank ? (Multiple)	Kode
	Ke satu bank dulu, apabila ditolak, baru ke bank lain	1
	Diajukan sekaligus ke beberapa bank	2
	Beberapa bank datang ke perusahaan Anda untuk menawarkan kreditnya	3
	Lainnya, jelaskan .....	4

Q37	SHOW CARD Bagaimana perusahaan Anda mengelola kelebihan dana dalam 2 tahun terakhir ? (Multiple)	Kode
	Digunakan sebagai tambahan modal kerja	1
	Sebagai tambahan investasi untuk pengembangan usaha	2
	Disimpan di bank	3
	Digunakan untuk mengembangkan usaha lain	4
	Diinvestasikan dalam pasar modal atau uang	5
	Lainnya, jelaskan .....	6

Q38	<p>INTERVIEWER:</p> <p>JIKA RESPONDEN MENJAWAB LEBIH DARI SATU JAWABAN PADA Q37, MINTALAH RESPONDEN UNTUK MENGURUTKAN JAWABANNYA BERDASARKAN PENGGUNAAN KELEBIHAN DANA YANG TERBESAR (NO. URUT 1) SAMPAI YANG TERKECIL DAN ISILAH TITIK-TITIK DI BAWAH INI DENGAN KODE PADA Q37.</p> <p>JIKA RESPONDEN HANYA MENJAWAB SATU JAWABAN PADA Q37, JANGAN TANYAKAN, TULIS KODE JAWABAN TERSEBUT PADA URUTAN 1 DAN LANJUTKAN KE Q39.</p> <p>Tolong urutkan jawaban Anda berdasarkan penggunaan kelebihan dana yang terbesar (no. urut 1) sampai yang terkecil.</p>
Q38A	Urutan 1 ..... (kode di Q37)
Q38B	Urutan 2 ..... (kode di Q37)
Q38C	Urutan 3 ..... (kode di Q37)
Q38D	Urutan 4 ..... (kode di Q37)
Q38E	Urutan 5 ..... (kode di Q37)
Q38F	Urutan 6 ..... (kode di Q37)

Q39	<p>SHOW CARD</p> <p>Menurut Anda, apa yang diperlukan untuk meningkatkan penyaluran kredit ke sektor riil di Indonesia ? (Multiple)</p>	Kode
	Stabilitas nilai tukar	1
	Restrukturisasi perbankan	2
	Penyelesaian restrukturisasi kredit perusahaan besar	3
	Pertumbuhan ekonomi yang tinggi	4
	Mendorong bank asing meningkatkan kredit	5
	Mendorong bank pemerintah meningkatkan kredit	6
	Kredit lunak dari bank sentral	7
	Pembagian resiko usaha antara swasta dan pemerintah	
	(mis. Asuransi kredit)	8
	Lainnya, jelaskan .....	9

## CATATAN :

- JIKA RESPONDEN MENJAWAB LEBIH DARI SATU JAWABAN PADA Q39, LANJUTKAN KE Q40.
- JIKA RESPONDEN HANYA MENJAWAB SALAH SATU SAJA, TULISKAN KODE JAWABAN PADA Q39 KE URUTAN 1 (Q40A) DAN STOP, INTERVIEW SELESAI, TERIMA KASIH.

Q40	INTERVIEWER: MINTALAH RESPONDEN UNTUK MENGURUTKAN JAWABAN PADA Q39 DARI PILIHAN YANG PALING UTAMA (NO. URUT 1) DAN ISILAH KODE PADA Q39 DI KOLOM BERIKUT INI	
	Tolong urutkan jawaban Anda dari pilihan yang paling utama (no. urut 1)	
	Q40A	Urutan 1 ..... (kode di Q39)
	Q40B	Urutan 2 ..... (kode di Q39)
	Q40C	Urutan 3 ..... (kode di Q39)
	Q40D	Urutan 4 ..... (kode di Q39)
	Q40E	Urutan 5 ..... (kode di Q39)
	Q40F	Urutan 6 ..... (kode di Q39)
	Q40G	Urutan 7 ..... (kode di Q39)
	Q40H	Urutan 8 ..... (kode di Q39)
	Q40I	Urutan 9 ..... (kode di Q39)

INTERVIEW SELESAI, TERIMA KASIH